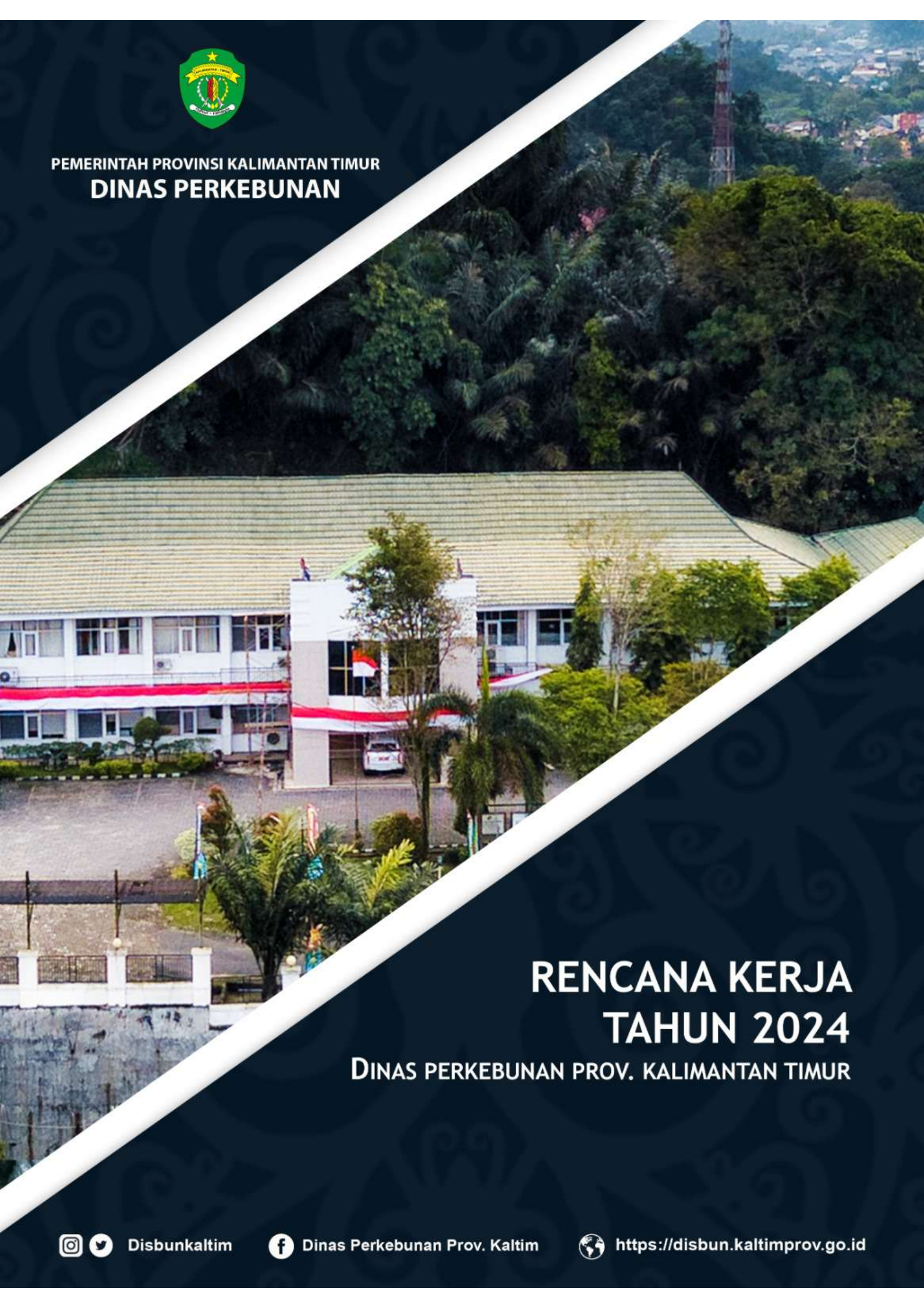




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN



RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALIMANTAN TIMUR



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 20);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
 - BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
 - BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
 - BAB V. Penutup.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- y. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;

- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN..	
I.1. Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	4
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD dan Capaian Renstra PD	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	91
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	150
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Kaltim.....	154
II.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	156
II.6. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	183
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	210
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	210
III.2.Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	216
III.3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	218
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	223
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.....	223
IV.2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan.....	224
V. PENUTUP.....	276

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
II.1 Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	14
II.2 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kakao 150 Ha	15
II.3 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha	16
II.4 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha.....	17
II.5 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha	18
II.6 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 150 Ha.....	19
II.7 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha	20
II.8 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 50 Ha	21
II.9 Daftar Lokasi Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir).....	22
II.10 Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	27
II.11 Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal	29
II.12 Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	34
II.13 Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	34
II.14 Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2022	38
II.15 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 150 Ha	39
II.16 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha	40

II.17	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha	41
II.18	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha	41
II.19	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha	42
II.20	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha	43
II.21	Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Aren Seluas 100 Ha	43
II.22	Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK	46
II.23	Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2022.....	61
II.24	KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2022.....	63
II.25	Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	66
II.26	Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	67
II.27	Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	69
II.28	Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur	72
II.29	Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2022.....	74
II.30	Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2022.....	77
II.31	Perusahan yang Dibina Tahun 2022.....	78
II.32	Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022.....	81
II.33	Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022.....	82
II.34	Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2022.....	84
II.35	Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani Tahun 2022..	88
II.36	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	92
II.37	Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2022.....	96
II.38	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dan n-1.....	109

II.39	Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023.....	113
II.40	Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2022.....	114
T.C.29	Tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD s/d Tahun 2022.....	126
T.C 31	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur.....	157
IV.1	Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	223
T.C 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.....	225

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
II.1	Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2022.....	28
II.2	Areal dengan Nilai Konservasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	62
II.3	Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022.....	94
II.4	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022.....	107
II.5	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022.....	107
II.6	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022.....	108
II.7	Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	111
II.8	Perkembangan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022	112
II.9	Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.....	115
III.1	Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional.....	215

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RENJA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

RENJA Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. RENJA Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen RENJA sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan RENJA Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diikuti oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA) proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah, perumusan RENJA dan tahap penetapan RENJA Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan RENJA Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

RENJA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun selaras dengan tema RKPD tahun 2024 yaitu **“Penguatan Peran Sub Sektor Perkebunan Dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah dan Nasional Yang Berkelanjutan”** dan mengakomodasikan RENJA Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan RENJA PD tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENJA Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.

Tujuan yang diharapkan dari RENJA ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2024;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2024;
3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran RENJA Perangkat Daerah tahun 2024; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RENJA, landasan hukum penyusunan RENJA, maksud dan tujuan penyusunan RENJA dan sistematika penulisan dokumen RENJA.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen RENJA Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) program pembangunan dan 1 (Satu) program penunjang dengan total anggaran sebesar Rp. 53.940.555.342,- terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 25.353.633.342,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.586.922.000,- dan melalui mekanisme perubahan APBD 2022 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 56.284.752.243,- (bertambah Rp. 2.344.196.901,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 27.365.880.243,- dan program pembangunan sebesar Rp. 28.918.872.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 49.645.749.860,- (88,20%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 25.632.820.123,- (93,67%) belanja pembangunan sebesar Rp. 24.012.929.737,- (83,04%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 25.632.820.123,- dari pagu Rp. 27.365.880.243 dengan capaian keuangan 93,67% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 99,79%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian 88,81% dari target 89%. Faktor pendorong pencapaian target program ini antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan semua unit kerja Dinas Perkebunan dalam meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. Target kinerja yang jelas; dan
- c. Melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan inspektorat.

Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 76,12% atau 105,72% dari target 72%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian Dinas dan 3 UPTD tercapai 14,28% atau 71,40% dari target 20%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 6 jenis atau 100% dari target 6 jenis;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

- e. Pada Dinas tercapai 8 jenis atau 100% dari target 8 jenis;
- f. Pada UPTD PBP tercapai 5 jenis atau 100% dari target 5 jenis;

g. Pada UPTD P2TP tercapai 9 jenis atau 100% dari target 9 jenis;
dan

h. Pada UPTD PBTP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7 Kegiatan diatas di dukung dengan 19 (sembilan belas) sub kegiatan yakni :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen perencanaan dan anggaran dengan capaian 10 dokumen atau 100% dari target 10 dokumen. Dokumen tersebut antara lain: DPA, RKA, DPPA, RKAP, RKT, Perubahan Renstra, RENJA 2023, Perubahan RENJA 2022, Pedoman Umum, dan Evaluasi RENJA.

b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun dengan capaian 4 laporan atau 100% dari target 4 laporan. Dokumen tersebut antara lain: LKjIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Laporan Statistik Perkebunan Tahun 2021.

c) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan dengan capaian 28 dokumen atau 100% dari target 28 dokumen dan jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan.

d) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian 12 bulan atau

100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- e) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 9 orang atau 133,33% dari target 12 orang;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 0 orang atau 0% dari target 13 orang karena kegiatan tersebut tidak dianggarkan diutamakan untuk kegiatan yang lebih prioritas;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 10 orang atau 80% dari target 8 orang; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 5 orang atau 160% dari target 8 orang.

- f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- h) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan dan jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

- i) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah barang cetakan dan penggandaan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 47.240 Eksemplar atau 100% dari target 47.240 Eksemplar;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 500 Eksemplar atau 100% dari target 500 Eksemplar;

- c. Pada UPTD P2TP tercapai 13.100 Eksemplar atau 100% dari target 13.100 Eksemplar; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 3.000 Eksemplar atau 100% dari target 3.000 Eksemplar.
- j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- k) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.
- l) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 15 unit atau 100% dari target 15 unit;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 17 unit atau 100% dari target 17 unit; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 9 unit atau 100% dari target 9 unit.
- m) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah surat yang diadministrasikan dengan capaian sebagai berikut:
- a. Pada Dinas tercapai 3.000 lembar atau 100% dari target 3.000 lembar;
 - b. Pada UPTD PBP tercapai 240 lembar atau 100% dari target 240 lembar;
 - c. Pada UPTD P2TP tercapai 395 lembar atau 98,73% dari target 390 lembar; dan
 - d. Pada UPTD PBTP tercapai 300 lembar atau 100% dari target 300 lembar.
- n) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian 12 bulan

atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

o) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

p) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

q) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 18 unit atau 100% dari target 18 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.

r) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 2 unit atau 100% dari target 2 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 4 unit atau 100% dari target 4 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit;
- dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 1 unit atau 100% dari target 1 unit.

s) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 21 unit atau 100% dari target 21 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 13 unit atau 100% dari target 13 unit;

- c. Pada UPTD P2TP tercapai 10 unit atau 100% dari target 10 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 28 unit atau 100% dari target 28 unit.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 13.218.069.532,- dari pagu Rp. 16.955.195.500,- dengan capaian kinerja keuangan 77,96%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar Rp. 11.156.061.775,- dari pagu dana Rp. 14.810.658.000,- dengan capaian kinerja keuangan 75,32% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 93,91%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian di dukung oleh 1 kegiatan yaitu Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan Output Kegiatan Produktivitas komoditas perkebunan strategis dengan target tahun 2022 19,30 Ton/Ha sedangkan realisasi produktivitas 12,49 Ton/Ha atau capaian kinerja 64,72%. Capaian produktivitas tersebut diperoleh dari produksi komoditas unggulan perkebunan yaitu Kakao, Karet, Kelapa dalam, Kelapa Sawit dan Lada dibagi dengan luas tanaman menghasilkan. Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun sub kegiatan dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1 Capaian Indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan Bidang Pengembangan Komoditi pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%)	Ket
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	17.022.588	93,91	Angka sementara Tahun 2022 (Sumber: Dinas Perkebunan)
	• Kelapa Sawit	18.020.894	16.938.307	93,99	
	• Karet	81.651	68.456	83,84	
	• Kakao	4.368	2.566	58,75	
	• Kelapa Dalam	12.500	7.201	57,61	
	• Lada	7.077	5.080	71,78	
	• Pala	0.20	12	6.000	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	18,4	12,49	64,72	
Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (dokumen)	1	1	100	
	a. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao) (Ton/Ha)	0,8	0,61	76,25	
	b. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet) (Ton/Ha)	1,45	1,29	88,97	
	c. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa) (Ton/Ha)	0,85	0,45	52,94	
	d. Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)	21	13,22	62,95	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	%)	Ket
	(Ton/Ha)				
	e. Produkti vitas Komoditas Perkebunan (Lada) (Ton/Ha)	1,19	0,88	73,61	

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan produktivitas komoditi unggulan di atas pada tahun 2022 dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Intensifikasi Kakao 150 Ha

Kegiatan intensifikasi kakao seluas 150 Ha dilaksanakan di di Kabupaten Berau 130 Ha dan Kota Samarinda 20 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah:

Tabel II.2 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kakao 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kec.	Kab/ Kota	
1.	Suaran Mandiri	Petrus Pelor	Suaran	Sambaliung	Berau	40
2.	Setuju Suaran	Yohanis Samma	Suaran	Sambaliung	Berau	25
3.	Mekar Jaya I	Nikolaus Jumin	Suaran	Sambaliung	Berau	32
4.	Tunas Mekar	Yacobas Lembang	Suaran	Sambaliung	Berau	25
5.	Maju Bersama	Tahang	Tumbit Melayu	Teluk Bayur	Berau	8
6.	Tunas Baru	Undin	Bayur	Samarinda Utara	Samarinda	20

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.3/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kakao 150 Ha) di Kabupaten Berau 130 Ha dan Kota Samarinda 20 Ha Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sanggam Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/4267/KPA-BPK/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
3. Fungisida sebanyak 150 Kg.

2) Intensifikasi Kelapa 20 Ha

Kegiatan Intensifikasi Kelapa seluas 20 Ha dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa 20 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/Kamp/Kel	Kec.	Kab/ Kota	
1.	Tanjung Lestari	Asis	Tanjung Tengah	Penajam	PPU	20

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.1/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kelapa 20 Ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh Penyedia Jasa CV. Shorea Mahakam dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja: 027/3500/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan 19 Agustus 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 2.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 100 Liter; dan
3. Insektisida sebanyak 40 Botol.

3) Intensifikasi kelapa sawit 150 Ha

Kegiatan intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur seluas 25 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 25 Ha, dan Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 75 Ha. Daftar kelompok tani penerima kegiatan intensifikasi kelapa sawit sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.4 Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/Kota	
1.	Santan Subur	Salma	Santan Ilir	Marangkayu	Kukar	25
2.	Kelapa Sawit Jaya	Abdul Halik	Santan Ilir	Marangkayu	Kukar	25
3.	Sirui Menre	Iskandar	Tanjung Limau	Ma. Badak	Kukar	25
4.	Nunjung Jaya	Misran	Giri Mukti	Penajam	PPU	50
5.	Tunas Harapan	Rohmad	Tepian Indah	Bengalon	Kutim	25

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.6/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Kelapa Sawit 150 Ha) di Kabupaten Kutai Timur 25 Ha, Kutai Kartanegara 75 Ha, dan Penajam Paser Utara 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Fajar dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4268/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
3. Insektisida 150 Botol.

4) Intensifikasi lada 150 Ha

Kegiatan intensifikasi lada seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara 65 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 36 Ha dan Kabupaten Berau 49 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Lada 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Lokasi			Luas (Ha)
		Desa/Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/Kota	
1.	Karya Bakti	Makarti	Marangkayu	Kukar	20
2.	Karya Hidup Baru	Bukit Merdeka	Samboja	Kukar	20
3.	Masa Kini	Batuah	Loa Janan	Kukar	20
4.	Gunung Makmur I	Semai 2	Sepaku	PPU	8
5.	Kebun Makmur	Argomulyo	Sepaku	PPU	9
6.	Giat	Sukaraja	Sepaku	PPU	6
7.	Tegal Makmur	Tengin Baru	Sepaku	PPU	7
8.	Rukun Makmur	Suko Mulyo	Sepaku	PPU	6
9.	Berkat Setia Bersati	Pesayan	Sambaliung	Berau	25
10.	Maju Bersama	Teluk Semanting	Pulau Derawan	Berau	24

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.5/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Lada 150 Ha) di Kabupaten Kutai Kertanegara 65 Ha, Penajam Paser Utara 36 Ha dan Berau 49 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Mulia dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/4269/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan 19 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg;
 2. Herbisida sebanyak 750 Liter; dan
 3. Insektisida Bassa sebanyak 450 paket.
- 5) Intensifikasi Karet 150 Ha

Kegiatan intensifikasi karet seluas 150 Ha dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat 50 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara 50 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara 25 Ha dan Kota Samarinda 25 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.6. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Intensifikasi Karet 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Rukun Iku Agawe Sentosa	Gusnoto	Prangat Baru	Marangkayu	Kukar	35
2.	Tani Sehati	Surono	Bunga Putih	Marangkayu	Kukar	15
3.	Harapan Mulia	Abd. Rahman	Sukomulyo	Long Iram	Kubar	25
4.	Mitra Tani I	Paulus	Belempung	Barong Tongkok	Kubar	25
5.	Maju Serbaguna	Winandar	Sukaraja	Sepaku	PPU	25
6.	Berkat Usaha	Ramli	Bentuas	Palaran	Samarinda	15
7.	Tungal Karsa	Mukmin	Bentuas	Palaran	Samarinda	10

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/151.4/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Karet 150 Ha) di Kabupaten Kutai Barat 50 Ha, Kutai Kartanegara 50 Ha, Penajam Paser Utara 25 Ha dann Kota Samarinda 25 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Yudhi Perkasa dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/3867/KPA-BPK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 dengan masa pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan 03 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Pupuk NPK sebanyak 15.000 Kg; dan
2. Herbisida sebanyak 750 Liter.

6) Peremajaan Kakao 50 Ha

Kegiatan peremajaan kakao seluas 50 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.7. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Peremajaan Kakao 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Tunas Mekar Jaya	Paulus Ledeang	Long Lanuk	Sambaliung	Berau	50

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/512/Kpts-Disbun/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Kegiatan Pengawasan Sebaran Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Peremajaan Kebun Kakao 50 Ha) di Kabupaten Berau 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Sinar Fajar dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/3635/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan 24 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Bibit Tanaman Kakao sebanyak 50.000 Batang;
2. Pupuk NPK sebanyak 5.000 Kg; dan
3. Herbisida sebanyak 250 Liter.

7) Rehabilitasi Lada 50 Ha

Kegiatan rehabilitasi lada seluas 50 Ha dilaksanakan di Kabupaten Berau 50 Ha. Dengan daftar kelompok tani penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.8. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Rehabilitasi Lada 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Ketua	Lokasi			Luas (Ha)
			Desa/ Kamp/Kel	Kecamatan	Kab/ Kota	
1.	Mekar Sari	M. Dullah	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	15
2.	Sari Makmur	Arwandi R.L	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	17
3.	Surya Tani	M. Salim	Bukit Makmur Jaya	Biatan	Berau	18

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/146/Kpts-Disbun/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Rehabilitasi Tanaman Lada 50 Ha) di Kabupaten Berau 50 Ha, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui tender oleh penyedia jasa CV. Swakarya Agro Kaltim dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/3636/KPA-BPK/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dengan masa pelaksanaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender yang terhitung mulai tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 24 September 2022, dengan paket pengadaan berupa:

1. Bibit Lada sebanyak 80.000 Batang
2. Pupuk NPK sebanyak 5.000 Kg
3. Herbisida sebanyak 250 Liter

8) Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir)

Kegiatan intensifikasi tanaman perkebunan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat. Dengan daftar lokasi penerima sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.9. Daftar Lokasi Penerima Bantuan Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pokir)

Kecamatan	Penerima	Luas (Ha)	Volume (Ltr)
Melak	1 Gapoktan	142	2.130
Bentian Besar	2 Kel. Tani	60	900
Tering	7 Kel. Tani	156	2.340
Siluq Ngurai	5 Kel. Tani	206	3.090
Long Iram	15 Kel. Tani	277	4.155
Jempang	42 Kel. Tani	794	11.910
Bongan	53 Kel. Tani	1.322	19.830
Sekolaq Darat	3 Gapoktan	428	6.420
Linggang Bigung	14 Kel. Tani	327	4.905
Nyuatan	20 Kel. Tani	300	4.500
Damai	11 Kel. Tani	195	2.925
Barong Tongkok	13 Kel. Tani	316	4.740
Jumlah		4.523	67.845

Pemberian bantuan di atas berdasarkan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.4/348/Kpts-Disbun/2022 tanggal 01 November 2022 tentang Penetapan Kelompok Tani/Peserta Sasaran Penerima Bantuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Intensifikasi Tanaman Perkebunan) di Kabupaten Kutai Barat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan melalui E-Purchasing/E-Katalog oleh Penyedia Jasa PT. Eco Agro Mandiri dengan Nomor Surat Perjanjian Kerja Nomor: 027/7236/KPA-BPK/XI/2022 tanggal 17 November 2022 dengan masa pelaksanaan selama 40 (Empat Puluh) hari kalender yang terhitung mulai

tanggal 17 November 2022 sampai dengan 26 Desember 2022, dengan paket pengadaan berupa Pupuk Hayati Cair sebanyak 67.845 Liter.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di atas antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani penerima bantuan dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.
2. Terlambatnya proses penetapan petani calon penerima bantuan oleh Dinas di Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan dan pelaksanaan program, sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.
3. Perubahan harga pasar untuk pupuk NPK dan Herbisida yang fluktuatif.
4. Perubahan bahan baku untuk pupuk dan pestisida sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal. Sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman. Kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan.
5. Untuk kegiatan melalui dana hibah dari kelompok tani sipatokong sipatuo dapat dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, namun kelompok tani tersebut tidak sanggup melakukan pengelolaan dana tersebut maka sesuai dengan musyawarah kelompok maka kelompok tani menyatakan mundur. Untuk pengusul Gapoktan Karya Bersama dan Kelompok Tani Sumber Makamur tidak dapat dilaksanakan bantuan yang diminta bukan merupakan komoditi perkebunan.
6. Kegiatan pokir di Kabupaten Kubar memiliki beberapa permasalahan, seperti kelompok tani yang belum terdaftar di Simluhtan, lahan anggota kelompok yang masuk dalam HGU perusahaan, lahan yang telah ditambang, lahan yang bukan komoditi perkebunan, dan anggota kelompok yang tidak mau menyerahkan fotocopy KTP. Kondisi ini membuat luasan yang dapat dibantu menjadi berkurang.

Tindak lanjut yang dilakukan terhadap permasalahan pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian antara lain:

1. Untuk meminimalisir permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif;
2. Aktif berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, Biro PBJ dan Inspektorat wilayah Kaltim dalam pelaksanaan intensifikasi tanaman perkebunan (POKIR) dan belanja hibah; dan
3. Untuk kondisi harga bahan baku Pupuk NPK dan Pestisida yang fluktuatif, tidak ada upaya yang dapat dilakukan, karena hal ini menjadi hambatan secara nasional bahkan dunia.

Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian tahun anggaran 2022 secara keseluruhan terlaksana dengan baik, paket bantuan seluruhnya telah 100% dilaksanakan dan diterima oleh petani dan mendapat tanggapan yang positif oleh petani. Dampak positif bagi masyarakat tersebut antara lain:

1. Terbantunya masyarakat dalam hal meningkatkan produktivitas tanaman mereka, terutama dalam merehabilitasi kebun;
2. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat yang secara otomatis terjadi dikarenakan masyarakat memiliki kemampuan dalam meningkatkan produktivitas kebun mereka;
3. Pemberdayaan penangkar bibit tanaman perkebunan yang secara langsung maupun tidak, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani penangkar;
4. Teroptimalisasinya lahan kebun masyarakat yang selama ini kurang optimal produktivitasnya;
5. Terbantunya petani pekebun menekuni usaha taninya dengan pelatihan dan pendampingan teknis oleh petugas dan pembina secara intensif;
6. Kembali menumbuhkan minat petani dalam memelihara dan meningkatkan produktivitas kebun mereka agar dapat meningkat dari segi ekonomi.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 1.602.348.629,- dari pagu sebesar Rp 1.611.155.000,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,45% dan untuk capaian indikator kinerja 117,60%. Indikator kinerja program ini Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 80% dengan realisasi 94,08%. Pada program ini terdapat 1 kegiatan yang mendukung yaitu Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman. Dengan output sub kegiatan yakni jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan sejumlah 25.000 benih dengan realisasi 100% dari target 25.000 benih, yang terdiri dari:
- a. Jumlah benih tanaman semusim dan rempah yang diperbanyak dengan target 10.000 benih dan realisasi 10.000 benih, terdiri dari benih lada 10.000 benih berlokasi di Km. 41 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - b. Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar yang diperbanyak dengan target 15.000 benih dan realisasi 25.000 benih, terdiri dari aren 5.000 benih berlokasi di UPTD PBTP Kota Samarinda, dan kelapa sawit 10.000 benih berlokasi di Km. 38 Kecamatan Loa Janan dan Km 29 Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Faktor pendorong capaian kinerja tersebut di atas antara lain:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kebutuhan benih unggul dan bermutu; dan
2. Kolaborasi dengan pihak terkait.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan
Upaya pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun, masih belum dapat dipenuhi secara maksimal karena masih terbatasnya sarana prasarana perbenihan. Sehingga dalam efisiensi waktu dan biaya masih terkendala dengan fasilitas yang belum memadai.
2. Terbatasnya SDM
Tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada

masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Tindak lanjut yang diupayakan dalam meminimalisir permasalahan antara lain:

1. Perbaikan Sarana Prasarana Perbenihan

Dalam upaya mengatasi masalah terbatasnya sarana prasarana perbenihan maka dilakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD.

2. Peningkatan Kualitas SDM

Menindaklanjuti kurangnya SDM dilakukan peningkatan kualitas SDM sebagai solusi cepat masalah tersebut, selain itu juga dilakukan perencanaan manajemen pegawai dan pembagian tupoksi agar dengan jumlah SDM yang ada seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 459.659.128,- atau 86,18% dari pagu Rp. 533.382.500,-. Indikator kinerja pada pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 6.592.223 benih atau 109,87% dari target 6.000.000 benih. Faktor pendorong tingginya capaian kinerja program ini yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel. Berikut rekapitulasi pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan di Kalimantan Timur tahun 2022:

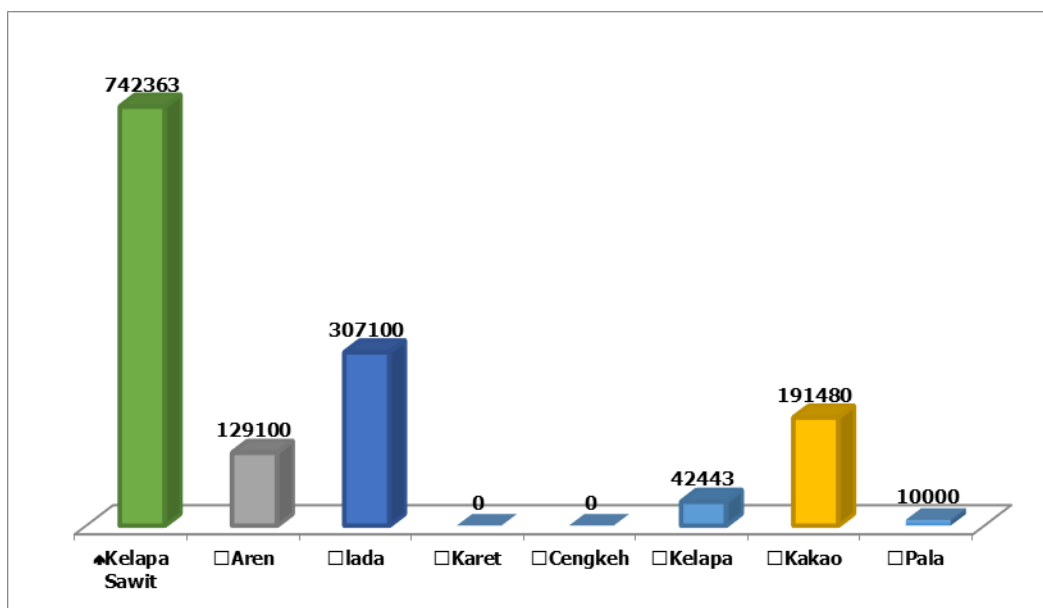
Tabel II.10. Data Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Bulan	Kelapa sawit	Lada	Aren	Karet	Kelapa	Kakao	Pala	Kopi	Jumlah
1	Januari	475.353	75.000	-	-	22	-	-	33.000	583.375
2	Februari	631.511	-	600	75.000	10.150	43.000	-	-	760.261
3	Maret	596.890	120.000	99.400	-	46	42.000	10.000	-	868.336
4	April	733.250	-	-	-	5.003	-	-	-	738.253
5	Mei	322.923	-	-	-	5	-	-	-	322.928
6	Juni	410.840	-	-	-	3.024	92.000	-	-	505.864
7	Juli	430.335	200.000	-	-	31.000	43.000	-	-	704.335
8	Agustus	582.157	60.000	-	600	2.509	150.000	-	5.000	800.266
9	September	545.658	163.198	-	-	4	30.170	-	-	739.030
10	Oktober	60.658	3.100	-	-	10.511	-	-	-	74.269
11	November	113.966	-	-	-	48.100	-	-	-	162.066
12	Desember	322.122	-	-	-	11.118	-	-	-	333.240
	Jumlah	5.225.663	621.298	100.000	75.600	121.492	400.170	10.000	38.000	6.592.223

Program ini terdiri dari 1 kegiatan, yaitu kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi dengan capaian 6.592.223 benih atau 109,87% dari target 6.000.000 benih. Sedangkan sub kegiatan pada kegiatan ini adalah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit tanaman, dengan indikator:

a. Jumlah benih yang disertifikasi

Capaian indikator ini adalah 1.415.996 benih atau 47,20% dari target 3.000.000 benih, dengan rincian sebagaimana grafik berikut:



Gambar II.1 Data Sertifikasi Benih per Komoditi Tahun 2022

Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan sertifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Terbatasnya benih dari sumber benih;
2. Kebun sumber benih yang rusak dan terserang penyakit;
3. Adanya pengadaan benih dari luar Provinsi Kalimantan Timur;
4. Terjadinya alih fungsi lahan dari sumber benih menjadi kebun produksi, tambang maupun komoditi pertanian; dan
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Adapun tindak lanjut yang dapat dilaksanakan pada sub kegiatan tersebut adalah:

1. Berkoordinasi dengan UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD-P2TP);
2. Kondisi kebun sekaran yang berada pada tahap pemeliharaan;
3. Melakukan sosialisasi perbenihan;
4. Mengusulkan formasi Pengawas Benih Tanaman (PBT); dan
5. Melakukan penetapan beberapa kebun sumber benih seperti komoditi lada dan aren.

b. Jumlah Peredaran Benih Illegal yang Diawasi

Capaian indikator ini adalah 99.093 benih atau 210,84% dari target 47.000 benih. Capaian tersebut diperoleh dengan melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran benih di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan dibantu oleh tenaga pengawas benih yang ada di Kabupaten/Kota serta berkoordinasi dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka penanganan peredaran benih illegal kelapa sawit. Adapun data yang dihasilkan dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.11. Data Pengawasan Peredaran Benih dan Kasus Benih Illegal

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
1	1,020	Dalam polibag	7 bulan	Tidak ditemukan	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	1. Surat pernyataan tidak memperjual belikan
2	2,000	Dalam polibag	7 bulan	Tidak ditemukan	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	2.Surat penghentian sementara
3	6,748	Dalam polibag	6-7 bulan	- B.A penyerahan kecambah sawit	Desa Giri Agung, Kec Sebulu, Kab.Kukar	1. Dokumen yang bersangkutan sudah dikonfirmasi
	300	Dalam polibag	9 bulan			

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
	250	Kecambah		<ul style="list-style-type: none"> - Nota pembelian benih PPKS dan Lonsum - Sertifikat PPKS dan Lonsum - DO PPKS, Lonsum - Daftar silang PPKS - Surat Ket. Ka UPT P3R Tenggarong Seberang 		<p>ke sumber benih dan dinyatakan dokumen palsu</p> <p>2. 300 benih dalam polibag dan 250 kecambah disita korwas polda sebagai BB</p> <p>3. Minggu ke 3 Maret akan dilakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan</p>
4	11,000	Siap tanam dalam polibag	11 bulan	Tanpa dokumen	Desa Bangun Rejo, Sebulu, Kukar	
5	250	Dalam polibag	8 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan ,Kubar	Beli melalui online SHOPEE dengan harga Rp.300.000,- (250 butir kecambah)
6	150	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan ,Kubar	Beli dengan sdr. Buhairi
7	150	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan ,Kubar	Beli dengan sdr. Buhairi
8	250	Dalam polibag	6 bulan	Tidak ditemukan	Desa Jambuk Makmur Kec.Bongan	Beli dengan sdr. Buhairi

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
					,Kubar	
9	3,500	Siap tanam	9-12 bulan	Tidak ditemukan	Kec. Muara Badak	Tanpa label Benih dari PPKS dan PT. Lonsum
10	5,000	Siap Tanam	9-12 bulan	Tidak ditemukan	Kab. Paser	Berlabel Benih dari PPKS dan PT. Lonsum
11	150	siap tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	Kota Balikpapan	Benih sdh dikirim via penyeberangan feri ke Sultra tanpa dokumen lalu dikembalikan lagi ke karantina Balikpapan
12	19,375		4,5 tahun	Tidak ada	Kota Balikpapan	
13	400		11 bulan	Tidak ada	Bontang Selatan	
14	150		11 bulan	Sertifikat benih hilang	Bontang Utara	
15	400		6 bulan	Tidak ada	Bontang	
16	30,000	Siap Tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	SP2 Kota Bangun	Benih asal PPKS sesuai dok benih sebanyak 1.250 butir kecambah, namun benih sudah habis dijual sisa benih asalan pembelian dari Medan Penghentian Peredaran
17	8,000	Pre Nursery	>3 bulan	Tidak ditemukan	Desa Tepian Batang Tanah Grogot	Benih dikecambahkann sendiri di lokasi temuan

No.	Jumlah Benih	Bentuk Benih	Umur Benih	Dokumen Benih	Lokasi ditemukan	Keterangan
18	1,500	Siap tanam	> 12 bulan	Tidak ditemukan	Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Penajam, PPU	
19	3,500	Kecambah		Tidak ditemukan	Jl. Tani Aman Km. 45 RT. 08 Kel. Bukit Merdeka, Samboja Kukar	Kemasan pada kecambah tertulis PT. Lonsum
	5,000	Siap tanam	9 bulan			
Total	99,093					

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih bibit perkebunan pada tahun 2022 ditemui beberapa permasalahan antara lain :

1. Kurangnya petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT) dan PPNS pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan sedangkan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2. Kurang aktifnya petugas pengawas benih di Kabupaten/Kota dalam mengawasi sumber benih maupun produsen benih yang ada di wilayahnya masing-masing sehingga pengawasan peredaran benih di Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan maksimal dan ketersediaan benih perkebunan tidak dapat terpantau dengan baik.
3. Belum maksimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada masyarakat pekebun.
4. Tidak adanya spanduk maupun baliho mengenai peraturan perbenihan pada tiap Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Timur.
5. Sistem OSS berpengaruh pada pengurusan dokumen seperti SP2BKS dan IUPBTP, serta pengawasan peredaran benih sehingga menimbulkan banyaknya benih ilegal yang beredar.

6. Kurangnya koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kepada Pengawas Benih Tanaman dan PPNS Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan antara lain:

1. Dilakukan penambahan tenaga fungsional Pengawas Benih Tanaman pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan sebanyak 9 (Sembilan) orang;
2. Petugas Pengawas Benih Tanaman Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam mengawasi sumber benih maupun produsen benih di wilayah kerja masing-masing;
3. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan harus dilaksanakan dengan cara pendekatan secara langsung ke lapangan;
4. Produsen benih agar melaporkan pemasangan label benih kepada Petugas Pengawas Benih Tanaman Provinsi/Kabupaten/Kota sebelum benih diedarkan; dan
5. Berkoordinasi dengan Pengawas Benih Tanaman luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, karantina wilayah kerja Balikpapan dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk meningkatkan pengawasan peredaran benih.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.037.862.000,- dari pagu Rp. 7.129.202.000,- (84,69%) dengan output pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Luas kebun yang dibangun seluas 1.575.966 Ha dari target 1.462.645 Ha atau 107,75%. Rincian luas komoditi perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.12. Rekapitulasi Luas Areal Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Komoditi	Luas (Ha)
1	Kelapa Sawit	1.411.861
2	Karet	123.776
3	Kakao	7.777
4	Kelapa Sawit	20.068
5	Lada	8.321
6	Komoditi Lain	4.163
Total		1.575.966

*) Angka sementara tahun 2022

- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 36 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 120%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.13. Rekapitulasi Kelompok Tani yang Mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
A	Kelapa Sawit		
1.	Sawit Makmur	Desa Santan Ilir Kec. MarangKayu	Kutai Kartanegara
2.	Anugrah Bersama	Desa Suka Damai Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara
3.	Nikai Mandiri	Kelurahan Sepan, Kec Penajam	Penajam Paser Utara

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
B	Lada		
4.	Usaha Bersama	Kamp. Linggang Menceleo Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat
5.	Mulia Abadi	Kamp. Tutung Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat
6.	Subur Makmur	Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
7.	Tora Lestari	Kamp. Muara Mujan Kec. Tering	Kutai Barat
8.	Wijaya Kusuma	Kamp. Benung Kec. Damai	Kutai Barat
9.	Harapan Baru	Kamp. Pepas Ehang Kec. Barong	Kutai Barat
10.	Sinar Harapan V	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
11.	KWT Bawe Ipu	Kamp. Damai Seberang Kec. Damai Seberang	Kutai Barat
C	Kelapa		
12.	Padat Karya	Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kutai Kartanegara
13.	Radak Sangokng	Kamp. Muara Tai Kec. Jempang	Kutai Barat
D	Kakao		
14.	KWT. Sumber Sari Rezeki	Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun	Kutai Kartanegara
15.	Usaha Bersama	Desa Bumi Rapak Kec. Kaubun	Kutai Timur
16.	Harapan Jaya	Desa Bumi Jaya Kec. Kaubun	Kutai Timur
17.	Urip Tani	Kampung Linggang	Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
		Jelemuq Kec. Tering	
18.	Teluk Subur	Kampung Tering Lama Kec. Tering	Kutai Barat
19.	Maju Bersama	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau
20.	Rantau Jaya	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau
21.	Tunas Baru	Bayur Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda
22.	Karya Usaha	Berambai Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda
E	Karet		
23.	Alam Subur	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu	Kutai Kartanegara
24.	Marimun Lestari	Kamp. Linggang Marimun Kec. Mook Manar Bulan	Kutai Barat
25.	Berkat Usaha I	Kampung Sekolaq Mulaq Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat
26.	Karya Warga	Kamp. Linggang Muyub Ilir Kec. Tering	Kutai Barat
27.	Abadi	Kamp. Muara Benagaq Kec. Melak	Kutai Barat
28.	Ubaq Mula	Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara	Samarinda
F	Pala		
29.	Sarunai	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau
30.	Mayang Padi	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten
31.	Sinar Mulya	Ds. Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk	Berau
G	Aren		
32.	Sumber Rejeki	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
33.	Suka Maju II	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
34.	Sejati	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
35.	Alam Lestari	Kamp. Sakalotoq Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat
36.	Aren Lestari	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat

Faktor pendorong tingginya pencapaian target program ini antara lain:

1. Ketersediaan benih;
2. Ketersediaan lahan yang bebas kawasan;
3. Tersedianya kelompok tani yang terdata di SIMLUHTAN; dan
4. Minat petani untuk membudidayakan komoditas perkebunan.

Program ini di dukung oleh kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan indikator jumlah luas kebun yang diperluas. Capaian pada indikator ini 720 Ha atau 100% dari target 720 Ha. Sub Kegiatan pada kegiatan ini adalah Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dimana indikatornya yaitu jumlah luas kebun yang diperluas dengan capaian sebagai berikut:

Tabel II.14. Capaian Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Tahun 2022

Indikator	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	(%)
Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	720	720	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kakao)	150	150	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Karet)	150	150	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kelapa)	50	50	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Kelapa Sawit)	70	70	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Lada)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Pala)	100	100	100
Jumlah luas kebun yang diperluas (Aren)	100	100	100

Upaya Dinas Perkebunan dalam meningkatkan perluasan kebun 7 komoditi di atas pada tahun 2022 dengan melaksanakan aktivitas sebagai berikut:

1) Perluasan areal kakao seluas 150 Ha

Kegiatan perluasan areal kakao tercapai 150 Ha dari target 150 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 20 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 50 Ha, Kabupaten Kutai Barat seluas 25 Ha, Kabupaten Berau seluas 40 Ha, dan Kota Samarinda seluas 15 Ha dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.15. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kakao Seluas 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kakao			<u>150</u>
1.	KWT. Sumber Sari Rezeki	Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun	Kutai Kartanegara	20
2.	Usaha Bersama	Desa Bumi Rapak Kec. Kaubun	Kutai Timur	25
3.	Harapan Jaya	Desa Bumi Jaya Kec. Kaubun	Kutai Timur	25
4.	Urip Tani	Kampung Linggang Jelemuq Kec. Tering	Kutai Barat	10
5.	Teluk Subur	Kampung Tering Lama Kec. Tering	Kutai Barat	15
6.	Maju Bersama	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau	24
7.	Rantau Jaya	Desa Melati Jaya Kec. Gunung Tabur	Berau	16
8.	Tunas Baru	Bayur Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda	11
9.	Karya Usaha	Berambai Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara	Samarinda	4

2) Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha

Kegiatan perluasan areal karet tercapai 150 Ha atau 100% dari target 150 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha, Kabupaten Kutai Barat 105 Ha, dan Kota Samarinda 15 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini

adalah sebagai berikut:

Tabel II.16. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Karet Seluas 150 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Karet			<u>150</u>
1.	Alam Subur	Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu	Kutai Kartanegara	30
2.	Marimun Lestari	Kamp. Linggang Marimun Kec. Mook Manar Bulan	Kutai Barat	25
3.	Berkat Usaha I	Kampung Sekolaq Mulaq Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	30
4.	Karya Warga	Kamp. Linggang Muyub Ilir Kec. Tering	Kutai Barat	20
5.	Abadi	Kamp. Muara Benagaq Kec. Melak	Kutai Barat	30
6.	Ubaq Mula	Kel. Pampang Kec. Samarinda Utara	Samarinda	15

3) Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa tercapai 50 Ha atau 100% dari target 50 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 30 Ha dan Kabupaten Kutai Barat seluas 20 Ha dengan kelompok tani penerima sebagai berikut:

Tabel II.17. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Seluas 50 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kelapa			<u>50</u>
1.	Padat Karya	Desa Kutai Lama Kec. Anggana	Kutai Kartanegara	30
2.	Radak Sangokng	Kamp. Muara Tai Kec. Jempang	Kutai Barat	20

4) Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha

Kegiatan perluasan areal kelapa sawit tercapai 70 Ha atau 100% dari target 70 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kutai Kartanegara seluas 40 Ha dan Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 30 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.18. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Kelapa Sawit Seluas 70 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Kelapa Sawit			<u>70</u>
1.	Sawit Makmur	Desa Santan Ilir Kec. MarangKayu	Kutai Kartanegara	20
2.	Anugrah Bersama	Desa Suka Damai Kec. Muara Badak	Kutai Kartanegara	20
3.	Nikai Mandiri	Kelurahan Sepan, Kec Penajam	Penajam Paser Utara	30

5) Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal lada tercapai seluas 100 Ha dari target 100 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat seluas 100 Ha, dengan kelompok tani penerima kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.19. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Lada Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Lada			<u>100</u>
1.	Usaha Bersama	Kamp. Linggang Menceleo Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat	10
2.	Mulia Abadi	Kamp. Tutung Kec. Linggang Bigung	Kutai Barat	25
3.	Subur Makmur	Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	15
4.	Tora Lestari	Kamp. Muara Mujan Kec. Tering	Kutai Barat	15
5.	Wijaya Kusuma	Kamp. Benung Kec. Damai	Kutai Barat	10
6.	Harapan Baru	Kamp. Pepas Ehang Kec. Barong	Kutai Barat	16
7.	Sinar Harapan V	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	Kutai Barat	5
8.	KWT Bawe Ipu	Kamp. Damai Seberang Kec. Damai Seberang	Kutai Barat	4

6) Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal pala tercapai 100 Ha atau 100% dari target 100 Ha, Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Berau seluas 100 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel II.20. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Pala Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Pala			<u>100</u>
1.	Sarunai	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau	15
2.	Mayang Padi	Kamp. Batu-Batu Kec. Gunung Tabur	Berau	18
3.	Sinar Mulya	Ds. Teluk Sumbang Kec. Biduk-Biduk	Berau	67

7) Perluasan Areal Aren Seluas 100 Ha

Kegiatan perluasan areal aren tercapai 100 Ha atau 100% dari target 100 Ha. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Kutai Barat seluas 100 Ha. Kelompok tani penerima kegiatan ini adalah :

Tabel II.21. Daftar Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Areal Aren Seluas 100 Ha

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
	Aren			<u>100</u>
1.	Sumber Rejeki	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
2.	Suka Maju II	Kamp. Gemuruh Kec. Mook Manar	Kutai Barat	20

No.	Kelompok Tani	Alamat Desa/Kel	Kabupaten	Luas (Ha)
		Bulant		
3.	Sejati	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
4.	Alam Lestari	Kamp. Sakalotoq Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20
5.	Aren Lestari	Kamp. Gadur Kec. Mook Manar Bulant	Kutai Barat	20

Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan perluasan komoditas perkebunan adalah masih kurangnya minat petani terhadap komoditas perkebunan selain sawit khususnya untuk komoditi Pala dan Aren, sehingga dalam pelaksanaannya sering mengalami keterlambatan dalam proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL).

Tindak lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut di atas, selaku pelaksana kegiatan sudah melakukan sosialisasi kepada Kelompok Tani terhadap komoditas yang dianggap baru oleh masyarakat dalam hal ini diberikan informasi terkait budidaya tanaman, pasca panen sampai pada pengolahan dan manfaat komoditi tersebut.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.041.859.335,- dari pagu Rp. 2.085.877.500,- dengan capaian kinerja keuangan 97,89%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan

Bidang Usaha realisasi keuangan sebesar Rp. 1.181.406.320,- atau 98,81% dari pagu dana Rp. 1.195.590.000,-. Output program ini adalah Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 7,92 Juta Ton CO₂eq atau 194,74% dari target 4,067 Juta Ton CO₂eq. Faktor yang mendorong tingginya capaian program tersebut antara lain:

1. Regulasi terkait pengelolaan ANKT Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi di Area Perkebunan;
2. Regulasi terkait kelapa sawit berkelanjutan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2022 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, bahwa pelaku usaha/perusahaan wajib ISPO;
3. Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha/perusahaan dalam melindungi dan mengelola ANKT ; dan
4. Adanya program FCPF-CF di Kalimantan Timur.

Program ini di dukung oleh Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan output kegiatan:

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dengan capaian kinerja 172,59 % atau dengan capaian 233 pelaku usaha dari 135 pelaku usaha yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel II.22. Pelaku Usaha yang Melakukan Aksi Mitigasi GRK

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
1.	PT. Agrindo Sukses Sejahtera	Berau
2.	PT. Anugrah Agung Prima Abadi	Berau
3.	PT. Berau Karitindo Lestari	Berau
4.	PT. Berau Sawit Sejahtera	Berau
5.	PT. Buana Mudantara	Berau
6.	PT. Dwiwira Lestari Jaya	Berau
7.	PT. General Aura Semari	Berau
8.	PT. Global Primata Mandiri	Berau
9.	PT. Gunta Samba Jaya	Berau
10.	PT. Hutan Hijau Mas	Berau
11.	PT. Inti Energi Kaltim	Berau
12.	PT. Jabontara Eka Karsa	Berau
13.	PT. Kukar Commodities Worldwide	Berau
14.	PT. Malindo Mas Perkebunan	Berau
15.	PT. Mulia Inti Perkasa	Berau
16.	PT. Natura Pasific Nusantara	Berau
17.	PT. Sanggam Harapan Sejahtera	Berau
18.	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Berau

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
19.	PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation	Berau
20.	PT. Tunas Alam Nusantara	Berau
21.	PT. Yudha Wahana Abadi	Berau
22.	PT.Gunta Samba (Elang Estate)	Kutai Timur
23.	PT. MPI (Nuaring/Muara Bulan Estate)	Kutai Timur
24.	PT. Wahana Tri Tunggal Cemerlang	Kutai Timur
25.	PT. Wira Inova Nusantara (SSE,SPE,SSF)	Kutai Timur
26.	PT. Gunta Samba Jaya (Miau Baru Estate I, II)	Kutai Timur
27.	PT. Citra Palma Sejati (Eks. Comexindo Int)	Kutai Timur
28.	PT. Sawitindo Plantation	Kutai Timur
29.	PT.Long Bagun prima Sawit I, II	Kutai Timur
30.	PT. Lintas Khatulistiwa Utama	Kutai Timur
31.	PT. Tapan Nadenggan (Unit PMSE)	Kutai Timur
32.	PT. Kresna Duta Agroindo (Unit GKMA/MWHE)	Kutai Timur
33.	PT. Swakarsa Sinar Sentosa (SWA)	Kutai Timur
34.	PT. Dharma Setya Nusantara Tbk (PKS2) (PKS3) (PKS4) (DSN)	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
35.	PT. Dharma Agrotama Nusantara (DAN)	Kutai Timur
36.	PT. Dharma Intisawit Nugraha (DIN)	Kutai Timur
37.	PT. Dewata Sawit Nusantara (DWT)	Kutai Timur
38.	PT. Karya Prima Agro Sejahtera I (KPS I) & II (KPS II)	Kutai Timur
39.	PT. Bima Palma Nugraha (BPN)	Kutai Timur
40.	PT. Bima Agri Sawit (BAS)	Kutai Timur
41.	PT. Karyanusa Eka Daya I	Kutai Timur
42.	PT. Subur Abadi Plantation	Kutai Timur
43.	PT. Sumber Kharisma Persada	Kutai Timur
44.	PT. Cipta Narada Lestari	Kutai Timur
45.	PT. Anugerah Energitama (TLSE I)	Kutai Timur
46.	PT. Nusaraya Agrosawit	Kutai Timur
47.	PT. Nusantara Agro Sentosa II,III	Kutai Timur
48.	PT. Cipta Hijau Bumi Etam	Kutai Timur
49.	PT. Dinamika Prima Artha I (Sei. Benderang Estate, Ds. Tepian Langsung, Kec. Bengalon (Eks. Minanga Ogan tahun 2018)	Kutai Timur
50.	PT. Hanusentra Agro Lestari (Kelolokan Estate)	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
51.	PT.Sinar bumi jaya	Kutai Timur
52.	PT. Telen (Pengadan Baay / Sei Karangan), (Desa Pengadan Baay Estate 1),(Sei Karangan Estate),(Bukit Permata Estate), (Layang-layang Estate), (Karangan Estate)	Kutai Timur
53.	PT. Sawit Prima Nusantara (Mata Air Estate),(Bumi Etam Estate)	Kutai Timur
54.	PT. Telen Prima Sawit (Ma. Bengkal Estate)(Benua Baru Estate)	Kutai Timur
55.	PT. Gemilang Sejahtera Abadi II, Abadi I (LM estate) Abadi III (LM Estate)	Kutai Timur
56.	PT. Sawit Sukses Sejahtera I dan II	Kutai Timur
57.	PT. Palma Cipta Selaras	Kutai Timur
58.	PT. Sinergi Agro Industri Est. PT. Multi Mandiri Perdana (MMP)	Kutai Timur
59.	PT. Indonesia Plantation Synergy	Kutai Timur
60.	PT. Karya Bakti Sejahtera Agrotama I,II	Kutai Timur
61.	PT. Etam Bersama Lestari	Kutai Timur
62.	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Kutai Timur
63.	PT. Subur Abadi Wana Agung	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
64.	PT. Kutai Agro Mandiri (eks. Group Minanga Ogan)	Kutai Timur
65.	PT. Cipta Davia Mandiri	Kutai Timur
66.	PT. Kutai Mitra Sejahtera I , II	Kutai Timur
67.	PT. Kartanegara Kumalasakti	Kutai Timur
68.	PT. Nala Palma Cadudasa I,II,III	Kutai Timur
69.	PT. Sumber Alam Selaras	Kutai Timur
70.	PT. Berkat Surya Bumi	Kutai Timur
71.	PT. Sumber Bumi Serasi	Kutai Timur
72.	PT. Equalindo Makmur Alam Sejahtera(EMAS)	Kutai Timur
73.	PT. Agro Inti Mandiri(AIM) Ds. Marah Haloq Kec. Telen	Kutai Timur
74.	PT. Maryam Decorindo Persada	Kutai Timur
75.	PT. Tanjung Manis Arta Lestari	Kutai Timur
76.	PT Anugerah Alam Persada (Sawit)	Kutai Timur
77.	PT. Sangatta Sejahtera	Kutai Timur
78.	PT. Tri Ivestama	Kutai Timur
79.	PT. Kemilau Indah Nusantara	Kutai Timur
80.	PT. Nusa Indah Kalimantan Plantations	Kutai Timur
81.	PT. Kutai Balian Nauli	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
82.	PT. Tridaya Hutan Lestari II	Kutai Timur
83.	PT. Fairco Agro Mandiri	Kutai Timur
84.	PT. Sima Agung Prima Sawit	Kutai Timur
85.	PT. Andalas Wahana Sukses I,II	Kutai Timur
86.	PT. Kalimantan Agro Nusantara II	Kutai Timur
87.	PT. Umaq Tukung Mandiri Utama	Kutai Timur
88.	PT. Preya Sawit Makmur	Kutai Timur
89.	PT. Barito Makmur Lestari	Kutai Timur
90.	PT. Bina Karya Nusa Sejahtera	Kutai Timur
91.	PT. Bumi Mas Agro	Kutai Timur
92.	PT. Tapan Nadenggan (Unit JLYE/LBLE)	Kutai Timur
93.	PT. Tapan Nadenggan (Unit PMSE/LBLE)	Kutai Timur
94.	PT. Tapan Nadenggan (Unit LBLE)	Kutai Timur
95.	PT. Tapan Nadenggan (Unit BSRE)	Kutai Timur
96.	PT. Telen (Pengadan Baay / Sei Karangan), (Desa Pengadan Baay Estate 1),(Sei Karangan Estate),(Bukit Permata Estate), (Layang-layang Estate), (Karangan Estate)	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
97.	PT. Jaya Mandiri Sukses	Kutai Kartanegara
98.	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Kutai Kartanegara
99.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Kutai Kartanegara
100.	PT. Sasana Yudha Bhakti	Kutai Kartanegara
101.	PT. Rea Kaltim Plantations	Kutai Kartanegara
102.	PT. Tritunggal SentarBuana	Kutai Kartanegara
103.	PT. Teguh Jayaprima Abadi	Kutai Kartanegara
104.	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Kutai Kartanegara
105.	PT. Agri Eastborneo Kencana	Kutai Kartanegara
106.	PT. Agrojaya Tirta Kencana	Kutai Kartanegara
107.	PT. Alam Jaya Persada	Kutai Kartanegara
108.	PT. Perkebunan Kaltim Utama I	Kutai Kartanegara
109.	PT. Tunas Prima Sejahtera	Kutai Kartanegara
110.	PT. Sukses Bina Alam	Kutai Kartanegara

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
111.	PT. Niagamas Gemilang	Kutai Kartanegara
112.	PT. Sawit Kaltim Lestari	Kutai Kartanegara
113.	PT. Maju Kalimantan Hadapan	Kutai Kartanegara
114.	PT. Cahaya Anugerah Plantation	Kutai Kartanegara
115.	PT. Agro Bumi Kaltim	Kutai Kartanegara
116.	PT. Enggang Alam Sawita	Kutai Kartanegara
117.	PT. Hamparan Sentosa	Kutai Kartanegara
118.	PT. Manunggal Adi Jaya	Kutai Kartanegara
119.	PT sawit Prima Sakti	Kutai Kartanegara
120.	PT. Budiduta Agro Makmur	Kutai Kartanegara
121.	PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera	Kutai Kartanegara
122.	PT. Kutai Agro Jaya	Kutai Kartanegara
123.	PT. Kota Bangun Sawit Sejahtera	Kutai Kartanegara
124.	PT. Bahtera Bahagia	Kutai Kartanegara

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
125.	PT. Sawit Golden Prima	Kutai Kartanegara
126.	PT. Aneka Reksa International Corp	Kutai Barat
127.	PT. PP.London Sumatera, Tbk	Kutai Barat
128.	PT. Borneo Citra Persada Abadi	Kutai Barat
129.	PT. Borneo Citra Persada Jaya	Kutai Barat
130.	PT. Borneo Citra Persada Mandiri	Kutai Barat
131.	PT. Citra Palma Pertiwi	Kutai Barat
132.	PT. Kalimantan Agro Makmur	Kutai Barat
133.	PT. Fangiono Agro Plantation	Kutai Barat
134.	PT. Farinda Bersaudara	Kutai Barat
135.	PT. Kedap Sayaq Dua	Kutai Barat
136.	PT. Teguh Swakarsa Sejahtera	Kutai Barat
137.	PT. Ketapang Hijau Lestari 1	Kutai Barat
138.	PT. Ketapang Hijau Lestari 2	Kutai Barat
139.	PT. Muara Toyu Subur Lestari	Paser
140.	PT. Pucuk Jaya	Paser
141.	PT. Multi Makmur Mitra Alam	Paser
142.	PT. Agro Inti Kencanamas	Paser
143.	PT. Senabung Aneka Pratiwi	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
144.	PT. Pradiksi Gunatama	Paser
145.	PT. Multi Jayantara Abadi	Paser
146.	PT. Nusa Lestari	Paser
147.	PT. Borneo Indosubur	Paser
148.	PT. Saraswanti Sawit Makmur	Paser
149.	PT. Gawi Makmur Kalimantan	Paser
150.	PT. Borneo Indah Marjaya	Paser
151.	PT. Palma Plantasindo	Paser
152.	PT. Buana Wirasubur Sakti	Paser
153.	PT. Langgeng Muara Makmur	Paser
154.	PT. Sebatin	Paser
155.	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	Paser
156.	PT. Sinar Alam Niaga Raya	Paser
157.	PT. Bumi Mulia Makmur Lestari	Paser
158.	PT. Bumi Pasir Agrindo	Paser
159.	PT. Malindo Agro Plantations	Paser
160.	PT. Indo Karya Gema Sakti	Paser
161.	PT. Permata Exsperindo	Paser
162.	PT. Agro Inti Mandiri	Paser
163.	PT. Trimadu Murni Asri	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
164.	PT. Amalia Hani Sejahtera	Paser
165.	PT. Indo Kencana Agri	Paser
166.	PT. Sahabat Sawit Sejahtera	Paser
167.	PT. Pelita Niaga Makmur	Paser
168.	PT. Sukses Tani Nusasubur	Penajam Paser Utara
169.	PT. Waru Kaltim Plantation	Penajam Paser Utara
170.	PT. Kebun Mandiri Sejahtera	Penajam Paser Utara
171.	PT. Borneo Bhakti Sejahtera	Mahakam Ulu
172.	PT. Marsam Citra Adiperkasa I	Mahakam Ulu
173.	PT. Setia Agro Utama	Mahakam Ulu
174.	PT. Citra Palma Pertiwi	Mahakam Ulu
175.	PT. Setia Agro Abadi	Mahakam Ulu
176.	PT. Putra Utama Lestari	Mahakam Ulu
177.	KTPA Merapun	Berau
178.	KTPA Lesan	Berau
179.	KTPA Kampung Merabu	Berau
180.	KTPA Kampung Merabu	Berau
181.	KTPA Jempang	Kutai Barat
182.	KTPA Bongan	Kutai Timur

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
183.	KTPA Kampung Muara Nayan	Kutai Timur
184.	KTPA Tanjung Labu	Kutai Timur
185.	KTPA Desa Tepian Baru	Kutai Timur
186.	KTPA Desa Pelawan	Kutai Timur
187.	KTPA Tepian Terap	Kutai Timur
188.	KTPA Desa Muara Wahau	Kutai Timur
189.	KTPA Desa Benhes	Kutai Timur
190.	KTPA Desa Diaklay	Kutai Timur
191.	KTPA Desa Nehes Liah Bing	Kutai Timur
192.	KTPA Desa Dabeq	Kutai Timur
193.	KTPA Desa Miau Baru	Kutai Timur
194.	KTPA Sepaku	Penajam Paser Utara
195.	KTPA Tani Sejahtera	Penajam Paser Utara
196.	KTPA Labangka	Penajam Paser Utara
197.	Desa Gunung Intan Babulu	Penajam Paser Utara
198.	KTPA Muara Toyu	Paser
199.	KTPA Laburan	Paser
200.	KTPA Lori	Paser
201.	KTPA Sunge Batu	Paser

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
202.	KTPA Sungai Langir	Paser
203.	KTPA Perepat	Paser
204.	Desa Paser Balengkong	Paser
205.	KTPA Desa Padang Jaya	Paser
206.	KTPA Sanga sanga	Kutai Kartanegara
207.	KTPA Anggana	Kutai Kartanegara
208.	KTPA Desa Handil	Kutai Kartanegara
209.	KTPA.Desa Perangat Baru	Kutai Kartanegara
210.	KTPA Prangat Baru	Kutai Kartanegara
211.	KTPA Benua Puhun	Kutai Kartanegara
212.	KTPA Bukit Jering	Kutai Kartanegara
213.	KTPA Bunga Jadi	Kutai Kartanegara
214.	KTPA Lebaho Ulaq	Kutai Kartanegara
215.	KTPA Lebak Mantan	Kutai Kartanegara
216.	KTPA Loleng	Kutai Kartanegara
217.	KTPA Muara Kaman Ilir	Kutai

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
		Kartanegara
218.	KTPA Rantau Hempang	Kutai Kartanegara
219.	KTPA Taruna Muda	Samarinda
220.	KTPA Nyi'an Kasa	Samarinda
221.	KTPA Tunas Harapan	Balikpapan
222.	KTPA Bina Tani Sejahtera Mandiri	Balikpapan
223.	PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan	Kutai Timur
224.	PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan	Kutai Timur
225.	PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri	Kutai Kartanegara
226.	PT Suan, PT TSB dengan Koperasi Mekar Sejahtera	Kutai Kartanegara
227.	PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu	Kutai Kartanegara
228.	PT. Jaya Mandiri Sukses dengan PT. Surya Cipta Mahakam	Kutai Kartanegara
229.	PT. Alam Jaya Persada, PT. Singlurus Pratama dengan Kelompok Tani Bangkit Bersama	Kutai Kartanegara
230.	PT. Agro Bumi Kaltim dengan Koperasi Dayang Kencana	Kutai Kartanegara

No.	Pelaku Usaha	Kab/Kota
	Lestari	
231.	PT Putra Bongan Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara Kedang	Kutai Barat
232.	PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio	Penajam Paser Utara
233.	PT. Waru Kaltim Plantation dengan Kelompok Tani Paser Bersama	Penajam Paser Utara

- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan yang dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten dengan realisasi 11 pelaku usaha atau 220% dari 5 pelaku usaha yang menjadi target. Pelaku usaha tersebut antara lain:
 1. PT Gunta Samba dengan Kop. Dharma Mulia Abadi di Kabupaten Kutai Timur;
 2. PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan di Kabupaten Kutai Timur;
 3. PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. PT Suan, PT TSB dengan Koperasi Mekar Sejahtera di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 6. PT. Jaya Mandiri Sukses dengan PT. Surya Cipta Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 7. PT. Alam Jaya Persada, PT. Singlurus Pratama dengan Kelompok Tani Bangkit Bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. PT. Agro Bumi Kaltim dengan Koperasi Dayang Kencana Lestari di Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. PT Putra Bongan Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara Kedang di Kutai Barat;
10. PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio di Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
11. PT. Waru Kaltim Plantation dengan Kelompok Tani Paser Bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kegiatan di atas terdiri dari 2 sub kegiatan, yakni:

1. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pagu Rp. 740.930.000,- terealisasi sebesar Rp. 728.978.770,- (98,39%). Target kinerja pada sub kegiatan ini yaitu:
 - a) Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergy 1 PMS dengan capaian 1 PMS (100%) yaitu PT. Teguh Jaya Prima Abadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan output gas CH₄. Dalam mendukung penanganan dampak perubahan iklim Dinas Perkebunan terus berupaya mendorong Perusahaan Besar Swasta untuk membangun perkebunan dengan melakukan penurunan emisi melalui sosialisasi dan koordinasi ke Perusahaan Besar Swasta yang ada.
 - b) Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi dengan capaian 120.371 ha atau 117,44% dari target 102.500 Ha. Data luas NKT di areal perkebunan yang dilindungi sebagai berikut:

Tabel III.23 Luas NKT di Areal Perkebunan yang Dilindungi Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Berau	13.852
2.	Kutai Barat	6.535

Peduli API (KTPA) dipengaruhi oleh adanya sosialisasi ke Kabupaten/Kota tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (PLTM) serta mendorong Kabupaten/Kota untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan. Namun ke depan masih terdapat tantangan dalam pembinaan KTPA karena masih terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia KTPA yang tersedia. KTPA yang dibentuk dan dibina pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.24 KTPA yang Dibentuk dan Dibina Tahun 2022

No	Kab/Kota	Pembinaan KTPA	Pembentukan KTPA	Total
1	Kab. Berau	1 KTPA Merapun	1 KTPA Kampung Merabu	4
		2 KTPA Lesan		
		3 KTPA Kampung Merabu		
2	Kab. Kubar	4 KTPA Jempang		3
		5 KTPA Bongan		
		6 KTPA Kampung Muara Nayan		
3	Kab. Kutim	7 KTPA Tanjung Labu	2 KTPA Desa Muara Wahau	10
		8 KTPA Desa Tepian Baru	3 KTPA Desa Benhes	
		9 KTPA Desa Pelawan	4 KTPA Desa Diaklay	
		10 KTPA Tepian Terap	5 KTPA Desa Nehes Liah Bing	

No	Kab/Kota	Pembinaan KTPA	Pembentukan KTPA	Total
			6 KTPA Desa Dabeq	
			7 KTPA Desa Miau Baru	
4	Kab. PPU	11 KTPA Sepaku		4
		12 KTPA Tani Sejahtera		
		13 KTPA Labangka		
		14 Desa Gunung Intan Babulu		
5	Kab. Paser	15 KTPA Muara Toyu	8 KTPA Desa Padang Jaya	8
		16 KTPA Laburan		
		17 KTPA Lori		
		18 KTPA Sunge Batu		
		19 KTPA Sungai Langir		
		20 KTPA Perepat		
		21 Desa Paser Balengkong		
6	Kab. Kukar	22 KTPA Sanga sanga	9 KTPA Prangat Baru	13
		23 KTPA Anggana	1 KTPA Benua Puhun	
		24 KTPA Desa Handil	1 KTPA Bukit Jering	
		25 KTPA.Desa Perangat Baru	1 KTPA Bunga Jadi	
			1 KTPA Lebaho	

No	Kab/Kota	Pembinaan KTPA	Pembentukan KTPA	Total
			3 Ulaq	
			1 KTPA Lebak 4 Mantan	
			1 KTPA Loleng 5	
			1 KTPA Muara 6 Kaman Ilir	
			1 KTPA Rantau 7 Humpang	
7	Kota Samarinda	26 KTPA Taruna Muda		2
		27 KTPA Nyi'an Kasa		
8	Kota Balikpapan	28 KTPA Tunas Harapan	1 KTPA Bina Tani 8 Sejahtera Mandiri	2
Total		28	18	46

2. Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani terealisasi 7 konflik atau 140% dari target 5 konflik. Keberhasilan penanganan konflik didorong oleh antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada para pihak (Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten, para pihak yang berkonflik, OPD lingkup Provinsi dan Kabupaten serta Mitra Pembangunan Perkebunan);
2. Melaksanakan mediasi terhadap laporan-laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha;
3. Melaksanakan Identifikasi kasus-kasus konflik dengan langsung ke lapangan;
4. Tingginya keinginan dari para pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan guna mencapai kesepakatan;

5. Kesiapan Provinsi dan Kabupaten untuk memfasilitasi konflik;
6. Komitmen Provinsi dan Kabupaten dalam menyelesaikan konflik (pada Rapat Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan); dan
7. Dorongan dari mitra untuk membantu sebagai mediator (IMN).

Pelaksanaan penanganan konflik tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.25 Penanganan Konflik Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Permasalahan
1	Kutai Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Gunta Samba dengan Kop. Dharma Mulia Abadi 2. PT Sinergi Agro Industri dengan KSU Karya Bhakti Desa Marukangan 	<p>Lahan kemitraan yang tidak dipelihara oleh perusahaan</p> <p>Fasilitasi Permasalahan Kemitraan (Penghapusan bunga talangan dan pengurangan hutang dana talangan)</p>
2	Kutai Kartanegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT TPS dengan Mas. Desa Menamang Kiri 2. PT Suan, PT TSB dengan Koperasi Mekar Sejahtera 3. PT Rea Kaltim Dengan Asosiasi Koperasi Belayan Bersatu 	<p>Tuntutan Plasma, Tali Asih dan CSR</p> <p>Tuntutan terhadap harga TBS sesuai dengan harga ketetapan tim</p> <p>Pembukaan kembali kuota bulanan TBS, penutupan PKS, dan kesepakatan harga TBS</p>
3	Kutai Barat	PT Putra Bongon Jaya dengan Koperasi Sawit Jaya Muara	Hak Plasma

No.	Kabupaten	Para Pihak yang Berkonflik	Permasalahan
		Kedang	
4	Penajam Paser Utara	PT Sagita Agro Kencana dengan Koperasi Mitra Mandiri Mangkulio	Kurangnya pemeliharaan kebun plasma oleh perusahaan

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 860.453.015,- atau 96,65% dari pagu sebesar Rp. 890.287.500,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 889.438.167,- atau 97,03% dari target Rp. 916.648.000,-. Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 195 Ha atau 100% dari target 195 Ha. Data luas serangan berat OPT pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.26 Luas Serangan Berat OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
1	Balikpapan	49 Ha
2	Samarinda	1 Ha
3	Bontang	1 Ha
4	Kutai Kartanegara	48 Ha
5	Kutai Barat	15 Ha
6	Kutai Timur	0 Ha

No.	Kabupaten / Kota	Serangan Berat
7	Mahulu	8 Ha
8	Paser	16 Ha
9	Penajam Paser Utara	18 Ha
10	Berau	39 Ha
	Total	195 Ha

Sedangkan sub kegiatan yang mendukung yaitu Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan indikator antara lain:

- Jenis APH yang dikembangkan dengan target 2 jenis dan realisasi 2 jenis (100%). Jenis APH yang dikembangkan tersebut yaitu pestisida nabati miceslla dan pestisida nabati asap cair.
- Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter) dengan target 600 liter dan realisasi 600 liter (100%).
- Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga) dengan target 2 lembaga dan realiasi 2 lembaga (100%). Lembaga tersebut yaitu Regu Pengendali OPT (RPO) dan Brigade Proteksi Tanaman (BPT) di Kabupaten Paser.
- Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha) dengan target 195 Ha dan realisasi 270,5 Ha (138,72%). Pelaksanaan pengendalian serangan OPT pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.27 Luas Pengendalian Serangan OPT di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)
1	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	3,258.00
2	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Pestalotiopsis</i> sp.)	3,258.00
3	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	12.50
4	Lada	Penyakit kuning/Nematoda (<i>Radopholus similis</i> , <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> , dan <i>Pratylenchus</i> sp.)	12.50
5	Lada	Ganggang Pirang	12.50
6	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (<i>Ganoderma boninense</i>)	957.00
7	Kelapa Sawit	<i>Apogonia</i> sp.	957.00
8	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	957.00
9	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	957.00
10	Kelapa Sawit	Landak (<i>Histrix braciura</i>)	957.00
11	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	475.00
12	Lada	Jamur upas (<i>Upasia salmonicolor</i>)	475.00
13	Lada	Penghisap bunga lada (<i>Diconocoris hewetti</i>)	475.00
14	Lada	Penghisap buah lada (<i>Dasynus piperis</i>)	475.00
15	Kelapa	Kumbang janur (<i>Brontispa</i> sp.)	1,559.00
16	Kelapa	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	1,559.00
17	Kelapa Sawit	Busuk tandan marasmius (<i>Marasmius palmivorus</i>)	544.00
18	Kakao	Penggerek Buah Kakao/PBK (<i>Conopomorpha cramerella</i>)	739.00
19	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	80.00

No.	Jenis Komoditas	Jenis OPT	Luas Serangan (Ha)
20	Kelapa Sawit	Tikus (<i>Rattus rattus</i>)	1,332.00
21	Karet	Kering Alur Sadap	44,525.00
22	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	44,525.00
23	Kelapa	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	5.00
24	Kelapa Sawit	Ulat api (<i>Setora</i> sp./ <i>Parasa</i> sp./ <i>Darna catenatus</i> / <i>Thosea</i> sp./ <i>Hidari irava</i>)	49,451.00
25	Kelapa Sawit	Busuk pangkal batang (<i>Ganoderma boninense</i>)	49,451.00
26	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	49,451.00
27	Lada	Busuk pangkal batang (<i>Phytophthora capsici</i>)	1,344.00
28	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	16.00
29	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	10,404.00
30	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	587.00
31	Kakao	Tupai/bajing (<i>Callosciurus</i> sp.)	7.80
32	Kelapa	Tupai/bajing (<i>Callosciurus</i> sp.)	10.00
33	Kakao	Busuk Buah Kakao (<i>Phytophthora palmivora</i>)	25.00
34	Karet	Jamur Akar Putih/JAP (<i>Rigidoporus lignosus</i>)	25.00
35	Karet	Gugur Daun Karet (<i>Colletotrichum gloesporioides</i> sp.)	25.00
36	Karet	Jamur upas (<i>Upasia salmonicolor</i>)	25.00
37	Kelapa	Kera	847.00
38	Kelapa Sawit	Kumbang nyiur (<i>Oryctes rhinoceros</i>)	780.00
		Total	270,5

Faktor pendorong capaian program ini antara lain:

1. Sinergitas antar program dalam mencapai sasaran rencana strategi;
2. Optimalisasi kelembagaan dan instalasi perlindungan tanaman perkebunan; dan
3. Pengendalian OPT terpadu merupakan faktor penting dalam pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian program ini adalah:

1. Kurangnya optimalnya pengembangan biopestisida dan APH;
2. Kurangnya optimalnya tata kelola pelayanan teknis;
3. Kurangnya SDM perlindungan Tanaman; dan
4. Belum dikenalnya pengendalian OPT terpadu ramah lingkungan.

Tindaklanjut yang dilakukan antara lain:

1. Membangun kerjasama dan jaringan dalam pengembangan biopestisida dan APH;
2. Optimalisasi tata kelola pelayanan teknis;
3. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM perlindungan tanaman; dan
4. Diseminasi teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi sebesar Rp. 583.449.050,- atau 99,79% dari pagu sebesar Rp. 584.700.000,-. Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 36 perusahaan atau 102,86%. Perusahaan yang telah mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel II.28 Perusahaan yang Mendapat Sertifikasi Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten	Perusahaan
1	Prov. Kaltim	1. PT Gawi Makmur Kalimantan
2	Berau	1. PT Bina Karya Nuansa Sejahtera
3	Kutai Timur	1. PT Sawit Prima Nusantara
		2. PT Gemilang Sejahtera Abadi
		3. PT Nusa Indah Kalimantan
		4. PT Sumber Bumi Selaras
		5. PT Karya Prima Agro Sejahtera I
		6. PT Karya Prima Agro Sejahtera II
		7. PT Dharma Satya Nusantara (PKS 7)
		8. PT Swakarsa Sinarsentosa
		9. PT Dharma Agrotama Nusantara
		10. PT Dharma Satya Nusantara (PKS 6)
4	Kutai Barat	1. PT Farinda Bersaudara
		2. PT Harapan Rimba Raya
		3. PT Borneo Surya Mining
		4. PT Ketapang Hijau Lestari
		5. PT Maha Karya Bersama
5	Kutai Kartanegara	1. PT Rea Kaltim Plantations
		2. PT Enggang Alam Sawita
7	PPU	1. PT Waru Kaltim Plantation
		2. Sukses Tani Nusa Subur
		3. PT Kebun Mandiri Sejahtera
		4. PT Mega Hijau Bersama
8	Paser	1. PT Pradiksi Gunatama
		2. PT Senabangun Aneka Pertiwi

No	Kabupaten	Perusahaan
		3. PT Buana Wirasubur Sakti
		4. PT Borneo Indah Marjaya
		5. PT Palma Plantasido
		6. PT Muaratoyu Subur Lestari
		7. PT Harapan Sawit Sejahtera
		8. PT Saraswanti Sawit Makmur
		9. PT Agro Inti Kencana Mas
		10. PT Pucuk Jaya
		11. PT Perkebunan Nusantara XIII (Semuntai)
		12. PT Malindo Agro Plantations
		13. PT MULTI JAYANTARA ABADI
	Total	36

Realisasi program di atas melebihi target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan pelaku usaha Perkebunan;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan se Kalimantan Timur; dan
3. Sosialisasi kepada pelaku usaha tentang peraturan dan perundang-undangan di bidang perkebunan.

Faktor pendorong capaian kinerja program di atas antara lain:

1. Dinas perkebunan Provinsi melakukan upaya membantu Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan PUP;
2. Melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha; dan
3. Peraturan perundang-undangan terkait PUP (Permentan Nomor 7 Tahun 2009 dan Permentan Nomor 98 Tahun 2013).

Walaupun demikian masih terdapat faktor penghambat capaian kinerja tersebut yaitu kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di

Kabupaten dan dari 7 Kabupaten, 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum melakukan PUP karena tidak tersedianya anggaran dan SDM.

Tindak lanjut terhadap faktor penghambat di atas dilakukan hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program Perizinan Usaha Pertanian didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan. Capaian indikator tersebut yaitu 97 perusahaan atau 100% dari target 97 perusahaan, yang terdiri dari 62 pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tahun 2022 dan 35 pelaku usaha yang dimitrakan dari 2019-2021. Pelaku usaha yang dibina dan dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel II.29 Pelaku Usaha yang Dibina dan Dimitrakan Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
1.	Kutai Timur	1. PT Telen Prima Sawit 2. PT. Sima Agung Prima Sawit 3. PT Tridaya Hutan Lestari 4. PT Anugerah Lahan Kaltim 5. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq 6. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera 7. PT Multi Pasifik Internasional 8. PT Perkebunan Warga Rimba 9. PT Dewata Sawit Nusantara 10. PT Gunta Samba 11. PT Karya prima Agro Sejahtera 12. PT Shabantara Rawi Sentosa 13. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT Dewata Sawit Nusantara 14. KSU Harapan Baru Mitra Usaha PT Dharma Inti Sawit Nugraha 15. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq Mitra Usaha PT Swakarsa Sinar Sentosa 16. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera Mitra Usaha PT Dewata Sawit Nusantara 17. Koperasi Nusantara Udip Tiga Mitra Usaha PT Nusantara Agro Sentosa

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		<p>18.Koperasi Serba Usaha Putra Mitra Usaha PT Indonesia Plantation Synergi</p> <p>19.Koperasi Perkebunan Kongbeng Bersatu Mitra Usaha PT Kresna Duta Agroindo</p> <p>20.KSU Karya Mulia Etam Mitra Usaha PT Telen</p> <p>21.Koperasi Bumi Baay Persada Mitra Usaha PT Telen</p> <p>22.KSU Nyawatan Sawit Lestari (Sei Karangan Estate) Mitra Usaha PT Telen</p> <p>23.Kop Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>24.Koperasi Berkat Telen Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>25.Koperasi Rukmana Sari Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>26.KSU Bina Abadi Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>27.Koperasi Sumber Harum Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>28.KSU Etam Jaya Mandiri I Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>29.Koperasi Titian Bungur Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>30.KSU Rakyat Sejahtera Mitra usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>31.KSU Pasir Putih Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>32.KSU Karya Maju Bersama (KMB) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri</p> <p>33.Koperasi Pemuda Sasangka (Fairco II) Mitra Usaha PT Fairco Agro Mandiri</p> <p>34.Koperasi Lestari Jaya Mandiri Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>35.Koperasi Pasir Hijau Sejahtera Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>36.KSU Benua Baru Mitra Mitra Usaha PT Telen Prima Sawit</p> <p>37.PT Bumi Mas Agro dengan Koperasi Dugai Jaya Mandiri</p> <p>38.PT Kemilau Indah Nusantara dengan Koperasi Lembak Jaya Cemerlang</p> <p>39.PT Nusraya Agro Sawit dengan Koperasi Jasa Perkebunan Sawit Nusantara</p>
2.	Kutai Kartanegara	<p>40.PT Rea Kaltim</p> <p>41.PT Sawit Unggul Agro Niaga</p> <p>42.PT Tritunggal Sentral Buana</p> <p>43.PT Niaga Mas</p> <p>44.PT Maju Kalimantan Hadapan</p> <p>45.PT Budi Duta</p> <p>46.Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang Dua</p> <p>47.PT Agrieast Borneo Kencana</p>

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		48.PT Jaya Mandiri Sukses 49.PT Prima Mitra Jaya Mandiri 50.PT Teguh Jaya Prima Abadi 51.PT Maju Kalimantan Hadapan dengan Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak dengan pola kemitraan inti plasma
3.	Kutai Barat	52.PT Kaltim Hijau Makmur 53.PT Kutai Agro Lestari 54.PT Lembah Sawit Subur 55.Koperasi Sawit Prima 56.Koperasi Teaw Sawit Jaya 57.Koperasi Sibak Mandiri 58.Koperasi Trilapan 59.Koperasi Sempekat Sempawat Sawit Makmur 60.Koperasi Telaga Jaya 61.Koperasi Sawit Sembulan Sejahtera 62.PT Farinda Bersaudara 63.Koperasi Sawit Mahang Permai Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 64.Koperasi Tuah Haji Mitra Usaha PT London Sumatra Indonesia 65.Koperasi Sawit Mitra Bongan Raya Mitra Usaha PT. Farinda Bersaudara 66.Koperasi Sempekat Penawang Lendian Sejahtera Mitra Usaha PT Ketapang Agro Lestari 67.Koperasi Sawit Karya Bersama Lestari Jaya Mitra Usaha PT Kruing Lestari Jaya 68.Koperasi Sawit Sibak Mandiri Mitra Usaha PT Kutai Agro Lestari (CT Agro)
4.	Penajam Paser Utara	69.PT Waru Kaltim Plantation 70.PT Sagita Agro Kencana 71.Koperasi One Berkat Solidaritas Mitra Usaha PT. Sumber Bunga Sawit Lestari 72.Koperasi Sumber Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Kebun Mandiri Sejahtera 73.Koperasi Waru Sawit Nusantara Mitra Usaha PT. Waru Kaltim Plantations 74.PT Gawi Makmur Kalimantan dengan Koperasi Mitra Bersama Babulu
5.	Berau	75.PT Cahaya Agro Sawit 76.PT Tanjung Buyu Perkasa 77.Koperasi Muara Lesan Lestari 78.PT Satu Sembilan Delapan 79.PT Jabontara Eka Karsa 80.PT Hutan Hijau mas
6.	Paser	81.PT Indo Kencana Agri 82.PT Anugerah Abadi Multi Usaha 83.PT Buana Wirasubur Sakti

No.	Kabupaten	Pelaku Usaha
		84. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati (Kuaro) 85. PT Borneo Indah Marjaya 86. PT Multi Makmur Mitra Alam 87. PT Pucuk Jaya 88. PT Pradiksigua Tama 89. PT Senabangun Aneka Pertiwi 90. Koperasi Lengkuhan Jaya Mitra Usaha PT Pucuk Jaya 91. Koperasi Marinjan Himba Makmur Bolum Mitra Usaha PT Pucuk Jaya 92. PT Gawi Makmur Kalimantan Dgn Koperasi Sinar Harapan Jaya 93. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati Dengan Koperasi Lintas Benua Abadi 94. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Awabolum Desa Luan Kec Muara Samu 95. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Harapan Maju Desa Suweto Kec Muara Samu 96. KUD Tani Subur Dengan PT Buana Wirasubur Sakti
7.	Lintas Kabupaten	97. PT Gawi Makmur Kalimantan

Sub Kegiatan yang mendukung dalam kegiatan ini adalah Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan indikator :

1. Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan dengan target sebanyak 45 lembaga pekebun terealisasi sebanyak 45 lembaga pekebun (100%). Terdapat penambahan 10 lembaga pekebun yang dimitrakan dari tahun 2022. Lembaga pekebun yang dimitrakan tersebut antara lain:

Tabel II.30 Lembaga pekebun yang Dimitrakan Tahun 2022

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
1.	Paser	1. PT Gawi Makmur Kalimantan Dgn Koperasi Sinar Harapan Jaya 2. PT Cahaya Bintang Sawit Sejati Dengan Koperasi Lintas Benua Abadi 3. PT Anugerah Abadi Multi Usaha Dengan Koperasi Awabolum Desa Luan Kec Muara Samu 4. PT Anugerah Abadi Multi Usaha

No.	Kabupaten	Pihak Yang Dimitrakan
		Dengan Koperasi Harapan Maju Desa Suweto Kec Muara Samu 5. KUD Tani Subur Dengan PT Buana Wirasubur Sakti
2.	Penajam Paser Utara	6. Koperasi One Berkat Solidaritas PT Gawi Makmur Kalimantan Dengan Koperasi Mitra Bersama Babulu
3.	Kutai Kartanegara	7. PT Maju Kalimantan Hadapan dengan Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan Desa Puan Cepak dengan pola kemitraan inti plasma
4.	Kutai Timur	8. PT Bumi Mas Agro Dengan Koperasi Dugai Jaya Mandiri 9. PT Kemilau Indah Nusantara Dengan Koperasi Lembak Jaya Cemerlang 10. PT Nusraya Agro Sawit dengan Koperasi Jasa Perkebunan Sawit Nusantara

2. Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina dengan target 52 perusahaan dan realisasi 52 perusahaan (100%). Perusahaan yang dibina tersebut antara lain:

Tabel II.31 Perusahaan yang Dibina Tahun 2022

No.	Kabupaten	Perusahaan
1.	Kutai Timur	1. PT Telen Prima Sawit 2. PT. Sima Agung Prima Sawit 3. PT Tridaya Hutan Lestari 4. PT Anugerah Lahan Kaltim 5. Koperasi Jengea Bong Pet Kuq 6. Koperasi Sawit Wehea Tlan Sejahtera 7. PT Multi Pasifik Internasional 8. PT Perkebunan Warga Rimba 9. PT Dewata Sawit Nusantara 10. PT Gunta Samba 11. PT Karya prima Agro Sejahtera 12. PT Shabantara Rawi Sentosa
2.	Kutai Kartanegara	13. PT Rea Kaltim 14. PT Sawit Unggul Agro Niaga 15. PT Tritunggal Sentral Buana 16. PT Niaga Mas 17. PT Maju Kalimantan Hadapan 18. PT Budi Duta

No.	Kabupaten	Perusahaan
		19.Koperasi Bina Tani Sawit Sedulang Dua 20.PT Agrieast Borneo Kencana 21.PT Jaya Mandiri Sukses 22.PT Prima Mitra Jaya Mandiri 23.PT Teguh Jaya Prima Abadi
3.	Kutai Barat	24.PT Kaltim Hijau Makmur 25.PT Kutai Agro Lestari 26.PT Lembah Sawit Subur 27.Koperasi Sawit Prima 28.Koperasi Teaw Sawit Jaya 29.Koperasi Sibak Mandiri 30.Koperasi Trilapan 31.Koperasi Sempekot Sempawat Sawit Makmur 32.Koperasi Telaga Jaya 33.Koperasi Sawit Sembulan Sejahtera 34.PT Farinda Bersaudara
4.	Penajam Paser Utara	35.PT Waru Kaltim Plantation 36.PT Sagita Agro Kencana
5.	Berau	37.PT Cahaya Agro Sawit 38.PT Tanjung Buyu Perkasa 39.Koperasi Muara Lesan Lestari 40.PT Satu Sembilan Delapan 41.PT Jabontara Eka Karsa 42.PT Hutan Hijau mas
6.	Paser	43.PT Indo Kencana Agri 44.PT Anugerah Abadi Multi Usaha 45.PT Buana Wirasubur Sakti 46.PT Cahaya Bintang Sawit Sejati (Kuario) 47.PT Borneo Indah Marjaya 48.PT Multi Makmur Mitra Alam 49.PT Pucuk Jaya 50.PT Pradiksiguna Tama 51.PT Senabangun Aneka Pertiwi
7.	Lintas Kabupaten	52.PT Gawi Makmur Kalimantan

Capaian kegiatan maupun sub kegiatan di atas sesuai target yang ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten, pelaku usaha serta Mitra Pembangunan Perkebunan;
2. Sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat pekebun tentang peraturan dan perundang-undangan terkait kemitraan dan kewajiban perusahaan perkebunan;
3. Adanya keinginan pekebun swadaya untuk bermitra dengan PKS; dan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan se Kalimantan Timur.

6. Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar Rp. 2.131.689.820,- atau 98,51% dari pagu sebesar Rp. 2.163.897.000,-. Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%) yaitu UPPB Setia Kawan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Faktor pendorong dalam pencapaian program ini antara lain:

1. Dukungan kebijakan atas komoditas unggulan;
2. Adopsi teknologi yang ada di wilayah lain;
3. Respon masyarakat yang baik terhadap produk olahan pekebun;
4. Peningkatan kualitas dan harga produk olahan;
5. Meningkatnya kesadaran petani untuk memperbaiki kualitas produk oalahanya;
6. Dukungan Kabupaten/Kota untuk membina dan membentuk UPPB;
7. Dukungan Kabupaten/Kota dalam pemasaran;
8. Kebutuhan pasar terhadap jaminan mutu/kualitas produk yang dihasilkan;
9. terdapat peluang pasar; dan
10. Akses permodalan sudah tersedia.

Meskipun capaian program ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaiannya, yaitu antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Terbatasnya bahan baku;
3. Belum adanya jaminan harga komoditas perkebunan;
4. Kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi standar;
5. Masih banyak populasi pohon yang tidak produktif lagi;
6. Keterbatasan SDM petani;
7. Minimnya minat petani yang mau mengolah produk perkebunan menjadi bahan jadi maupun setengah jadi terbatasnya permodalan dalam penerapan teknologi;
8. Masih adanya tanaman yang sudah memasuki usia kurang produktif;
9. Kelembagaan petani belum memiliki business plan; dan
10. Pemahaman terkait korporasi petani yang sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2018 masih belum dikuasi oleh kelompok tani dan sebagian aparaturnya pemerintah.

Capaian program ini didukung oleh 3 kegiatan yaitu:

a) Pengembangan ketenagaan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator jumlah SDM petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 45 orang atau 100% dari target 45 orang. Petugas lapang dan teknis perkebunan yang dikembangkan kompetensinya tersebut antara lain:

Tabel II.32 Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kota Samarinda	5 Orang
2.	Kabupaten Kutai Kartanegara	20 Orang
3.	Kabupaten Kutai Timur	5 Orang
4.	Kabupaten Kutai Barat	2 Orang
5.	Kabupaten PPU	3 Orang
6.	Kabupaten Paser	2 Orang

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
7.	Kabupaten Berau	4 Orang
8.	Kabupaten Mahulu	2 Orang
9.	Kota Balikpapan	2 Orang
	Total	45 Orang

b) Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya dengan capaian 30 kelompok tani atau 100% dari target 30 kelompok tani.

Tabel II. 33 Kelompok Tani yang Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2022

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
1.	Tunas Baru	Kakao	Kota Samarinda
2.	Karya Usaha	Kakao	Kota Samarinda
3.	Ubag Mulia	Karet	Kota Samarinda
4.	Sawit Makmur	Kelapa Sawit	Kab. Kutai Kartanegara
5.	Anugrah Bersama	Kelapa Sawit	Kab. Kutai Kartanegara
6.	Alam Subur	Karet	Kab. Kutai Kartanegara
7.	KWT. Sumber Sari Rejeki	Kakao	Kab. Kutai Kartanegara
8.	Padat Karya	Kelapa	Kab. Kutai Kartanegara
9.	Berkat Usaha I	Karet	Kab. Kutai Barat
10.	Karya Warga	Karet	Kab. Kutai Barat
11.	Tora Lestari	Lada	Kab. Kutai Barat
12.	Urip Tani	Kakao	Kab. Kutai Barat
13.	Teluk Subur	Kakao	Kab. Kutai Barat

No.	Kelompok Tani	Komoditi	Lokasi
14.	Abadi	Karet	Kab. Kutai Barat
15.	Subur Makmur	Lada	Kab. Kutai Barat
16.	Sinar Harapan V	Lada	Kab. Kutai Barat
17.	Wijaya Kusuma	Lada	Kab. Kutai Barat
18.	Kwt Bawe Ipu	Lada	Kab. Kutai Barat
19.	Harapan Baru	Lada	Kab. Kutai Barat
20.	Mulia Abadi	Lada	Kab. Kutai Barat
21.	Usaha Bersama	Lada	Kab. Kutai Barat
22.	Radak Sangokng	Kelapa	Kab. Kutai Barat
23.	Usaha Bersama	Kakao	Kab. Kutai Timur
24.	Harapan Jaya	Kakao	Kab. Kutai Timur
25.	Nikai Mandiri	Kelapa Sawit	Kab. Penajam Paser Utara
26.	Maju Bersama	Kakao	Kab. Berau
27.	Rantau Jaya	Kakao	Kab. Berau
28.	Sarunai	Pala	Kab. Berau
29.	Mayang Padi	Pala	Kab. Berau
30.	Sinar Mulya	Pala	Kab. Berau

2. Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan dengan capaian 1 unit atau 100% dari target 1 unit, yaitu teknologi diverfisikasi komoditi kelapa berupa sirup gula kelapa cair organik, mengadopsi dari Provinsi Jawa Tengah, bahan baku nira kelapa diolah menjadi nektar.
3. Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan dengan capaian 7 unit atau 140% dari target 5

unit. Komoditas unggulan yang siap dipromosikan tersebut antara lain:

1. Lada;
2. Kelapa;
3. Kakao;
4. Kopyor;
5. Aren;
6. Kopi; dan
7. Kelapa Sawit.

c) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

Kegiatan ini memiliki indikator yaitu:

1. Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dengan capaian 21 lembaga atau 105% dari target 20 lembaga. Lembaga ekonomi pekebun tersebut antara lain:

Tabel II.34 Lembaga Ekonomi Pekebun Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Lembaga
2.	Kabupaten Kutai Timur	3 Lembaga
3.	Kabupaten Kutai Barat	16 Lembaga
	Total	21 Lembaga

2. Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI dengan capaian 6 kelompok tani atau 150% dari target 4 kelompok tani. Kelompok tani tersebut antara lain:

1. KT Harapan Baru Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur;
2. Gapoktan Samba Desa Sambera Baru Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. UPPB Etam Jaya Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;

4. Kelompok Tani Karya Terpadu Desa Peridan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Kertanegara;
5. MPIG kakao Berau Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau; dan
6. MPIG lada malonan Kabupaten Kutai Kertanegara Desa Sallo Bandang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara.

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:

1. Adanya peluang pasar;
2. Tersedianya akses permodalan;
3. Program pelatihan dan bimtek dari pemerintah daerah cukup banyak terkait diversifikasi dan pemasaran produk;
4. Adanya fasilitasi kemitraan dengan retail besar dan industri perhotelan oleh Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
5. Adanya dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM dalam melindungi Indikasi Geografis terhadap Produk Perkebunan;
6. Adanya dukungan Pemerintah terhadap izin edar baik di keluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota tentang PIRT, Halal oleh Majelis Ulama Indonesia, Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
7. Dukungan Laboratorium yang berstandar SNI;
8. Pendampingan pemerintah terkait pengolahan pasca panen yang baik dan perluasan jaringan pemasaran; dan
9. Bantuan Peralatan pasca Panen baik dari APBD Provinsi, APBD Kab dan APBN.

Namun demikian masih terdapat faktor penghambat dalam pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan di atas antara lain:

1. Diperlukan data kelompok tani perkebunan baik yang aktif maupun non aktif (kelas kelompok tani) yang diperlukan

untuk dapat dilakukan penguatan kelembagaan berdasarkan kebutuhan, karena data kelompok tani selama ini yang didapat/ diperoleh dari data kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan usulan dari Kabupaten / Kota Kalimantan Timur

2. Petani/pelaku usaha yang berminat untuk melakukan diversifikasi produk turunan realtif masih kecil;
3. Proses pengolahan produk yang membuat pendapatan diterima lebih lama jika dibandingkan dengan menjual produk secara langsung tanpa diolah;
4. SDM petani yang terbatas untuk melakukan diversifikasi dan pengolahan produk;
5. Produk olahan yang ada banyak yang belum tersertifikasi untuk masuk pasar modern/skala besar;
6. Sebagian besar peralatan pengolahan masih tradisional;
7. Sebagian besar petani dalam pengolahan menggunakan metode secara turun temurun;
8. Perbedaan Lokasi tanaman antara yang di daerah Rawa dan didaerah ^[1]_{SEP}perbukitan; dan
9. Perbedaan dalam penganganan pasca panen oleh petani.

Program dan kegiatan di atas didukung oleh 7 sub kegiatan yaitu:

- a) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN dengan target kinerja pada sub kegiatan ini adalah jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dan capaian kinerjanya sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 2 kegiatan (100%), yaitu:
 1. Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping Kabupaten Kota (Teknis Budidaya Lada dan Kakao) dengan jumlah peserta 28 Orang.
 2. Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Manusia Bagi Petugas Pendamping Perkebunan Kabupaten /Kota (Fasilitator Daerah

- l) pada Kabupaten Kutai Kertanegara dengan jumlah peserta 20 Orang.
- b) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan target kinerja sebagai berikut:
1. Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk) dengan capaian sebanyak 5 produk atau 100% dari target sebanyak 5 produk yaitu:
 - a. Minuman coklat 3in1;
 - b. Minuman coklat;
 - c. Gula batok dari nira kelapa;
 - d. Sirup gula kelapa cair organik; dan
 - e. Gula merah kristal/palm sugar.
 2. Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk) dengan realisasi 20 Produk atau 222,22%. Produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan tersebut antara lain:
 1. Lada Jahe instan;
 2. Kopi Jahe Lada Instan;
 3. VCO;
 4. Gula Aren Bubuk;
 5. Gula Aren Batok;
 6. Lada Biji Malonan;
 7. Lada Bubuk Malonan;
 8. Lada putih bubuk;
 9. Lada hitam bubuk;
 10. Gula Kelapa Semut;
 11. Coklat Batang;
 12. Kopyor Gelas;
 13. Minyak Kelapa;
 14. Kakao Bubuk;
 15. Kopi Pasak Bumi Gula Aren;
 16. Gula Semut Stik;
 17. Ketumbar;

18. Minyak Kelapa;
 19. kopi Bubuk; dan
 20. Cocopeat.
- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 20 pertemuan atau 100% dari target 20 pertemuan. Pertemuan tersebut antara lain:

Tabel II.35 Kegiatan Penyuluhan dan pemberdayaan Petani
Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan
1.	Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Pertemuan
2.	Kabupaten Kutai Barat	8 Pertemuan
3.	Kabupaten Kutai Timur	2 Pertemuan
4.	Kabupaten PPU	1 Pertemuan
5.	Kabupaten Berau	3 Pertemuan
5.	Kota Samarinda	1 Pertemuan
	Total	20 Pertemuan

- d) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk. Kinerja sub kegiatan ini tercapai 28 lembaga atau 100% dari target 28 lembaga. Terdapat penambahan 4 lembaga dari capaian tahun 2021 sebanyak 24 lembaga. Penambahan 4 lembaga tersebut yaitu:
1. Kelompok Tani Sido Rukun di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan komoditi karet;
 2. Kelompok Tani Harapan Baru Kabupaten Kutai Barat dengan komoditi karet;
 3. UPPB Setia Kawan di Kabupaten penajam Paser Utara dengan komoditi kelapa sawit dan karet; dan

4. Kelompok Tani Sungai Asam di Kabupaten Kutai Timur dengan komoditi kelapa sawit, karet dan kakao.
- e) Pendampingan Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu:
1. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina dengan capaian sebanyak sebanyak 5 unit atau 100% dari target 5 unit. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina antara lain:
 - a. Yang Dibentuk: 1). UPPB Setia Kawan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan 2). UPPB Bina Maju Bersama di Kota Balikpapan; dan
 - b. Yang dibina: 1). MPIG kakao Berau di Kabupaten Berau 2). MPIG Lada malonan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dan 3). UPPB Sido Rukun Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya dengan capaian 15 pelaku usaha atau 300% dari target 5 pelaku usaha. 15 pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya, antara lain:
 - 1) Poktan Aren Belayan, Pak Tommy, produk olahan gula aren dengan merek GULEKU;
 - 2) PT. Bhakti Borneo Abadi, Bu Adhela Ghina, produk olahan gula aren dengan merek ARENEO;
 - 3) Poktan Nyiur Melambai, Bu Sumirah, produk olahan gula aren dengan merek ZALIKA & ARENKA;
 - 4) Poktan Maju Bersama, Bu Nurmiyati, produk olahan gula aren dengan merek SHUGA;
 - 5) Poktan Buen Were, Pak Arbani, produk olahan gula aren dengan merek CAP PEMUDA;
 - 6) Koperasi Borneo Agro Industri, Pak Suwandi, produk olahan kakao dengan merek BORCO;

- 7) Koperasi Berau Kakao Sejahtera, Pak Syahran, produk olahan kakao dengan merek BERAU COCOA;
 - 8) KWT Bunga Lestari, Bu Ramlah, produk olahan kelapa dengan merek TANJUNG;
 - 9) Poktan Karya Dharma, Bu Yatira, produk olahan kelapa dengan merek PONDO KESSI;
 - 10) Kelompok Kreatif, Pak Nursalim, produk olahan kelapa dengan merek Gula Kelapa PPU dan Kulukutta;
 - 11) Bu Rini Setiani, produk olahan kelapa dengan merek COCOPEAT PUNCAK;
 - 12) Poktan Trubus, Pak Rusly Hatibie, produk olahan lada dengan merek CIMOI;
 - 13) Pak Harry Gunawan, produk olahan lada dengan merek LADA VR;
 - 14) Pak Syamsuddin, produk olahan kelapa dengan merek MARUATO’;
 - 15) Pak Ari Bagus, produk olahan kelapa kopyor dengan merek KOPYORKU
- f) Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Korporasi Petani dengan target kinerja yaitu jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan untuk SNI. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 6 kali atau 100% dari target sebanyak 6 kali. Pengujian sampel produk hasil perkebunan tersebut antara lain:
1. Pengujian karet (kadar karet kering) sebanyak 3 kali, dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok Tani Harapan Baru di Kel. Lamaru Kec. Balikpapan Timur, Gapoktan Samba di Desa Sambera Baru Kec. Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara dan UPPB Etam Jaya di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur;
 2. Pengujian gula aren sebanyak 1 kali, dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok Tani Karya Terpadu di Desa Peridan Kec. Sangkulirang.

3. Pengujian biji lada sebanyak 1 kali dimana sampel tersebut berasal dari Kelompok tani Budi Rahayu di Desa Semoi Kec. Sepaku Kab PPU; dan
 4. Pengujian kakao sebanyak 1 kali dimana sampel tersebut berasal dari MPIG kakao Berau di Kampung Suaran Kec. Samabliung Kab. Berau.
- g) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani dengan target kinerja yaitu jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani. Kinerja sub kegiatan ini tercapai sebanyak 1 pertemuan atau 100% dari 1 pertemuan, yaitu pertemuan Pelatihan Sekolah Lapang Hama Terpadu (SL-PHT) komoditi Kakao yang diselenggarakan pada bulan Mei sampai dengan Agustus di kampung Teluk Semanting Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau.

Rata-rata pencapaian kinerja program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tercapai sesuai bahkan melebihi target yang sudah ditetapkan pada rencana kerja dan selama pelaksanaan program dan kegiatan tidak mengalami permasalahan yang signifikan.

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2022 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.36 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	20.493	17.388	84,85	Sumber: BPS (Angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022)
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	58	80	137,93	(Sumber: Dirjenbun Kementan RI)
3	NTP perkebunan rakyat	Persen	110	162,66	147,87	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2022)

Pada tahun 2022, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV pada tahun 2022 mencapai 17.388 Miliar Rupiah (84,85%) dari target 20.493 Miliar Rupiah.

Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan adalah penurunan produksi komoditi perkebunan yakni dari 17,36 Juta Ton menjadi 17,02 Juta Ton di

tahun 2022 (berdasarkan angka sementara tahun 2022) atau turun 340.711 Ton (-1,96%) dari tahun 2021. Terutama pada komoditi sawit yakni dari 17,27 juta ton TBS menjadi 16,94 juta ton TBS atau turun 339.097 ton TBS (-1,96%) dari tahun 2021.

Penurunan produksi komoditi perkebunan tersebut terjadi akibat kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk di tahun 2022 dan kurangnya kegiatan intensifikasi (pemupukan) semenjak pandemi covid-19 yang berimbas pada penurunan aktivitas pekebun. Selain itu penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa komoditi mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO) serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi komoditi perkebunan pada tahun 2022.

Namun demikian capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,21% dari target 5,2% atau 80,96% (Sumber BPS Kaltim angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022). Sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertanian dalam arti luas terus mengalami peningkatan dari 58,61 % di tahun 2021 menjadi 59,80% di tahun 2022 atau meningkat 2,03%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan meningkatkan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha;

2. Intensifikasi karet seluas 150 Ha;
3. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
4. Intensifikasi kakao seluas 150 Ha;
5. Peremajaan kakao seluas 50 Ha;
6. Intensifikasi lada seluas 150 ha;
7. Rehabilitasi lada seluas 50 Ha;
8. Perluasan kelapa sawit seluas 70 Ha;
9. Perluasan lada seluas 100 Ha;
10. Perluasan kelapa seluas 50 Ha;
11. Perluasan kakao seluas 150 Ha;
12. Perluasan karet seluas 150 Ha;
13. Perluasan pala seluas 100 Ha; dan
14. Perluasan aren seluas 100 Ha.

Selain itu juga melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya dan penanganan hama/penyakit.

Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2022.



*Data sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

** Data angka sangat sementara (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

*** Data angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022 (Sumber:BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar II.3 Nilai PDRB Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2022

Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.781 Ha atau 27,15% dari total IUP tahun 2022 seluas 2.364.017 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*) serta telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO". Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri. Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO tersebut antara lain:

Tabel II.37 Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2022

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
A.	Kabupaten Berau			
1	PT. Tanjung Buyu Perkasa Plantation	Desa Cepuak, Desa Biatan Lempake, Desa Tembudan, Kec. Talisayan & Kec. Biatan, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS TBP dan Kebun Taliyan 1,2 dan Biatan Estate	PT TUV Rheniland
2	PT. Malindomas Perkebunan	Desa Gunung Sari, Kec. Segah, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Sungai Melamah dan Kebun Sungai Atap	PT Mutuagung Lestari
3	PT. Jabontara Eka Karsa	Desa Sungai Raya, Kec. Batu Putih, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Jabon, Kebun Sungai Raya dan Kebun Sungai Jantui	PT Mutuagung Lestari
4	PT. Dwiwira Lestari Jaya	Desa Biatan Lempake, Kec. Biatan, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun DLJ	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
5	PT. Anugerah Agung Prima Abadi	Kampung Merapun, Kec. Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. Anugerah Agung Prima Abadi	PT Sucofindo
6	PT. Natura Pasific Nusantara	Desa Longayan, Punan Malinau, Tepian Buah Kab Berau, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. Natura Pasifik Nusantara	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
7	PT Hutan Hijau Mas	Kecamatan Gunung Tabur, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Berau 1 dan Kebun Sungai Segah dan Kebun Sungai Pura	PT Mutuagung Lestari
8	PT Gunta Samba Jaya	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Merapun, Merapun dan Mayong Estate.	PT Mutuagung Lestari
9	PT Satu Sembilan	Desa Tasuk, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau. Prov.	PKS dan Kebun 198	PT Mutuagung Lestari

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
	Delapan	Kalimantan Timur		
10	PT Yudha Wahana Abadi	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	PKS Merapun, kebun Merapun dan kebun Mayong.	PT Sucofindo
11	PT. Sentosa Kalimantan Jaya	Desa Merapun, Kecamatan Kelay, Kab. Berau, Prov. Kalimantan Timur	Derawan Oil Mill, Mutiara Estate	PT. BSI Grup Indonesia
12	PT. Berau Sawit Seahtera		PKS Sungai Letak, Sungai Letak 1, dan 2 Estate	PT Mutuagung Lestari
13	PT. Inti Energi Kaltim		Ampen Medang Estate	PT TUV Rheniland
B.	Kabupaten Kutai Kartanegara			
14	PT. Jaya Mandiri Sukses	Desa Prian Kec. Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur.	PKS Bangkirai, Kebun Bangkirai, Kebun Kulim, Kebun Angsana, Kebun Jatimas, dan Kebun Gaharu	PT Mutuagung Lestari
15	PT. Rea Kaltim Plantation	Desa Long Beleh, Desa Mual, Desa Perdana Pulo Pinang, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan PKS Cakra dan PKS Perdana	PT SGS Indonesia
16	PT. Prima Mitrajaya Mandiri	Desa Benua puhun Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun: Beringin Jaya, Lembuswana, Bumi Permai dan Prima Estate dan Pabrik Bumi Permai Palm Oil Mill	PT Mutuagung Lestari

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
17	PT. Sawit Kaltim Lestari	Desa Sabintulung dan Desa Muara Kaman Ulu, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan PKS Sawit Kaltim Lesta	PT SAI Global
18	PT Sasana Yudha Bhakti	PT. Sasana Yudha Bhakti (PKS Satria dan Kebun Satria, Tepian) berlokasi di Desa Buluq Sen, Gunung sari, Ritan Baru dan tukang Ritan Kecamatan Tabang Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	PKS Satria dan Kebun Satria, Tepian	PT SGS Indonesia
19	PT. Tritunggal Sentra Buana	Desa Saliki, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	PKS Salo Bandang dan Kebun Kutai utara, Kutai Selatan	PT Mutuagung Lestari
20	PT. Suryabumi Tunggal Perkasa	Desa Perian dan Muara Aloh, Kec. Muara Muntai, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Cendana Estate	PT Mutuagung Lestari
21	PT. Manunggal Adi Jaya	Desa Kahala, Tuana Tuha, Teluk Bingkai, Lamin Pulut, Lamin dan Telihan Kec. Kenohan, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Muara, Karang Agung, Hulu Merang, Mangsang dan PKS Muara Merang	PT Mutuagung Lestari
22	PT. Maju Kalimantan Hadapan (Ex. PT. Khaleda Agropima Malindo)	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Estate Maju Central, Estate Maju Selatan, Estate Maju Utara & PT MKH Palm Oil Mill	PT SGS Indonesia
23	PT. Hamparan Sentosa	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kab. Kutai	Estate Maou, Estate Feliza, Estate	PT Mutuagung Lestari

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
		Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur	Bendang	
24	PT. Sawit Prima Sakti		Kebun Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	PT. Global Inspeksi Sertiikasi
C.	Kabupaten Kutai Barat			
25	PT PP London Sumatera Indonesia	Desa Tanjung Isuy, Kec. Jempang & Bongan, Kab. Kutai Barat, Prov. Kalimantan Timur.	PKS Pahu Makmur, Kebun Pahu Makmur Estate, Isuy Makmur Estate, Kedang Makmur Estate	PT Mutuagung Lestari
26	PT. Farinda Bersaudara		Kebun Jambuk Estate, IPenawai Estate, Siram Estate PKS Farinda Bersaudara	PT Mutuagung Lestari
27	PT. Kruing Lestari Jaya		Kebun Sungai Basung, Sungai Perak, Sungai Pilos, Sungai Pikan Pabrik Sungai Perak	Bureau Veritas Certification
28	PT. Ketapang Agro Lestari		Kebun Siluq Ngurai Pabrik Siluq Ngurai	PT. BSI Grup Indonesia
29	PT. Citra Agung Kencana		PMKS Citra Agung Kencana Kebun Citra Agung Kencana	PT. BSI Grup Indonesia
30	PT. Rimba Rayatama Jaya		Kebun Sungai Pahu Estate	Bureau Veritas Certification

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
31	PT. Harapan Rimba Raya		PKS Sungai Kedang Mill, Kebun Kedang Pahu Estate, Sungai Kedang Estate, Sungai Tohan Estate	Bureau Veritas Certification
D.	Kabupaten Paser			
32	PT Borneo Indah Marjaya,	Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	PKS BIM dan Kebun Rayon 1, Kebun Rayon 2	PT Mutu Hijau Utama
33	PT. Muaratoyu Subur Lestari	Desa Muaratoyu, Desa Bente Tualan, Desa Munggu, Kec. Longkali, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	PKS MSL dan Kebun MSL	PT Sucofindo
34	PT Palma Plantasindo	Desa Sungai Batu, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Palma Plantasindo	PT AJA Sertifikasi Indonesia
35	PT. Agro inti Kencana	Desa Riwang, Kec. Batu Engau, Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur	Kebun dan Pabrik PT. Agro Inti Kencana	PT SAI Global Indonesia
36	PT Pucuk Jaya	Desa Kerang Kec Batu Engau, Kab. Paser	Kebun Kerang, Marinjan, Petangis dan PKS Kerang	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
37	PT. Gawi Makmur Kalimantan		Kebun GMK Kaltim dan PKS GMK Kaltim	PT TUV Rheniland
38	PT. Pradiksi Gunatama		Kebun Ma. Apar, Ma. Benongan, Ma. Langgai, Ma. Petangis, Kerang dan PKS PG langgai	Bureau Veritas Certification

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
39	PT. Multi Jayantara Abadi		Kebun dan Pabrik Tanjung Harapan	PT TUV Rheinland Indonesia
40	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha		PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	PT. Mutu Hijau Indonesia
E.	Kabupaten Penajam Paser Utara			
41	PT Waru Kaltim Plantation	Desa Waru, Kecamatan Waru, Kab. Penajam Paser Utara, Prov. Kalimantan Timur, Indonesia	Kebun Rayon 1,2 dan PKS Waru K	PT BSI Group Indonesia
42	PT Sukses Tani Nusasubur	Desa Labangka, Kec: Babulu Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kalimantan Timur	Kebun Rayon 1 dan 2 dan PKS PT	PT BSI Group Indonesia
E.	Kabupaten Kutai Timur			
43	PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. PKS 2	Desa Dabeq, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS 2 – PT DSN, Kebun Puhus 1, Kebun Puhus 2 dan Kebun Puhus 3	PT TUV Rheinland Indonesia
44	PT Dharma Satya Nusantara, Tbk. PKS 3	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT Dharma Satya Nusantara PKS 3; Kebun Long Kejiak 1, Kebun Long Kejiak 2, dan Kebun Long Kejiak 3, Kebun Melenyu 1, Kebun Melenyu 2, Kebun Melenyu 3 dan Kebun Melenyu 4	PT TUV Rheinland Indonesia
45	PT Swakarsa Sinarsentosa	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov.	Kebun JB1, JB2, LJ1, LJ2 dan	PT TUV Rheinland Indonesia

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
		Kalimantan Timur		
46	PT Sumber Kharisma Persada.	Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT SKP, Kebun Rayon 1 dan Kebun Rayon 2	PT TUV Rheinlan Indonesia
47	PT.Bima Palma Nugraha	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov.Kalimantan Timur	PKS Tepian Langsung dan Kebun Tepian Langsung, Kebun Danau Padang, Kebun Sungai Mangkupa 1, Kebun Sungai Mangkupa 2	PT SAI Global Indonesia
48	PT Gunta Samba	Desa Pengadan, Kec. Kaubun Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Ampanas, Ampanas dan Pengadan Estate.	PT Mutuagung Lestari
49	PT. Etam Bersama Lestari	Desa Pelawan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Etam Bersama Lestari dan Kebun Etam Bersama Lestari	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
50	PT. Karyanusa Ekadaya	Desa Marah Haloq, Kecamatan Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS PT KED, Kebun Rayon 2, Kebun Rayon 3 dan Kebun Rayon 4	PT TUV Rheniland
51	PT. Tapian Nadenggan	Desa Jak Luay, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Jak Luay dan kebun Jak Luay, Long Buluh, Pantun Mas	PT BSI Group Indonesia
52	PT Kresna Duta Agroindo	Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Muara Wahau Mill dan Gunung Kombeng Mill, dengan kebun pemasok Muara Wahau Estate dan Gunung	PT Mutuagung Lestari

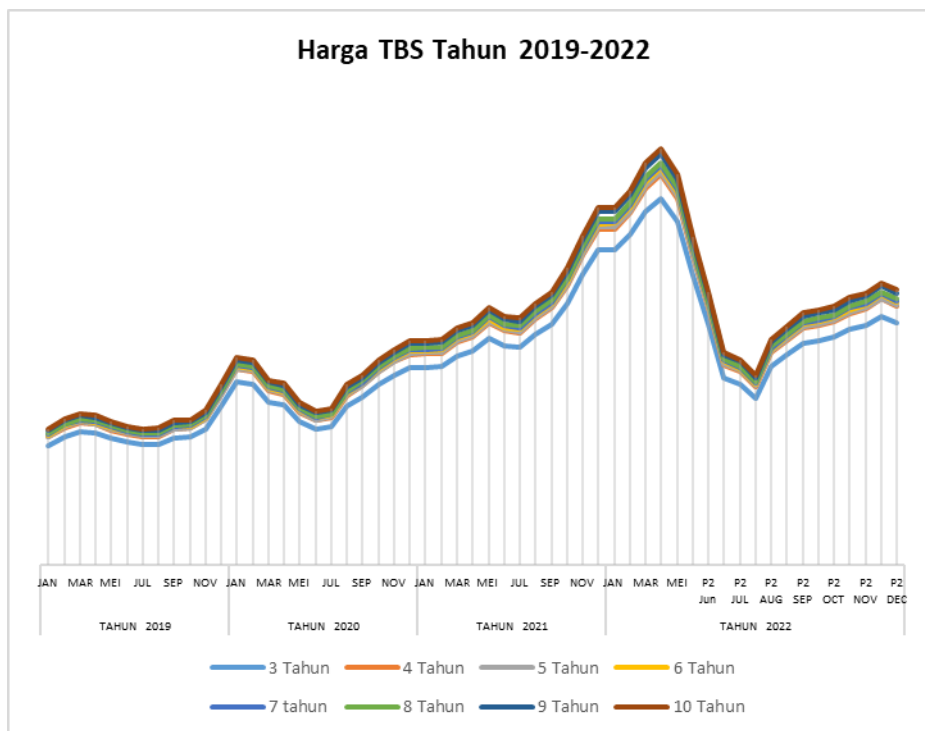
No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
			Kombeng Estate	
53	PT. Sinergi Agro Industri	Desa Susuk Dalam, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun pertama Balidan dan Manumbar	PT Mutuagung Lestari
54	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk (PKS 6)	Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS 6	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
55	PT. Fairco Agro Mandiri	Desa Bumi Jaya dan Desa Kaliorang, Kec. Kaubun dan Kaliorang Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur	PKS Kaubaun dan Kebun Kaubun, Kaliorang,	PT AJA Sertifikasi Indonesia
56	PT. Cipta Narada Lestari	Desa Mandu Dalam, kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	(Kebun Mandu Dalam),	PT Bureau Veritas
57	PT. Hamparan Perkasa Mandiri	Desa Long Pejeng Kec. Busang Kab. Kutim Prov. Kaltim	Kebun PT. HPM	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
58	PT. Wira Inova Nusantara	Desa Susuk Dalam dan Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran dan Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Susuk, Sungai Petard an PK	PT TUV Rheinland Indonesia
59	PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk (PKS 4)	Desa Muara Wahau, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS-4 PKS DSN 4	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
60	PT Anugerah Energitama	Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon Kab. Kutai Timur Prov. Kalimantan Timur	Kebun TLSE 1,2,3 dan PKS TLSE	PT Agri Mandiri Lestari

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
61	PT. Kemilau Indah Nusantara	Desa Muara Bengalon, Desa Sekerat, Desa Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	PKS Sungai Bengalon	PT AJA Sertifikasi Indonesia
62	PT Bima Agri Sawit	Desa Baay, Kec. Karangan, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Baay, Kebun Muara Bulan dan PKS Muara Bulan	PT AJA Sertifikasi Indonesia
63	PT. Gunta Samba Jaya	Desa Miau Baru, Kec. Long Beng, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Miau Baru PT. Gunta Samba	PT TUV Rheinland Indonesia
64	PT. Subur Abadi Wana Agung	Desa Long Nyelong, Long Lees, dan Long Pejeng, Kecamatan Busang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT. SAWA	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
65	PT Hanusentra Agro Lestari	Desa Pelawan, Kec. Sangkulirang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun PT Hanusentra Agro Lestari	PT Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan
66	PT. Telen Prima Sawit	Desa Batu Balai, Mauara Bengkal Ulu, Telaga, Sumber Agung, Benua Baru, Senembah, Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Muara Bengkal, Benua Baru dan PKS Teladan Prima Sawit	PT TUV Rheinland Indonesia
67	PT. Bumi Mas Agro	Desa Marukangan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Estate A, Estate B, dan Estate C	PT Mutuagung Lestari
68	PT Multi Pacific International	Sangkulirang, Kab Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur		
69	PT Kutai Balian Nauli	Bengalon, Kab Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur	Kebun Kutai, Balian dan PKS	
70	PT. Palma		Kebun PT. PP	PT AJA Sertifikasi

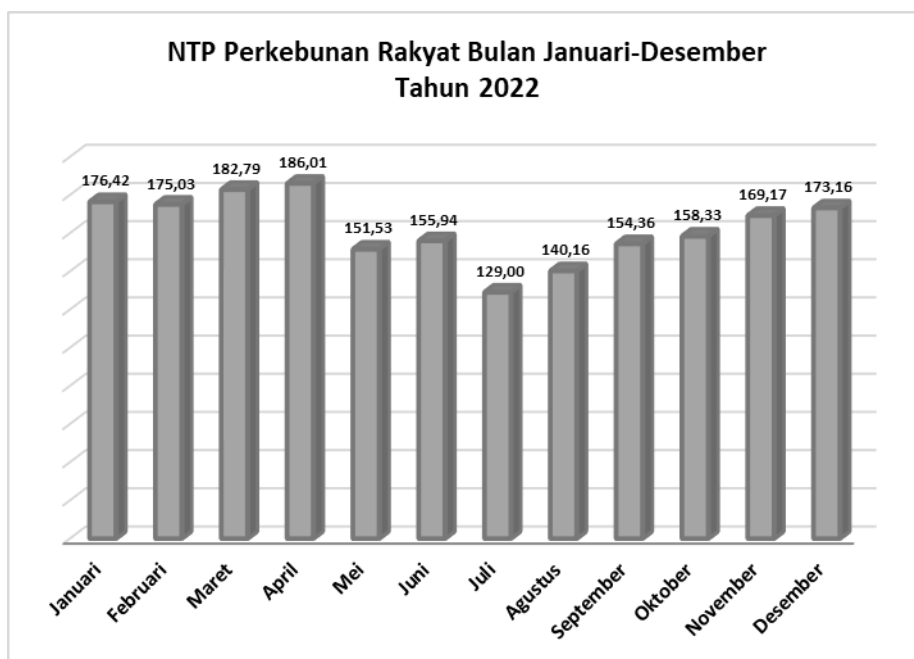
No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
	Plantasindo			Indonesia
71	PT. Gunta Samba		Kebun Elang	PT TUV Rheinland Indonesia
72	PT. Indonesia Plantation Synergy		Kebun : IPS, PKS IPS Mill	PT Mutuagung Lestari
73	PT. Sawit Prima Nusantara		Kebun Mata Air Estate	PT TUV Rheinland Indonesia
74	PT. Nala Palma Cadudasa		Kebun Bendang Baru Estate, Gemburi Estate, Bengkal Estate. PKS NPC	PT Sucofindo
75	PT. Telen		Kebun Pangadaan Baay Estate, Sei Karangan Estate, Bukit Permata Estate, Layang-layang Estate. PKS. Pangadaan Baay Mill dan Bukit Permata Mill	PT TUV Rheinland Indonesia
76	Koperasi Prima Pantun	Desa Jegluay kec. Muara Wahau, Kab Kalimantan Timur.	Perkebunan Koperasi Prima Pantun	PT Mutuagung Lestari
77	Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng		Desa Makmur Jaya, Kec. Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia
78	Koperasi Serba Usaha Makarti		Desa Sidomulyo Kecamatan Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia
79	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera		Desa Sri Pantun, Kecamatan	PT. BSI Grup Indonesia

No.	Perusahaan Perkebunan	Lokasi	Unit Sertifikasi	Lembaga Sertifikasi ISPO
			Kongbeng	
80	Koperasi Marga Indah		Desa Marga Mulya Kecamatan Kongbeng	PT. BSI Grup Indonesia

- b. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 162,66 atau mencapai 147,87%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini didorong oleh membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) selama tahun 2021 hingga 2022. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari sampai dengan Desember 2022:



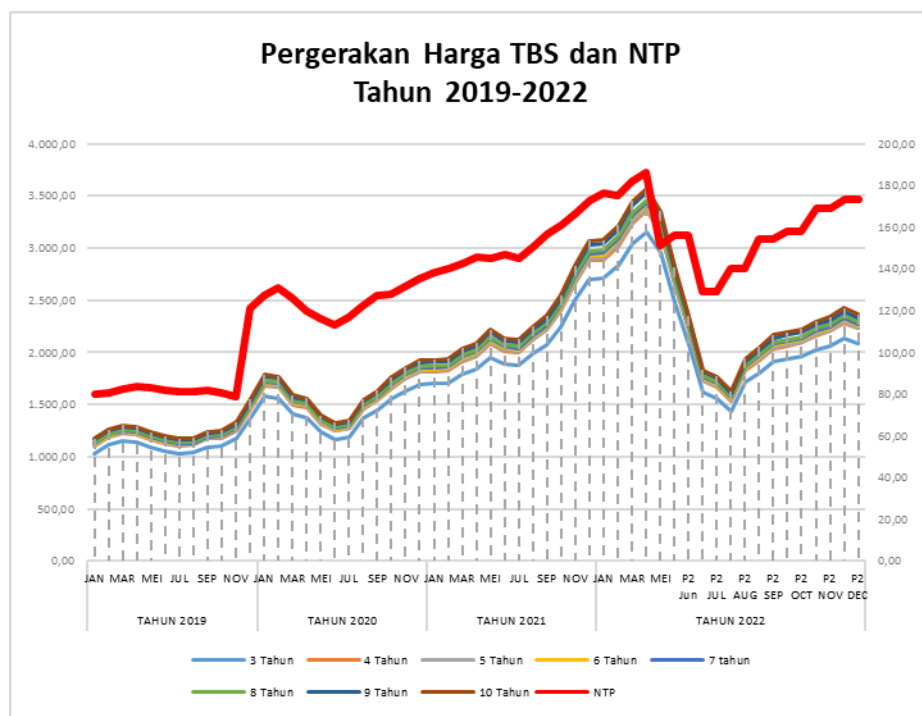
Gambar II.4 Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari tahun 2019 hingga Desember 2022



Gambar II.5 NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2022

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 terus membaik walaupun sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu

pada bulan Juli periode II mencapai Rp. 1.769,76 dan bulan Agustus periode II mencapai Rp. 1.628,21. Dimana harga tertinggi selama tahun 2022 pada bulan April yaitu mencapai Rp. 3.577,69. Dan NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 129% dan Agustus mencapai 140,16% serta NTP tertinggi terjadi pada bulan April mencapai 186,01%. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan NTP perkebunan rakyat berbanding lurus dengan pergerakan harga TBS. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2022 terlihat pada grafik berikut:



Gambar II.6 Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.38 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dan n-1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan/ Penurunan Tahun 2021
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	16.952*)	17.388**)	2,44
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	62	80	29,03
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	151,04	162,66	7,69

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2021)

**) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2022)

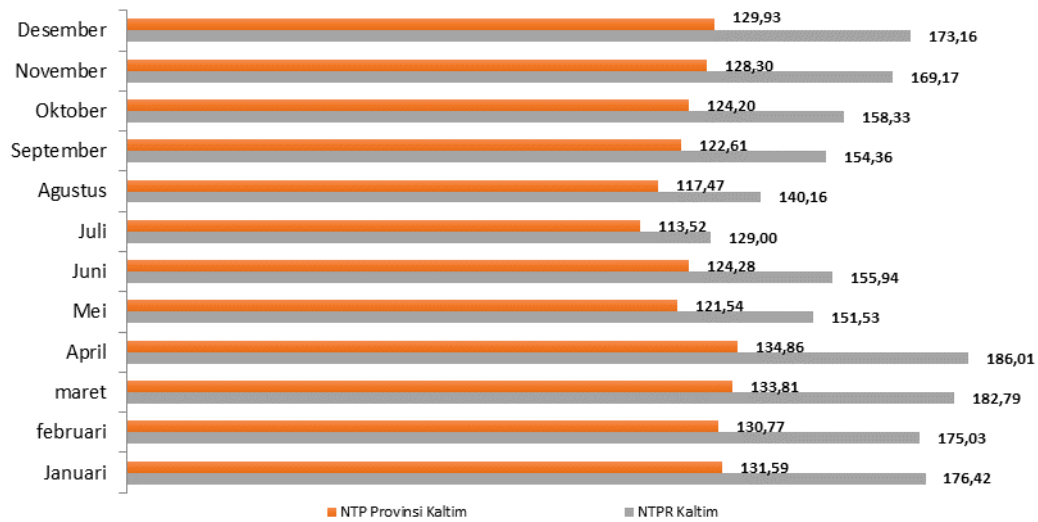
Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi tahun 2022 dengan n-1, perbandingan realisasi sasaran indikator nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2022 (angka sangat-sangat sementara triwulan IV Tahun 2022) dan 2021 mengalami kenaikan sebesar 414 miliar rupiah (2,44%). Faktor pendorong kenaikan nilai PDRB sub sektor perkebunan antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 meskipun mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II dan bulan Agustus periode II;
2. Pencabutan larangan ekspor CPO sejak 23 Mei 2022 (Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2022 tentang larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya); dan
3. Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Selain itu perbandingan realisasi jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tahun 2022 dan 2021 juga mengalami peningkatan yaitu dari 62 perusahaan menjadi 80 perusahaan atau meningkat 29,03%. Artinya pada tahun 2022 sebanyak 26,40% perusahaan di Kalimantan Timur telah mendapatkan sertifikat ISPO dari total 303 perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh perusahaan yang telah mengusahakan untuk mendapatkan sertifikat ISPO dan perusahaan yang mengusahakan perpanjangan sertifikat ISPOnya. Ini merupakan upaya menjadikan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit industri untuk pasar internasional.

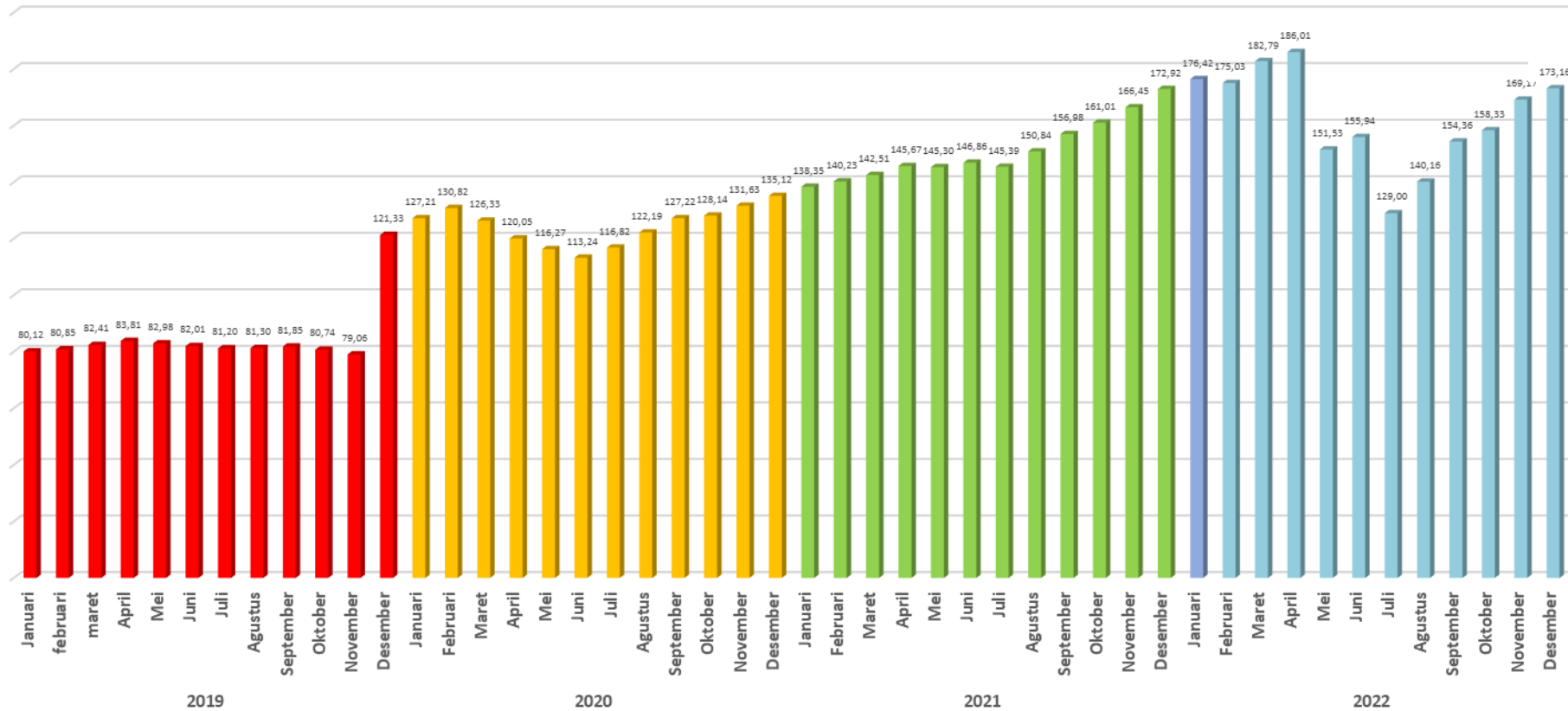
Dan perbandingan realisasi indikator NTP perkebunan rakyat tahun 2022 dan 2021 juga mengalami peningkatan dari rata-rata 151,04 pada tahun 2021 menjadi 162,66% pada tahun 2022 atau naik sebesar 7,69%. Rata-rata NTP perkebunan rakyat bahkan melebihi rata-rata capaian Pada NTP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 126,07% atau 29,02% lebih tinggi. Perbandingan nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP perkebunan rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 terlihat pada grafik berikut:



Gambar II.7 Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Sedangkan perkembangan NTP tanaman perkebunan rakyat dari tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

**NTP Perkebunan Rakyat Bulan Januari-Desember
Tahun 2019-2022**



Gambar II.8. Perkembangan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2022

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra.

Tabel II.39 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Traget Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.388*)	79,05
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	80	126,98
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	112	162,66	145,23

*) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2021)

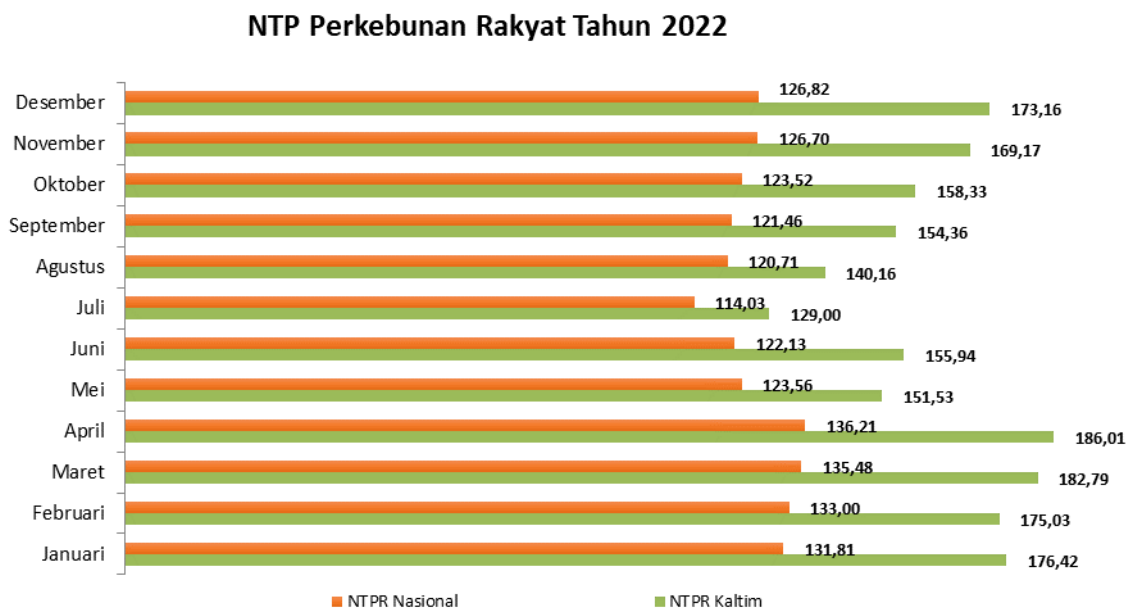
Tahun 2022 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata capaian sasaran strategis sudah mencapai 117,09%. Diestimasikan capaian ketiga sasaran di atas akan tercapai pada pelaksanaan tahun kelima Renstra. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas dengan realisasi nasional tahun 2022:

Tabel II.40 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.388*)	390.400 *)	4,45
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	80	755	10,60
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	162,66	126,29	128,80

*) Data BPS (Angka Sangat-Sangat Sementara Triwulan IV Tahun 2022)

Dari tabel 3.8, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian nasional. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 telah memberikan kontribusi sebesar 4,45% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 80 atau 10,60% dari 755 perusahaan kelapa sawit se Indonesia yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 162,66% atau sebesar 128,80% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP perkebunan rakyat nasional yaitu 128,80%, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar II. Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis berdasarkan tabel-tabel di atas, capaian rata-rata sasaran strategis melebihi target. Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan sebagaimana penjabaran berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian.
 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani penerima bantuan dari Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota sehingga berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktifitas kebun yang menerima bantuan;
2. Perubahan harga pasar untuk pupuk NPK dan Herbisida yang fluktuatif sehingga sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal;
3. Usulan kegiatan Hibah tidak dapat dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, karena kelompok tani kelompok tani Sipatokong Sipatuo tidak sanggup melakukan pengelolaan dana tersebut maka sesuai dengan musyawarah kelompok maka kelompok tani menyatakan mundur. Untuk pengusul Gapoktan Karya Bersama dan Kelompok Tani Sumber Makamur tidak dapat dilaksanakan bantuan yang diminta bukan merupakan komoditi perkebunan;
4. Kegiatan Pokir di Kabupaten Kutai Barat dimana kel. tani belum terdaftar di Simluhtan, lahan anggota kelompok yang masuk dalam HGU perusahaan, lahan yang telah ditambang, lahan yang bukan komoditi perkebunan, dan anggota kelompok yang tidak mau menyerahkan fotocopy KTP. Kondisi ini membuat luasan yang dapat dibantu menjadi berkurang;
5. Belum maksimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan pada masyarakat pekebun; dan
6. Kurangnya koordinasi dari Pengawas Benih Tanaman daerah asal benih tanaman perkebunan luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk kepada Pengawas Benih Tanaman dan PPNS Provinsi Kalimantan Timur sehingga pengawasan terhadap dokumen maupun fisik benih tidak maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Untuk mengurangi permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif;
 2. Untuk kondisi harga bahan baku Pupuk NPK dan Pestisida yang fluktuatif, tidak ada upaya yang dapat dilakukan, karena hal ini menjadi hambatan secara nasional bahkan dunia;
 3. Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Perbenihan yang dilaksanakan dengan cara pendekatan secara langsung ke lapangan; dan
 4. Melakukan koordinasi dengan Pengawas Benih Tanaman di luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur, karantina wilayah kerja Balikpapan dan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian untuk meningkatkan pengawasan peredaran benih.
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:
- Penataan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih terdapat bantuan benih tanaman perkebunan yang belum di tanam dilahan pekebun/petani hal ini dikarenakan faktor iklim (hujan) yang menyulitkan pekebun untuk melakukan distribusi benih ke kebun sebab akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan.
2. Adanya budaya atau kebiasaan pekebun di beberapa daerah setelah melakukan pembukaan lahan melakukan penanaman padi dan tanaman pangan lainnya sehingga benih yang sudah dibagikan masih di simpan di masing-masing tempat pekebun.
3. Pembukaan lahan kebun yang relatif lambat sehingga realisasi penanaman belum sepenuhnya selesai, hal ini disebabkan sebagian besar kelompok tani melakukan secara bergotong royong sehingga harus menunggu giliran dalam pembukaan lahan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi ditahun berjalan dan tahun berikutnya;
2. Memberikan informasi melalui sosialisasi terkait teknis budidaya komoditas yang diberikan; dan
3. Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi teknis dengan petugas lapangan guna percepatan pelaksanaan penanaman dilapangan.

c) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN.
- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani; dan
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih kurangnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta penguatan kelompok tani;
2. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep *corporate farming*; dan
3. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan;
2. Melakukan diseminasi informasi akan konsep *corporate farming* kepada petani/ poktan/ gapoktan;
3. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan; dan
4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 23.654.619.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.823.118.303,- atau 79,57%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif terutama SILPA dari pengadaan barang yang diserahkan kepada masyarakat. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan). Sasaran ini terealisasi mencapai 17.388 Miliar Rupiah dari target 20.493 Miliar Rupiah (84,85%) (Berdasarkan angka sangat-sangat sementara triwulan IV tahun 2022) atau meningkat 2,44% dari capaian tahun 2021.

Faktor pendorong peningkatan nilai PDRB sub sektor perkebunan tersebut antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit selama tahun 2021 hingga 2022 meskipun mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 yaitu pada bulan Juli periode II dan bulan Agustus periode II;
2. Pencabutan larangan ekspor CPO sejak 23 Mei 2022 (Pencabutan Permendag Nomor 22 tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor CPO dan Turunannya); dan
3. Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
4. Melakukan upaya peningkatan produksi komoditi perkebunan di tahun medatang dengan melaksanakan:
 - a. Intensifikasi kelapa sawit seluas 150 Ha;
 - b. Intensifikasi karet seluas 150 Ha;
 - c. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
 - d. Intensifikasi kakao seluas 150 Ha;
 - e. Peremajaan kakao seluas 50 Ha;
 - f. Intensifikasi lada seluas 150 ha,
 - g. Rehabilitasi lada seluas 50 Ha,
 - h. Perluasan kelapa sawit seluas 70 Ha,

- i. Perluasan lada seluas 100 Ha,
- j. Perluasan kelapa seluas 50 Ha,
- k. Perluasan kakao seluas 150 Ha,
- l. Perluasan karet seluas 150 Ha,
- m. Perluasan pala seluas 100 Ha, dan
- n. Perluasan aren seluas 100 Ha.

Sedangkan faktor penghambat belum tercapainya nilai PDRB sesuai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Penurunan produksi terutama produksi kelapa sawit pada tahun 2022;
 2. Adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO);
 3. Masih adanya tanaman yang belum menghasilkan ataupun tua/rusak;
 4. Kelangkaan pupuk; dan
 5. Kenaikan harga pupuk.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, meliputi kegiatan:
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan;
 - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:
1. Masih kurangnya perhatian pelaku usaha/ perusahaan perkebunan dalam menyampaikan informasi pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi karena belum lengkapnya ketersediaan data yang di miliki perusahaan baik berupa data luasan area dengan nilai konservasi tinggi maupun data spasial/ file shp*GIS; dan

2. Penghitungan Taksasi yang berbeda disetiap komoditi sehingga mengakibatkan untuk pencapain program hanya memenuhi luasan saja namun tidak dengan nominal Rupiahnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan koordinasi kepada Pelaku usaha/ perusahaan perkebunan agar dapat menyampaikan informasi pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala ke instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Kabupaten dan Provinsi sehingga diketahui pengelolaan yang dilakukan oleh pelaku usaha; dan
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan Renstra periode selanjutnya agar target taksasi kerugian menjadi target Luasan Pengendalian sebagai target indikator Program.

b) Program perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten;
2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan PUP di Kabupaten; dan
3. Tidak siapnya perusahaan perkebunan untuk dilakukan PUP.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
2. Melaksanakan pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi sebesar Rp. 2.670.577.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.625.308.385,- atau 98,30%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan target 58 perusahaan. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 80 perusahaan atau senilai 137,93% dari target dan meningkat sebesar 29,03% dari capaian tahun 2021.

Faktor pendorong peningkatan capaian jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tersebut antara lain:

1. Adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang tentang penyelenggaraan sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi ISPO.
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024 ;
6. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Program Rintisan Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi kebun sawit rakyat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Pendanaan dari Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund FCPF-CF) tahun 2023;
9. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 7 Tahun 2019 tentang Pengembangan

Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan;

10. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 273/Kpts/KH.160/ 9/2020 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
11. Program dan pendanaan dari mitra kerja pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target di atas antara lain yang bisa melakukan teguran terkait pelaksanaan ISPO adalah pemberi ijin.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pendampingan manajemen korporasi petani; dan
 - Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep corporate farming;
2. Masih rendahnya penerapan praktik pasca panen yang baik dan pengolahan produk turunan; dan
3. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan pengawalan, pembinaan dan pendampingan serta penguatan kelembagaan pada kelompok tani sehingga UPPB yang bentuk tetap berjalan dan tetap ada keberadaannya;
2. Melakukan diseminasi informasi akan konsep *corporate farming* kepada petani/ poktan/ gapoktan;

3. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan; dan
4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

b) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan dalam pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun.
2. Terbatasnya SDM dimana tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD; dan
2. Melakukan Peningkatan Kualitas SDM.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.593.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.564.503.049,- atau 98,88%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu NTP perkebunan rakyat dengan target 110%. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 162,66% atau 147,87% dan meningkat 7,69% dari capaian tahun 2021.

Capaian sasaran ini diukur dari rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Gambar 3.3).

Faktor pendorong peningkatan capaian NTP antara lain:

1. Kenaikan harga TBS kelapa sawit;
2. Anemo masyarakat terhadap produk olahan perkebunan semakin tinggi;
3. Jaringan pemasaran sudah semakin berkembang dan semakin dikenal;
4. Meningkatnya kesadaran petani untuk menjual produksinya dalam bentuk produk olahan daripada bahan mentah;
5. Ketersediaan benih unggul dan bermutu; dan
6. Melaksanakan kegiatan intensifikasi perkebunan rakyat.

Sedangkan faktor penghambat fluktuasi capaian NTP antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Persaingan dengan produk diluar Kalimantan Timur;
3. Harga komoditas perkebunan tergantung dengan mekanisme pasar; dan
4. Tingginya biaya produksi.

TABEL T-C29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PERKEBUNAN											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	89 %	89	86	%	89	%	117	89 %	267	3
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	72,63	70		72,63		104	72	217	3
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10 Dokumen	30	3
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100	4 Laporan	12	3
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28	28	Dokumen	28	Dokumen	100	28 Dokumen	84	3
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100	12 Laporan	36	3
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	23	20	%	23	%	115	20 %	66	3
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	49	50	Orang	49	Orang	98	50 Orang	148	3
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	5 Unit	5	5	Unit	5	Unit	100	5 Unit	15	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	114	114	Unit	114	Unit	100	- -	228	19
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4	4	Unit	4	Unit	100	12 Bulan	20	2
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	- -	24	2

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240	47.240	Lembar	47.240	Lembar	100	12 Bulan	94.492	2
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.500	1.500	Eks	1.500	Eks	100	47.240 Lembar	50.240	4.187
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	4	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100	12 Bulan	20	2
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	8	8	Jenis	8	Jenis	100	8 Jenis	24	4
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	34	34	Unit	34	Unit	100	15 Unit	83	9
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	750	750	Lembar	750	Lembar	100	3.000 Lembar	4.500	2

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1	1	Unit	1	Unit	100	- -	2	0
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	21	21	Unit	21	Unit	100	18 Unit	60	3
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	3
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	9	9	Unit	9	Unit	100	21 Unit	39	2

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25 Ton	17.461.751	17.136.849	Ton	17.461.751	Ton	102	18.126.490 Ton	53.049.993	3
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504 Ton	17.375.224	17.036.402	Ton	17.375.224	Ton	102	18.020.894 Ton	52.771.342	3
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000 Ton	70.010	77.763	Ton	70.010	Ton	90	81.651 Ton	221.671	2
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853 Ton	10.164	12.479	Ton	10.164	Ton	81	12.500 Ton	32.828	3
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000 Ton	2.180	3.771	Ton	2.180	Ton	58	4.368 Ton	8.728	2
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517 Ton	4.173	6.434	Ton	4.173	Ton	65	7.077 Ton	15.423	2
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25 Ton	0,15	0,15	Ton	0,15	Ton	100	0,20 Ton	1	2
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha	15,23	18	Ton/Ha	15,23	Ton/Ha	83	19 Ton/Ha	50	2

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3	3
		Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/ha	17,3	1 Ton /Ha	17,3 Ton /Ha	2.307	21 Ton/Ha	56	3
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,5 Ton/ha	1,32	1 Ton/Ha	1,32 Ton/Ha	94	1 Ton/Ha	4	3
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,9 Ton/ha	0,64	1 Ton/Ha	0,64 Ton/Ha	78	1 Ton/Ha	2	2
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/ha	0,52	20 Ton/Ha	0,52 Ton/Ha	3	1 Ton/Ha	2	2
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,2 Ton/ha	0,72	1 Ton/Ha	0,72 Ton/Ha	61	1 Ton/Ha	3	2
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 Ha	1.517.300	1.425.580 Ha	1.517.300 Ha	106	1.462.645 Ha	4.497.245	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	30 Kelompok Tani	34	30	Kelompok Tani	34	Kelompok Tani	113	30 Kelompok Tani	98	3
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	645 Ha	670	670	Ha	670	Ha	100	595 Ha	1.935	3
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	200	200	Ha	200	Ha	100	150 Ha	550	4
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	100	100	Ha	100	Ha	100	100 Ha	300	3
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20	20	Ha	20	Ha	100	20 Ha	60	3
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	100	100	Ha	100	Ha	100	100 Ha	300	3
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200	200	Ha	200	Ha	100	150 Ha	550	3
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	50	50	Ha	50	Ha	100	50 Ha	150	3
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton Co2eq	6,73	4	Ton CO2eq	6,73	Juta Ton CO2eq	165	4,067 Juta Ton CO2eq	18	4

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	67				8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 Pelaku Usaha	128	128	Pelaku Usaha	128	Pelaku Usaha	100	130 Pelaku Usaha	386	3
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	5 Pelaku Usaha	7	5	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	140	5 Pelaku Usaha	19	4
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1	1	PMS	1	PMS	100	1 PMS	3	3
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	102.039	102.000	Ha	102.039	Ha	100	102.500 Ha	306.578	3
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	7	5	Konflik	7	Konflik	140	5 Konflik	19	4
		Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	20	15	KTPA	20	KTPA	133	15 KTPA	55	4

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	41	35	Perusahaan	41	Perusahaan	117	35 Perusahaan	117	3
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	89	87	Perusahaan	89	Perusahaan	102	97 Perusahaan	275	3
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	35	35	Lembaga Pekebun	35	Lembaga Pekebun	100	45 Lembaga Pekebun	115	2
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	54	52	Perusahaan	54	Perusahaa	104	52 Perushaan	160	3
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	1	1	Lembaga	1	Lembaga	100	1 Lembaga	3	3
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	25	25	Orang	25	Orang	100	25 Orang	75	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	3
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 Kelompok Tani	31	31 Kelompok Tani	31 Kelompok Tani	100	31 Kelompok Tani	93	3
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3	3
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	7 Jenis	18	5 Jenis	18 Jenis	360	7 Jenis	43	6
		Jumlah promosi yang diikuti	10 Event	15	10 Event	15 Event	150	10 Event	40	4
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20	20 Pertemuan	20 Pertemuan	100	20 Pertemuan	60	3
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	20	20 Lembaga	20 Lembaga	100	20 Lembaga	60	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6			7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4 Kelompok Tani	7	4	Kelompok Tani	7	Kelompok Tani	175	4 Kelompok Tani	18	5
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	24	24	Lembaga	24	Lembaga	100	28 Lembaga	76	2
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	9	9	Unit	9	Unit	100	5 Unit	23	3
3.27.007.1.03.003	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6 Kali	8	6	Kali	8	Kali	133	6 Kali	22	4
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1	1	Pertemuan	1	Pertemuan	100	1 Pertemuan	3	3
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	82,39	86	%	82,39	%	96	89 %	254	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	100	20	%	100 %	500	20 %	220	11
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	17	18	Orang	17 Orang	94	13 Orang	47	4
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3 Unit	100	3 Unit	9	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12 Bulan	100	- -	24	2
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4	4	Unit	4 Unit	100	12 Bulan	20	2
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500	500	Lembar	500	Lembar	100	500 Lembar	1.500	3
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	720	720	Eks	720	Eks	100	12 Bulan	1.452	121
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	2	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	500 Lembar	504	42
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	6	Jenis	6	Jenis	100	6 Jenis	18	3
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15	15	Unit	15	Unit	100	15 Unit	45	3
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240	240	Lembar	240	Lembar	100	240 Lembar	720	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	4	4	Unit	4	Unit	100	12 Bulan	20	2
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	12 Bulan	18	6
3.27.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	3
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	4 Unit	12	3
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	13 Unit	21	2

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6			7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	6.121.600	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000 Benih	18.243.200	3	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	6.121.600	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000 Benih	18.243.200	3	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	2.343.046	3.000.000	Benih	2.343.046	Benih	78	3.000.000 Benih	7.686.092	3	
		Persentase Peredaran Benih yang Illegitim	1,58 %	2,51	2,58	%	2,51	%	97	1,58 %	7	4	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah prasarana kantor yang tersedia	1 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	6	
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian	1 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	6	
3.27.003.1.01.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah bangunan gedung dan Laboratorium yang direhab	1 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	6	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.0.00.0.00.01.000x	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)										-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	84	86	%	84	%	98	89 %	257	3
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	50	20	%	50	%	250	20 %	120	6
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	6	8	Orang	6	Orang	75	8 Orang	20	3
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	9	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75	75	Unit	75	Unit	100	75 Unit	225	3
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	3
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100	13.100	Lembar	13.100	Lembar	100	13.100 Lembar	39.300	3
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	9	9	Jenis	9	Jenis	100	5 Jenis	23	5
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	21	21	Unit	21	Unit	100	17 Unit	59	3
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	198	3	enis	198	enis	6.600	3 enis	399	133

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar		395	Lembar		Lembar	-	395 Lembar	395	1
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	198	1	Unit	198	Unit	19.800	- -	396	33
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	3
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6			7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	10 Unit	18	2	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rupiah	1.044.792.912	1.047.138.860	Rupiah	1.044.792.912	Rupiah	100	916.648.000 Rupiah	#####	4	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	220	220	Ha	220	Ha	100	195 ha	635	4	
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	Jenis 2	2	2	Jenis	2	Jenis	100	2 Jenis	6	3	
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 Kg	0	1.000	Kg	0	Kg	-	1.000 Kg	1.000	1	
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	600	600	Liter	600	Liter	100	600 Liter	1.800	3	
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2	2	Lembaga	2	Lembaga	100	2 Lembaga	6	3	

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	1ealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	220	220	Ha	220	Ha	100	195 Ha	635	4
3.27.0.00.0.00.01.000x	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	87,13	86	%	87,13	%	101	89 %	263	3
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20	%	20	%	100	20 %	60	3
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	14	15	Orang	14	Orang	93	10 Orang	38	4

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3 Unit	3 Unit	100	3 Unit	9	3
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	88	88 Buah	88 Buah	100	12 Bulan	188	16
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1	1 Unit	1 Unit	100	12 Bulan	14	1
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	3
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	2.960	2.960 Lembar	2.960 Lembar	100	3.000 Lembar	8.920	3
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	12 Eksemplar	12 Eksemplar	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	15	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	12 Bulan	42	4

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022	Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 Unit	9	9	Unit	9	Unit	100	5 Unit	23	5
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	3	3	Jenis	3	Jenis	100	12 Bulan	18	2
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	210	210	Lembar	210	Lembar	100		420	35
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	3
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	lealisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu				Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realiasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	3
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	3
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	3
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13	13	Unit	13	Unit	100	13 Unit	39	3
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	92,32	75	%	92,32	%	123	80 %	265	3
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	55.000	55.000	Benih	55.000	Benih	100	50.000 Benih	160.000	3

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target Program dan Kegiatan (RENJA Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	30.000 Benih	20.000	20.000	Benih	20.000	Benih	100	30.000 Benih	70.000	2
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	30.000	3
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	30.000	3
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	35.000	35.000	Benih	35.000	Benih	100	10.000 Benih	80.000	3
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	20.000 Benih	40.000	8
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	30.000	3
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	15.000	15.000	Benih	15.000	Benih	100	10.000 Benih	40.000	3

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Petani swadaya mengelola lebih dari 40 persen dari perkebunan kelapa sawit. Rata-rata produksi petani swadaya adalah dua sampai tiga hektar per tahun. Jumlah ini kurang dari setengahnya bila dibandingkan dengan perkebunan komersial. Ini berarti terdapat peluang yang potensial untuk meningkatkan hasil panen atau produktivitas petani swadaya. Dengan demikian, pasokan kelapa sawit yang tersedia akan meningkat, pendapatan petani swadaya dari kebun yang sama naik, dan kebutuhan untuk membuka lahan baru dapat dikurangi. Bagaimana cara mewujudkan peningkatan produksi petani swadaya ini merupakan hal yang sedang diperjuangkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Salah satu solusi yang dapat ditempuh ialah dengan membangun kemitraan antara perkebunan besar dan pembeli kelapa sawit, dengan kelompok petani swadaya. Program pembinaan petani kelapa sawit di Kalimantan Timur ini menyalurkan berbagai jenis skema kredit untuk membantu petani memperoleh bibit berkualitas, pupuk dan dukungan infrastruktur kebun, pelatihan, bantuan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO dan meningkatkan status lahan.

Hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) akan meningkatkan investasi riil di Kalimantan Timur sebesar 47,7 persen dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,3 persen. Sementara sektor kemiskinan sudah berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2020 sebesar 6,64 persen, sedangkan rata-rata nasional sebesar 10,19 persen. Selain itu, ketersediaan lapangan kerja akan semakin meningkat, bukan hanya di Kaltim, namun juga regional Kalimantan bahkan nasional. Dalam hal ini peluang terbesar adalah penyediaan pangan dan energi hijau berbasis kelapa sawit. Upaya dan kebijakan pembangunan ekonomi hijau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022. Provinsi Kalimantan Timur memiliki keunggulan komparatif dari produksi crude palm oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit sampai tahun 2020 sebanyak 3,89 juta ton. Namun, masih ditemui kendala dalam mengoptimalkan pengolahan menjadi produk olahan pangan dan energi terbarukan green fuel berbasis kelapa sawit. Sementara komoditas lainnya, seperti kakao, aren, lada, dan kelapa dalam, dirasa belum mencukupi aspek

produksi dan pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan pangan ibu kota negara baru.

Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Di sektor perkebunan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Perjanjian Paris 2015 menjadi tonggak bersejarah munculnya kesepakatan global untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandatangani oleh 197 negara. Setiap negara berkewajiban menurunkan emisi GRK yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC) guna mencegah kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius pada 2030. Dalam proposal NDC, Indonesia menyanggupi pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030.

Salah satu instrumen untuk mengurangi emisi GRK adalah perdagangan karbon. Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit). Dalam hal ini, pembelinya adalah pihak yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas ketentuan. Satu unit kredit karbon setara dengan penurunan emisi 1 ton karbon dioksida (CO₂).

Pendapatan dari perdagangan karbon diperoleh dari berbagai sektor, baik kehutanan, pertanian, maupun energi. Perdagangan karbon dipercaya bakal memberikan dampak berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Dengan asumsi harga kredit karbon sekitar US\$ 5 per ton, maka potensi pendapatan Indonesia dari perdagangan karbon tiga aset tersebut mencapai US\$ 565,9 miliar atau setara Rp 8.000 triliun. Ada pula data lain yang menyebut bahwa Indonesia diperkirakan menyumbang 75-80% kredit karbon dunia. Dengan peran tersebut, perdagangan karbon dapat berkontribusi setidaknya US\$ 150 miliar bagi perekonomian Indonesia.

Ada sejumlah mekanisme yang berlaku dalam perdagangan karbon. Pertama adalah cap and trade, yakni perdagangan karbon antar-pelaku usaha

lintas sektor. Mereka yang memproduksi emisi lebih dari batas (cap), wajib membeli kelebihanannya kepada mereka yang memproduksi emisi lebih rendah dari batas tersebut. Kedua adalah carbon offset atau pengimbangan. Dalam sistem ini, pihak yang memproduksi emisi lebih besar dari baseline, bisa membeli kelebihan emisi tersebut kepada mereka yang menyediakan usaha penyerapan karbon.

Perdagangan karbon ke depan diharapkan dapat mendorong masuknya investasi hijau, yang pada gilirannya mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kita juga bisa menginisiasi penggalangan dana global yang bisa dihasilkan dari perdagangan karbon untuk investasi hijau.

Dengan perdagangan karbon, pemerintah di setiap negara dapat memantau jumlah emisi karbon atau gas rumah kaca secara lebih akuntabel dan transparan. Sebab, jumlah emisi dan potensi penyerapannya terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Alhasil, jumlah kredit karbon yang beredar di pasar karbon pun bakal membantu dalam mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer.

Indonesia yang selama ini dijuluki paru-paru dunia seyogianya mampu mengoptimalkan potensi besar perdagangan karbon ini. Di masa depan, perdagangan karbon bakal menumbuhkan peluang-peluang ekonomi baru yang menjadi sumber pertumbuhan jangka panjang

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbarukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan

lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari sektor perkebunan difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri perkebunan, termasuk pengembangan energi baru terbarukan dari limbah-limbah perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Pengembangan ekonomi produktif dilakukan dengan tetap menjaga kawasan-kawasan di wilayah perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT).

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tiga tahun ke depan, meliputi :



II. 4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun, peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah.

1. Dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan SDA perkebunan memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Meningkatnya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke non perkebunan;
 - Ketersedian kebun sumber benih bina dan non bina masih terbatas di Kalimantan Timur;
 - Persepsi LSM tentang isu kerusakan lingkungan akibat pembangunan perkebunan
 - Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase;
 - Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif
2. Dalam aspek SDM, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Kompetensi dan keterampilan pelaku usaha perkebunan masih terbatas;
 - Kurangnya tenaga teknis lapangan yang terampil;
 - Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengawas OPT masih kurang, sehingga berdampak terhadap lemahnya pengawasan kualitas benih dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu;

3. Dalam aspek Kebijakan, memiliki tantangan dan peluang antara lain :
 - Masih adanya peraturan perundang undangan yang terkait pembangunan sub sektor perkebunan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya;
 - Perijinan sektor perkebunan banyak yang tidak clear dan clean
 - Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik
 - Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal
 - Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
 - Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
 - Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan;
 - Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru;
 - Dukungan kebijakan dan regulasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.
4. Dalam aspek Sarana-prasarana, antara lain: kuantitas serta kualitas ketersediaan sarana-prasarana teknis budidaya dan pengolahan hasil perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan;
5. Dalam aspek teknologi, antara lain: pengembangan teknologi budidaya, teknologi pembenihan dan teknologi pengolahan hasil masih belum optimal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; belum lengkap dan akuratnya *database* tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur
6. Dalam aspek kelembagaan, antara lain: Sebagian besar kelembagaan petani baik poktan, gapoktan, maupun asosiasi, belum tertata dengan baik dari segi Status kelembagaan, manajemen, sarana-prasarana dan permodalan.

7. Dalam aspek administrasi, antara lain: masih perlu ditingkatkannya mekanisme pengelolaan kegiatan agar mencapai target kinerja secara optimal, efektif dan efisien.

II. 5. Review Terhadap Rancangan RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD (Tabel TC. 31).

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS+3 UPTD					78.729.186.000					78.729.186.000
DINAS PERKEBUNAN					65.483.601.900					65.483.601.900
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	78,93	30.442.505.100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	78,93	30.442.505.100
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	3.228.702.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	3.228.702.000
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2.025.718.400	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2.025.718.400
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	100.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	100.000.000
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	498.521.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	498.521.900
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	504.461.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	504.461.700
3.27.01.1.02.0001	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	16.110.447.400	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	16.110.447.400
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Samarinda</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	64	15.568.093.400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Samarinda</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	64	15.568.093.400

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	474.804.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	474.804.000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	10.550.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	10.550.000
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	1.225.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	1.225.000
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	28.350.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	28.350.000
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	27.425.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	27.425.000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	65.750.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	65.750.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	27.100.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	27.100.000
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda, Kukar, Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	6	29.500.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda, Kukar, Paser	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	6	29.500.000
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	9.150.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	9.150.000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	8.900.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	8.900.000
3.27. 01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	8.900.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	8.900.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35,71	654.050.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35,71	654.050.000
3.27. 01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	130.050.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	130.050.000
3.27. 01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	35.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	35.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27. 01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	25.000.000	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	25.000.000
3.27. 01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15	464.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15	464.000.000
3.27. 01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	2.123.282.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	2.123.282.100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	50.000.000
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	245.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	245.000.000
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	465.693.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	465.693.200
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	54.123.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	54.123.300

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	10.665.600	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	10.665.600
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.297.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.297.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	2.684.056.820	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	2.684.056.820
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	1.500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	1.500.000.000
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	650.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	650.000.000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	67	534.056.820	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	67	534.056.820
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4.095.538.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4.095.538.520

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	34.331.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	34.331.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	571.703.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	571.703.000
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	629.160.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	629.160.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda, Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	2.860.344.520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda, Kukar	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	2.860.344.520
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	1.471.778.260	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	1.471.778.260
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	21	340.193.260	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	21	340.193.260

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	960.865.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	960.865.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	20	170.720.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	20	170.720.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,36	20.852.056.400	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,36	20.852.056.400
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	20.852.056.400	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	20.852.056.400
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	20.852.056.400	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	20.852.056.400
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	50.702	600.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	50.702	600.000.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	600.000.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	600.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan Balikpapan</i>	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	400.000.000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan Balikpapan</i>	Jumlah Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	400.000.000
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau</i>	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	200.000.000	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau</i>	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	200.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100	6.915.440.100	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100	6.915.440.100
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	200	6.915.440.100	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	200	6.915.440.100
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	122.000	4.838.907.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<i>Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim</i>	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	122.000	4.838.907.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.076.533.100	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.076.533.100
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40,59	1.647.421.100	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	40,59	1.647.421.100
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.647.421.100	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.647.421.100
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.647.421.100	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.647.421.100
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	26,50	5.026.179.200	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	26,50	5.026.179.200
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)	11,15				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)	11,15	

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	1.074.912.500	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	3	1.074.912.500
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	60	1.074.912.500	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	60	1.074.912.500
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	2.160.179.700	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	2.160.179.700
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda, Paser dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1.330.733.700	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda, Paser dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1.330.733.700
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda, Paser dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	829.446.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda, Paser dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	829.446.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	1.791.087.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	1.791.087.000
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Paser, Balikpapan, Samarinda	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1.120.166.000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Paser, Balikpapan, Samarinda	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1.120.166.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Paser, Balikpapan, Samarinda	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	670.921.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Paser, Balikpapan, Samarinda	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	670.921.000
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.786.334.000					2.786.334.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,87	1.731.871.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,87	1.731.871.000
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000
3.27. 01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100	5.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100	5.000.000
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	5.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	5.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59	183.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59	183.600.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	183.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	183.600.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	527.171.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	527.171.100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.055.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4.055.500
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	113.678.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	113.678.800
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	51.936.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	51.936.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	7.744.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	7.744.000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	342.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	342.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	50.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	50.000.000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	50.000.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	667.823.900	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	667.823.900
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.000.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ymag disediakan (Laporan)	1	131.683.200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ymag disediakan (Laporan)	1	131.683.200

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	323.400.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	323.400.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	207.740.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	207.740.700
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	55	213.316.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	55	213.316.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	149.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	149.000.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	39.910.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	39.910.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6.000.000	1.054.463.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6.000.000	1.054.463.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5.000.000	1.054.463.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5.000.000	1.054.463.000
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	559.543.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	559.543.000
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	494.920.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	494.920.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.337.721.100					3.337.721.100
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	79	1.822.937.800	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	79	1.822.937.800
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Samarinda</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Samarinda</i>	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100	2.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100	2.000.000
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35	93.960.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35	93.960.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikipapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	93.960.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikipapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	93.960.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	403.610.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	403.610.200
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	9.081.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	9.081.300
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	55.611.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	55.611.500
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	39.088.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	39.088.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	21.151.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	21.151.000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.878.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	3.878.400

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	274.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	274.800.000
3.2701.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	14	593.188.320	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	14	593.188.320
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	383.097.600	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	383.097.600
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	210.090.720	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	210.090.720
3.27.01.1.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	521.213.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	521.213.280
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	178.912.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	178.912.800

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	129.360.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	129.360.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	207.740.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	207.740.480
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	124.006.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	124.006.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	12.203.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	12.203.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	10.203.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	10.203.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	101.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	101.600.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	55	1.514.783.300	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	55	1.514.783.300
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	26	1.514.783.300	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	26	1.514.783.300
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1.040	1.514.783.300	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1.040	1.514.783.300
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					7.121.529.000					7.121.529.000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80	2.621.529.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	80	2.621.529.000
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100	50.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100	50.000.000
3.27.01.1.04.0007	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	50.000.000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	50.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	40	77.067.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	40	77.067.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	77.067.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	77.067.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	388.734.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	388.734.000
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	8.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	8.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	75.000.000
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	33.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	33.500.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	25.000.000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	3.000.000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	244.234.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	244.234.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	4	1.149.465.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	4	1.149.465.000
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	1.036.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	1.036.500.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	112.965.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	112.965.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	754.100.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	754.100.000
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.800.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	102.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	102.500.000
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	258.720.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	258.720.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	388.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	388.080.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	60	117.203.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	60	117.203.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	12.203.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	12.203.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	80.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	80.000.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	25.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	95	4.500.000.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	95	4.500.000.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50.000	4.500.000.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50.000	4.500.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	<i>Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim</i>	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	4.500.000.000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	<i>Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim</i>	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	4.500.000.000

II. 6. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPD adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disinkronkan pada forum perangkat daerah dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124
Telepon : (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382
Website : <http://perkebunan.kaltimprov.go.id> Email : disbun@kaltimprov.go.id

BERITA ACARA

**Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 050/1770/Sekrt-III/2023**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan arahan oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Ir. Ujang Rachmad, M.Si.
2. Penyampaian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 oleh Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ir. Asmirinda, MP.
3. Penyampaian dukungan dan masukan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono, SE.,ME.
4. Hasil pembahasan yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Agustina Rahmawati, S.Pi selaku Kepala Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.
5. Tanggapan, saran dan masukan dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 17 Maret 2023

Jam : 08.00 WITA s/d Selesai

Tempat : Hotel Grand Senyur Balikpapan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

MENYEPAKATI

- KESATU : Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan sub kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam
- KEDUA : LAMPIRAN II berita acara ini;
Daftar usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III
- KETIGA : berita acara ini;
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh seluruh pemangku kepentingan siap melaksanakan dan mensinergikan kegiatan
- KEEMPAT : pembangunan sub sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan tema Renja tahun 2024 *"Penguatan Peran Sub Sektor Perkebunan dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Daerah dan Nasional yang Berkelanjutan"*;
Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita
- KELIMA : cara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan
- KEENAM : Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 17 Maret 2023

Pimpinan Sidang,
Ptl. Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur


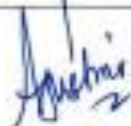

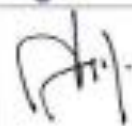

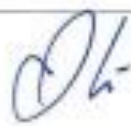



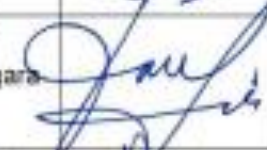



Ir. Asmirida, MP
Pembina Tingkat I

NIP. 19681019 199403 2 002

Menyetujui,

Wakil peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota


No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
1.	Nidya Listiyono, SE,ME	Ketua Komisi II DPRD Kaltim	Samarinda	
2.	Agustina Rahmawati, S.Pi	Bappeda Prov.Kaltim	Samarinda	
3.	Ir. Surono, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
4.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari, M.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
5.	Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
6.	Andi Siddik, S.P., M.Ling	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
7.	Eka Rini Elvianti, S.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
8.	Sopian, S.Sos., M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
9.	Suluh Dewanto, S.P	Disbun Prov.Kaltim	Samarinda	
10.	Ir. Muhammad Taufiq	Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	Kutai Kartanegara	
11.	Ir. Lita Handini	Dinas Perkebunan Kabupaten Berau	Berau	






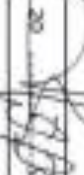


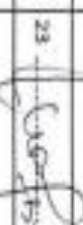







No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
12.	Ir. H. Sumarjana, MP	Dinas Perkebunan Kab. Kutai Timur	Sangata	
13.	F. Setianus.B	Dinas Pertanian Kutai Barat	Kutai Barat	
14.	Darmatasyah, SE	DP3 Kota Balikpapan	Balikpapan	
15.	Sumarno	Disbunak Kab. Paser	Paser	
16.	Dr. Fitriansyah, ST. MM	Balitbangda Prov. Kaltim	Samarinda	
17.	Pathur Rahman As'ad. S.Hut	Biro Perekonomian Sekretariat daerah Prov. Kaltim	Samarinda	
18.	H. Fadli, S.S.Sos.M.Si	DPKH Kaltim	Samarinda	
19.	Aji Syarifah Zulaiha, SP	DKPP Prov. Kaltim	Samarinda	
20.	Baihaqi Hazami	DESDM Prov. Kaltim	Samarinda	
21.	Abd. Rahman	Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan	Balikpapan	
22.	Dhaniswara D.W	BPKAD Prov. Kaltim	Samarinda	
23.	Bambang M.J. S.Hut	DLH Prov. Kaltim	Samarinda	
















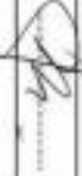



No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan/ Alamat	Tanda Tangan
24.	Tri Hastuti, SE.M.Si	DKP Prov. Kaltim	Samarinda	
25.	Ainun Mardiah	BPS Prov. Kaltim	Samarinda	
26.	Aswan Efendi, SP.MP	BPSIP/BPTP kaltim	Samarinda	
27.	Dr. Ir. Ibrahim, MP	TGUP3	Samarinda	
28.	Ir. Henny Herdiyanto, M.P	Badan Pengelola pangan untuk Penghijauan Kaltim (BP2UPK)	Samarinda	
29.	Ir. H. Yus Alwi Rahman, M.Si	Forum Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) Kaltim	Samarinda	
30.	Dedi Aspian Nur	GAPKI Kaltim	Samarinda	
31.	Tanti Subandiyah, S.Sos	Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim	Samarinda	

DAFTAR HADIR

TANGGAL : JUMAT, 17 MARET 2023
 TEMPAT : HOTEL GRAN SENTIUR BALIKPAPAN
 ACARA : FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA (RENUKA) DINAS PERKEBUNGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024


NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/L	TANDATANGAN	
1	Aji Syarifah Adhiko	Berikhytan' tad	Tyany P11	P	1 	
2	Eus Nuraidis	Latipgita	Stt Perencana	P		2 
3	Karnu,	DPP Kan Balikpapan	Stt PPP	P	3 	
4	Dermatasyah, St	DPS Kota Berau	Kasir. Berau	P		4 
5	Murtikus Ramea	Dinas Kurnae	Kasir. Berau	L	5 	
6	F. SETIKUS. B	DINAS KUBAR	SEKRETARIS	L		6 
7	Isauah' Haa	Dinas Kulbar	Sub. Kasir. Perencana	P	7 	
8	Bernyus Bendera	- - -	Provinsi Kalimantan Kau (Kubara)	L		8 
9	Jenu Suryata	"	"	L	9 	
10	Asah' Eferri	Dagip/ DPP Kalimantan	Puati DPP Berau	L		10 
11	Farbora	Dinas Berau	Bani Budaya	L	11 	
12	Ru. Zaida. H. U	Dinas Berau	Kasir. Berau	P		12 
13	Dessy Susnari	Dinas Berau	Stn Berau	P	13 	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/A	TAMBATANGAN	
14	ARIF-C	Distrik Roy.	Kepala distrik	L	14	
15	Hermana	Distrik Roy	Uraan	L	15	
16	Nur Afrilita			P	16	
17	AtMe	wa	leup	L	17	
18	Sugayem	Distrik Roy	Distrik Roy	L	18	
19	Hadis Faruqo	Distrik Roy	Kepala distrik	L	19	
20	Lita Hambrini	Distrik Roy	Kasir	P	20	
21	Usman Ardani	Distrik Roy	Kasir	L	21	
22	Syahrudin	Distrik Roy	Kasir	L	22	
23	Nisa-Ho	Distrik Roy	Kasir	L	23	
24	Suluh Dewanto	UPD Roy	Kasir	L	24	
25	Martin	"	Kasir	P	25	
26	Triana Hartadina	"	Kasir	P	26	
27	Anwar Mawardi	BPS Roy. Kab. Roy	Kasir	P	27	
28	Bahagi H.	Desa Roy	Kasir	L	28	
29	Rudi C-A	UPD Roy	Kasir	L	29	
30	M. Triana Hartadina	BPS	Kasir	L	30	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/L	TAMBATANGAN	
31	Abd Rahman.	Kementerian Peternakan	Staf PT.	L		
32	Dhed Dan P	BPPT	Manajemen	P		32 
33	Pratiwi	BPPT	Manajemen	L		
34	Erwaningsih	BPPT	Manajemen	P		34 
35	Wati	BPPT	Manajemen	L		
36	Marinda Asit P.	Disdik Prov.	Analisis Kebijakan Publik	P		36 
37	Sapri	UPD-PTP	Ka UPD PTP	L		
38	Anisa		Ka TV	P		38 
39	Leo		Staf	L		
40	Asri	BPPT	Manajemen	L		40 
41	M. Rati Nur Fauzi	Disdik Prov.	Staf	L		
42	Bambang M. Site	BPPT	Manajemen	L		42 
43	M. Cici Hani	BPPT	Manajemen	L		
44	Dedy A.	BPPT	Manajemen	L		44 
45	Eko Dwi. SP	BPPT	Ka UPD	P		
46	Hiloria F. SP	BPPT	UPD P	P		46 
47	Enak. SP	BPPT	Manajemen	P		

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/L	TANDATANGAN	
48	Yayanis	PEP	Ko m	P		48
49	Hendri	gk. lnt.		L	49	
50	Andi Sidihi	PPH		L		50
51	John Laurens	Disdis lntes	frp	L	51	
52	Perry Leonard	Dron lntes	Spax	L		52
53	Ir. H. M. Taufik	laktibun	laktis	L	53	
54	Mus Alim R	form lntes	Kelu lntes	L		54
55	Gustafar	form		L	55	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/L	TANDATANGAN	
56	Heung H	BPZ	Anggota Swat	L	56	
57	Fahman	Swat	Swat	P	57	
58	Mantari Andini	Edut karis & swat	Swat	P	58	
59	Gumariem	Orisk Swat		L	59	
60	Jaka S	Dahm kudin	Recear	L	60	
61	Ti Hastik	Dikp Sw. Kalk	Kasatag Perseman Ang	P	61	
62	Polly		Ang	P	62	
63	Afri Kasruka		Swat	L	63	
64	Fajradin Kante Widy	FPB Kanti	Nalin	L	64	
65	Agustin P	Pangpeds		P	65	
66	Bayu Kip			L	66	
67	Yogi Gwars Dyo	DPKH		L	67	
68	Ka Pratikno	DPKH		L	68	
69	Prananta M. J	DPKH		L	69	
70	I. G. Mada Jaya A	Dinas PKH	TA	L	70	
71	Ilyan Nisa	-1-	Endang Pung JP PKH	L	71	
72	Sumarno	Disbunt pater		L	72	

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	P/L	TANDATANGAN	
73	Muzi Brakmana	Pisthank	Jateng Provinsial B. Prt		73 	
74	Wellyana D.S	Pipa			74 	
75	M. Adhwar Akbar	Pure	Snat		75 	
76	Ficky Yosi A	ODPI Kaltan	Agrens		76 	
77	Agrover M.C	NDP: kalbar	kommunikasi		77 	
78	Pantea Rachma N.A	Bia Puncawari Sada	Agrens Png. Hupa		78 	
79	Agrover M.C	Bia Puncawari Sada	Agrens. Hupa		79 	
80	TRITI SUBIRDAYAH	DIPITS PANGRI TPH	PERENC. AHLI MUDH		80 	
81					81	
82					82	
83					83	
84					84	
85					85	
86					86	
87					87	
88					88	
89					89	

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/1770/SEKRT-III/2023
TANGGAL : 17 MARET 2023

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2024 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
	DINAS+3 UPTD				68.735.749.000	70.335.749.000
	DINAS PERKEBUNAN				58.721.155.000	60.321.155.000
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	78,93	84,88	29.887.316.800	31.753.932.980
01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	2.937.513.700	1.939.416.600
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	2.156.320.100	923.172.900
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	781.193.600	1.016.243.700
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	16.042.897.400	17.442.288.930
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	64	64	15.568.093.400	16.920.004.530
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	474.804.000	522.284.400
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35,71	59,52	330.050.000	318.055.000
01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	130.050.000	143.055.000
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	15	10	200.000.000	175.000.000
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	4	2.325.482.100	2.426.267.790
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	50.000.000	55.000.000
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	245.000.000	350.000.000
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	465.693.200	450.000.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	54.123.300	59.535.630
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	10.665.600	11.732.160
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1.500.000.000	1.500.000.000

01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	13	2.684.056.820	3.850.675.702
01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5	3	1.500.000.000	1.500.000.000
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	3	650.000.000	1.500.000.000
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	67	50	534.056.820	850.675.702
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	4.095.538.520	4.613.016.372
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	34.331.000	37.764.100
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ynag disediakan (Laporan)	1	1	571.703.000	628.873.300
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	629.160.000	800.000.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	2.860.344.520	3.146.378.972
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	90	1.471.778.260	1.164.212.586
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	21	23	340.193.260	374.212.586
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	960.865.000	600.000.000
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	20	20	170.720.000	190.000.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,36	25,41	19.552.056.400	20.287.620.260
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis (ton/Ha)	13	13,5	19.552.056.400	20.287.620.260
3.27.02.1.01.	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	19.552.056.400	20.287.620.260
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50.702	49.000	600.000.000	650.000.000
3.27.03.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas (Ha)	445	445	600.000.000	650.000.000

3.27.03.1.01.	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	600.000.000	650.000.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Area Yang Terdampak Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Ha)	40	40	3.126.533.100	2.892.006.770
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	200	225	3.126.533.100	2.892.006.770
		- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK (Pelaku Usaha)	195	215		
		- Jumlah penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	5	10		
3.27.05.1.01.	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	6.000	6.000	2.050.000.000	1.905.660.370
3.27.05.1.01.	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan. dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	725	1.076.533.100	986.346.400
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	40	40	1.395.421.100	1.182.142.850
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	65	65	1.395.421.100	1.182.142.850
3.27.06.1.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	2	1.395.421.100	1.182.142.850
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	32,5	22,86	4.159.827.600	3.555.452.140
		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan (%)	81,08	81,08		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	1	706.460.200	306.784.700
3.27.07.1.01.	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan (orang)	40	20	706.460.200	306.784.700
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	412	412	1.545.986.400	1.421.286.440
		- Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya (orang)	400	400		

		- Jumlah pekebun yang menerapkan inovasi pertanian (orang)	12	12		
3.27.07.1.02.	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1	953.000.400	828.300.440
3.27.07.1.02.	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	20	20	592.986.000	592.986.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	16	16	1.907.381.000	1.827.381.000
3.27.07.1.03.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	1	670.921.000	670.921.000
3.27.07.1.03.	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani (Laporan)	1	1	1.000.000.000	920.000.000
3.27.07.1.03.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1	1	236.460.000	236.460.000
	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)				2.786.334.000	2.786.334.000
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	85,7	86,2	1.731.871.000	1.710.474.000
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84.960.000	84.960.000
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84.960.000	84.960.000
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59	62	183.600.000	183.600.000
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	10	10	183.600.000	183.600.000
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	1	532.171.100	498.571.100
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	4.055.500	4.055.500
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	118.678.800	118.678.800
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	51.936.000	51.936.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	7.744.000	7.744.000
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	7.756.800	7.756.800
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	342.000.000	308.400.000

01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	2	50.000.000	50.000.000
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	-	-	-	-
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	50.000.000	50.000.000
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	667.823.900	667.823.900
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	5.000.000
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ynag disediakan (Laporan)	1	1	131.683.200	131.683.200
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	323.400.000	323.400.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	207.740.700	207.740.700
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	55	50	213.316.000	225.519.000
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	2	2	24.406.000	36.609.000
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	4	149.000.000	149.000.000
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	13	39.910.000	39.910.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6.000.000	6.000.000	1.054.463.000	1.075.860.000
3.27.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Laporan)	1	1	1.054.463.000	1.075.860.000
3.27.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	150	559.543.000	589.191.000
3.27.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1	1	494.920.000	486.669.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				-	-
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian (Unit)	-		-	-

3.27.03.1.02.	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya (DAK)	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun. Dipelihara dan Direhabilitasi (Unit)	-		-	
	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)				2.806.731.000	2.806.731.000
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	79	83,75	1.822.937.800	1.822.937.800
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84.960.000	84.960.000
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84.960.000	84.960.000
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	35	53	93.960.000	93.960.000
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal (orang)	6	6	93.960.000	93.960.000
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	1	405.610.200	405.610.200
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	9.081.300	9.081.300
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	55.611.500	55.611.500
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	41.088.000	41.088.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	21.151.000	21.151.000
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	3.878.400	3.878.400
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	274.800.000	274.800.000
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	14	7	593.188.320	593.188.320
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	2	383.097.600	448.425.600
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	20	10	210.090.720	144.762.720
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	521.213.280	521.213.280
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.200.000	5.200.000
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	178.912.800	178.912.800

01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	129.360.000	129.360.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	207.740.480	207.740.480
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	70	124.006.000	124.006.000
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	1	1	12.203.000	12.203.000
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	10.203.000	10.203.000
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	10	101.600.000	101.600.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Luas Lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi akibat serangan OPT (Ha)	1.000	1120	983.793.200	983.793.200
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	25	28	983.793.200	983.793.200
3.27.05.1.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	1.000	1.120	983.793.200	983.793.200
	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)				4.421.529.000	4.421.529.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	80	82,75	1.178.326.110	1.178.326.110
01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84.960.000	84.960.000
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84.960.000	84.960.000
01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	40	50	77.067.000	77.067.000
01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	6	77.067.000	77.067.000
01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	1	379.500.000	379.500.000
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	8.000.000	8.000.000
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	75.000.000	75.000.000

01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	33.500.000	33.500.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	25.000.000	25.000.000
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.000.000	3.000.000
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	235.000.000	235.000.000
01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	-	-	-	-
01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-
01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-
01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-
01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	561.015.600	561.015.600
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.800.000	4.800.000
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	102.500.000	102.500.000
01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	194.040.000	194.040.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	259.675.600	259.675.600
01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	60	65	75.783.510	75.783.510
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	12.203.000	12.203.000
01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	3	38.580.510	38.580.510
01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	3	25.000.000	25.000.000

3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	95	96,5	3.243.202.890	3.243.202.890
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman (Laporan)	1	1	3.243.202.890	3.243.202.890
3.27.02.1.02.	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	2	2	3.243.202.890	3.243.202.890

LAMPIRAN III : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAERAH
NOMOR : 050/1770/SEKRT-III/2023
TANGGAL : 17 MARET 2023

DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN BIDANG/UPTD					
UPTD PBP					
1	Sertifikasi benih (kegiatan)	Seluruh Kab/Kota di Wil. Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	1	Untuk memberikan legalitas terhadap benih yang akan diedarkan gar terjamin mutunya	
2	Pengujian Mutu Benih (kegiatan)	Semua Kab/Kota (khususnya Kab. Kutai Timur)	1	Untuk mengetahui mutu benih dalam bentuk biji baik mutu fisik, fisiologis mapun kesehatan benih	
3	Persiapan uji kompetensi produsen benih (kegiatan)	Kab. Paser	1	Untuk meningkatkan kompetensi SDM produsen benih kelapa sawit yang ada di Kab Paser guna mendukung Major Project	
4	Sosialisasi perbenihan tanaman perkebunan (KUD/Poktan)	Kab. Paser	5	Untuk memberikan informasi terkait penggunaan benih bersertifikat dan berlabel guna mendukung Major Project	
5	Monitoring dan Evaluasi IUPBTP (Kegiatan)	Samarinda, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser	1	Untuk mengevaluasi produsen benih terkait keaktifannya dalam kegiatan perbenihan tanaman perkebunan	
6	Sosialisasi Peredaran Benih ilegal	Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Berau	120 orang	Masih banyak peredaran benih ilegal kelapa sawit	
		Kab. Paser	5		MP
7	Identifikasi Kebun Sumber Benih dan Penetapan Kebun Sumber Benih	Kab. Kutai Barat	1 Ha (kopi)	Poktan Kola Lestari banyak menanam kopi dengan produksi buah yang bagus sehingga layak untuk dijadikan benih.	
		Kab. Berau	1 Ha (Kakao)	Sentra Tanaman kakao yang bisa dijadikan sumber benih kakao	
8	Evaluasi Kebun Sumber Benih	Kabupaten / Kota se Kaltim dan Prov. Kaltara	1 kegiatan	Untuk Menentukan Layak atau tidak layaknya Kebun Sumber Benih	
				Adanya MOU Distan Prov.Kaltara dengan Disbun Prov. Kaltim	
9	Pengawasan Peredaran Benih dan Pelestarian Plasma Nutfah	Kabupaten / Kota se Kaltim	1 Kegiatan	Untuk mengurangi peredaran benih ilegal	
UPTD P2TP					
10	Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman	Balikpapan, Samarinda, Bontang, PPU dan Mahakam Ulu	5 Regu	Kabupaten lain sudah dilakukan Bimtek tahun sebelumnya	
11	Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT	Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Mahakam Ulu	4 Regu	Belum dibentuk di 4 lokasi tersebut	
12	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan BPT dan RPO	Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat	4 Regu	Pembinaan untuk yang sudah di bentuk tahun sebelumnya	
13	Demonstrasi Plot Aplikasi APH	Paser	1 kelompok	Pelatihan untuk regu pengendali OPT	Pelaksanaan Demplot Tahun ketiga
14	Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pesnab	Kutai Timur	1 kelompok	Pelatihan untuk regu pengendali OPT	Sasaran Kelompok adalah Regu Pengendali OPT setempat
15	Pelatihan Perbanyakan APH	Kutai Barat		Pelatihan untuk regu pengendali OPT	Sasaran Kelompok adalah Regu Pengendali OPT setempat
Bidang Pengembangan Komoditi					
16	INTENSIFIKASI KELAPA SAWIT 300 HA	Kec. Sangkulirang Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Luas Usulan 50 Ha Proposal belum ada
		Poktan Jarum Mandiri Kec. Muara Leka Kab. Kukar	75	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Poktan Jarum Mandiri untuk pengembangan 2023 di batalkan masuk dalam HGU JMS
		Poktan Kebun Makmur Desa Argomulyo Kec. Sepaku Kab. PPU	75	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Proposal Belum ada
		Desa Krayan Makmur Kec. Long Ikis Kab. Paser	75	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Luas usulan 202 Ha pada 4 KT, Proposal belum ada
		Kec. Bongan dan Jempang Kab. Kubar	50	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam kegiatan Pengembangan Disbun tahun 2019	Luas Usulan 100 Ha Proposal belum ada
		Kab. Berau	-	Usulan Pertemuan Teknis, tidak termasuk dalam masterplan namun ada pengembangan secara swadaya	Luas usulan 100 Ha, masih dikoordinasikan ke pimpinan proposal belum ada
		Poktan Subur Makmur Kel. Bentuas Kota Samarinda	-	Usulan Pertemuan Teknis, tidak termasuk dalam masterplan namun ada pengembangan secara swadaya	Luas usulan 11 Ha, Proposal belum ada
17	PERLUASAN KELAPA SAWIT 100 HA	Kec. Karangan Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Luas Usulan 50 Ha Proposal belum ada

		Kab. Kukar : - Poktan Karya Bersama Desa Prian Kec. Muara Muntai, - Poktan Sawit Berkah Desa Santan Ilir Kec. Marangkayu, dan - Poktan Bina Jaya Desa Tuana Tua Kec. Kenohan	25	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Luas Usulan 50 Ha Proposal belum ada
		Poktan Suka Maju Kab. PPU	25	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Proposal Belum ada
		Desa Tebru, Pasir Damai Kab. Paser	25	Usulan Pertemuan Teknis dan masuk dalam wil. Pengembangan masterplan disbun tahun 2020	Luas usulan 39 Ha, Proposal belum ada
		Kamp. Lendian Permai Kec. Siluq Ngurai, Poktan Sawit Permai dan Poktan Maju II Kec. Damai Kab. Kubar	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 85 Ha, Proposal belum ada
18	INTENSIFIKASI KARET 300 HA	Poktan Tunas Harapan Kab. Kukar	100	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 15 Ha, proposal belum ada
		Kab. Kubar : - Poktan Hendeh Kedap Kamp. Tering Lama Ulu, - Poktan Sinar Harapan I Kamp. Tering Kec. Kampung Baru, - Poktan Insan Mekar Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat, dan - Poktan Cahaya Nur Kamp. Sekolaq Joleq	100	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 100 Ha, proposal belum ada
		Poktan Tani Maju Kec. Bentuas Kota Samarinda	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 30 Ha, proposal belum ada
		Poktan Tani Melati Kec. Bukit Pinang Kota Samarinda	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 3,5 Ha, proposal belum ada
		Poktan Rawa Bakung Kec. Bukit Pinang Kota Samarinda	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 7,5 Ha, Proposal belum ada
		Poktan Pinang Raya kec. Bukit Pinang Kota Samarinda	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 4,5 Ha, proposal belum ada
		Kec. Long Mesangat Kab. Kutai Timur	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Desa Tempakan Kab. Paser	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 59 Ha, proposal belum ada
		Desa Busui Kab. Paser	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 30 Ha, proposal belum ada
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 50 Ha, proposal belum ada
		Kota Balikpapan	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih dikoordinasikan
19	PEREMAJAAN KARET 300 HA	Kab. Kukar	150	Usulan Pertemuan Teknis	Masih dikoordinasikan
		- Poktan Berkat Usaha I Kec. Barong Tongkok, - Poktan Berkat Usaha II, - Poktan Berkat Usaha III, - Poktan Berkat Usaha IV Kab. Kubar	150	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 300 Ha, Proposal belum ada
		Kec. Long Mesangat Kab. Kutim	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Berau	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih dikoordinasikan
20	PERLUASAN KARET 100 HA	Poktan Lempake Jaya Desa Jembayan Dalam Kab. Kukar	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 20 Ha, proposal belum ada
		- Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat, - Kamp. Sekolaq Muliaq, - Kamp. Sekolaq Joleq Kab. Kubar	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 100 Ha, proposal belum ada
		Paser	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih dikoordinasikan
21	INTENSIFIKASI KAKAO 100 HA	Poktan Sejahtera Kec. Kaibun Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
		KWT. Sumber Rejeki Desa Sumber Sari Kec. Kota Bangun Kab. Kukar	20	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 20 Ha, proposal belum ada
		Kampung Gunung Tabur Kab. Berau	30	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
		Kampung Muara Mujan dan Kampung Tering Lama Kab. Kubar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
22	PEREMAJAAN KAKAO 50 HA	Kec. Busang Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada, masih dikoordinasikan
23	PERLUASAN KAKAO 100 HA	Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada, masih dikoordinasikan
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada, masih dikoordinasikan
		Kab. Kukar	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih dikoordinasikan

		Poktan Mambes II, Poktan Mambes III, Poktan Mambes IV, dan Poktan Maju Makmur Kab. Mahulu	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 70 Ha, proposal belum ada
		Poktan Datai Harum Kec. Nyuatan dan Poktan Lakang Bilem Kec. Nyuatan Kab. Kubar	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
24	INTENSIFIKASI LADA 250 HA	Kab. Kukar	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Poktan Sumber Urip, Poktan Sumber Wangi, dan poktan Dewi Sri A Kab. PPU	75	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Kab. Berau	100	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 50 Ha, proposal belum ada
		Kota Balikpapan : - Poktan harapan Sejahtera Kel. Karang Joang - Poktan Agri Sejahtera Kel. Teritip - Poktan Jalan Beimbai Kel. Teritip - Poktan Bunga Salak Kel. Karang Joang - Poktan Mentari Jaya Kel. Lamaru	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
25	REHABILITASI LADA 50 HA	Kab. Kukar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
26	PERLUASAN LADA 50 HA	Kab. Kukar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kec. Batu Ampar Kab. Kutim	-	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 15 Ha, proposal belum ada
27	INTENSIFIKASI KELAPA 150 HA	Poktan Kelapa Remaja Kel. Muara Jawa Ilir Kab. Kukar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Kamp. Tubaan dan Kec. Biduk Kab. Berau	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
		Kec. Jempang dan Kec. Bongang Kab. Kubar	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 50 Ha, proposal belum ada
		Kel. Pejala Kab. PPU	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 25 Ha, proposal belum ada
		Kab. Paser	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
	PEREMAJAAN KELAPA 100 HA	Kab. Kukar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas usulan 25 Ha, proposal belum ada, masih dikoordinasikan
		Kab. PPU	50	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Kutim	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
28	INTENSIFIKASI PALA 50 HA	Kamp. Teluk Sumbang dan Kamp. Batu-Batu Kab. Berau	50	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 50 Ha, proposal belum ada
	PERLUASAN PALA 50 HA	Kab. Berau	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Kubar	25	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
29	INTENSIFIKASI AREN 25 HA	Kab. Kubar	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kec. Kaliorang Kab. Kutim	25	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 25 Ha, proposal belum ada
	PERLUASAN AREN 25 HA	Kab. Kubar	10	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
		Kab. Kutim	15	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
30	PERLUASAN KOPI 20 HA	Kamp. Kopi Luwak Kec. Marangkayu Kab. Kukar	10	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 10 Ha, proposal belum ada
		Poktan Tora Lestari Kec. Tering dan Kamp. Linggang Melapeh Kab. Kubar	10	Usulan Pertemuan Teknis	Luas Usulan 20 Ha, proposal belum ada
		Kab. Berau	-	Usulan Pertemuan Teknis	Masih Dikoordinasikan
	Bidang Perkebunan Berkelanjutan				
31	Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan	Kabupaten Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Paser, PPU, Samarinda, Balikpapan	8 Kab/Kota	Untuk melakukan perlindungan lahan dan air agar kondisi lahan perkebunan yang ada tidak mengalami degradasi	
32	Inventarisasi dan Monitoring Area Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) Di Area Perkebunan	Kabupaten Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, Paser, PPU	7 Kab	Untuk mengetahui pengelolaan ANKT di pelaku usaha guna mendukung mayor project	
33	Pertemuan Teknis/Koordinasi ANKT Di Area Perkebunan	Samarinda/Paser	1 pertemuan	Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman antar pihak terkait dalam perlindungan ANKT di area perkebunan untuk mendukung mayor project	
34	Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun	Kabupaten Paser, Kukar, Kutim, Berau, Kubar, PPU	6 kegiatan	Untuk mendukung percepatan Sertifikasi ISPO guna mendukung mayor project	
35	Pertemuan Tim Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)	Balikpapan	1 Pertemuan	Untuk mensinkronisasi dan evaluasi dalam pelaksanaan RAD KSB	
36	Desiminasi dan Monitoring Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT	Kabupaten Kutim, Kukar, Paser, Berau	12 Kali	Untuk mengetahui pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT guna mendukung mayor project	

37	Pertemuan/FGD Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT	balikpapan	1 kali	Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT guna mendukung mayor project	
38	Kajian Pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT	Kabupaten Berau, Kutim, Kukar, Kubar, Mahulu, Paser, PPU	7 Kab	Untuk mengetahui potensi pemanfaatan Limbah PKS Untuk EBT guna mendukung mayor project	
39	Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)	PPU, Paser, Kutim, Kubar, Kukar	5 Kab	Untuk pencegahan terjadinya kebakaran lahan dan kebun di tingkat tapak untuk mendukung mayor project	
40	Bimtek Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Balikpapan	1 Kali	Meningkatkan kapasitas brigade/ KTPA/Perusahaan dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun	
41	Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dan Monitoring Sapras Dalkarlabun	Samarinda, Balikpapan, Berau, Mahulu, Bontang, PPU, Paser, Kutim, Kubar, Kukar	10 Kab/Kota	Untuk melakukan pengendalian kebakaran lahan dan kebun bila terjadi kebakaran dan untuk mengetahui ketersediaan sapras dalkarlabun	
42	Bantuan Sapras KTPA dan Brigade Kabupaten/Kota	Berau, Mahulu, Paser, Kubar, Kutim, Kukar	6 Unit	Untuk mendukung pelaksanaan operasional pengendalian kebakaran lahan dan kebun	
Bidang Pengolahan dan Pemasaran					
43	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Samarinda, Kukar, Dalam Provinsi Kaltim dan Luar Kaltim	1 tahun	1.Meningkatkan kualitas produk melalui penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan 2. Meningkatkan efisiensi produksi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, dan energi 3. Memenuhi target PAD Kaltim dengan pengelolaan kebun aren, karet, dan kopyor Pemprov. Kaltim serta pengolahan produk olahannya	
44	Diseminasi, Pembinaan, dan Inovasi Pertanian	Paser, PPU, Kukar, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Berau, Kubar	1 tahun	1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan melalui penggunaan teknologi dan praktik terbaik 2. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi produk sehingga dapat memenuhi permintaan pasar yang beragam 3. Meningkatkan daya saing produk	
45	Workshop dan Diversifikasi Olahan Komoditas Perkebunan	Paser, PPU, Kukar, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Berau, Kubar	1 tahun	1. Meningkatkan nilai tambah produk perkebunan 2. Mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk dan berkreasi menghasilkan produk olahan baru 3. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dalam mengolah produk perkebunan	Salah satu lokasi kegiatan di Kab, Paser yang merupakan lokus pengembangan korporasi petani yang ada di Major Project RPJMD 2024-2026
46	Pendampingan Korporasi Petani	Paser, PPU, Kukar, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Berau, Kubar	1 tahun	1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian yang diusahakan petani 2. Meningkatkan keberlanjutan pertanian melalui pelatihan mengelola lahan pertanian secara berkelanjutan 3. Meningkatkan hubungan antara korporasi dan petani 4. Meningkatkan akses pasar dengan memberikan pendampingan akses ke pasar yang lebih luas dan lebih stabil 5. Meningkatkan pendapatan petani	
47	Pembinaan dan Pendampingan Kelembagaan Petani	Paser, PPU, Kukar, Kutim, Samarinda, Balikpapan, Berau, Kubar	1 tahun	1. Meningkatkan daya saing petani: Dengan adanya kelembagaan petani yang kuat, petani dapat berkolaborasi dalam memperoleh bahan baku dan menjual hasil pertanian secara bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar 2. Memperkuat posisi tawar petani: Dengan adanya kelembagaan petani yang kuat, petani dapat memperkuat posisi tawar mereka dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok pertanian, seperti pemasok bahan baku, pabrik pengolahan, dan pedagang 3. Meningkatkan keberdayaan petani: Dengan adanya pembinaan dan pendampingan kelembagaan petani, petani dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam membangun kelembagaan yang lebih kuat dan lebih mandiri. Hal ini dapat meningkatkan keberdayaan petani dalam mengelola usaha pertanian mereka dan meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya yang dibutuhkan 4. Meningkatkan kesejahteraan petani: Kelembagaan petani yang kuat dapat membantu petani dalam mengakses sumber daya dan peluang ekonomi yang lebih baik	Poktan, UPPB, MPIG, Kelompok Usaha Bersama

48	Promosi dan Pemasaran Komoditi Perkebunan	Dalam dan Luar Kaltim	1 tahun	<p>1. Meningkatkan nilai tambah: Dengan promosi dan pemasaran yang baik, komoditi perkebunan dapat dikenal oleh konsumen, sehingga nilai tambah dari produk akan meningkat. Konsumen akan lebih mudah memahami keunggulan produk dan membayar lebih untuk produk yang berkualitas.</p> <p>2. Memperluas pasar: Dengan promosi dan pemasaran yang baik, pasar yang tersedia untuk produk perkebunan akan semakin luas. Produk dapat dipasarkan di berbagai daerah dan negara, sehingga meningkatkan jumlah konsumen dan potensi penjualan.</p> <p>3. Meningkatkan daya saing: Promosi dan pemasaran yang baik dapat membantu meningkatkan daya saing produk perkebunan dengan produk-produk sejenis. Konsumen akan memilih produk yang paling menarik dan paling berkualitas, sehingga produk yang dipasarkan dengan baik akan lebih unggul dibandingkan dengan produk lain.</p> <p>4. Meningkatkan kesejahteraan petani: Dengan promosi dan pemasaran yang baik, harga jual komoditi perkebunan dapat meningkat, sehingga pendapatan petani yang menghasilkan komoditi tersebut juga dapat meningkat. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan</p>	Fasilitasi promosi dan perluasan akses pemasaran pada 6 komoditi unggulan di Kaltim (Kelapa sawit, karet, lada, kakao, aren, kelapa dalam) dan 2 komoditi potensial (kopi dan kopyor)
49	Kerjasama dengan Sumber Benih		1 Paket	Melakukan kerjasama dengan sumber benih	
	- Kelapa Sawit	BSM, Palembang			
	- Karet	Sembawa, Palembang			
	- Lada	Loa Janan, Kutai Kartanegara			
	- Kakao	Puslit Koka, Jember			
	- Kelapa Dalam	Muara Jawa, Kutai Kartanegara			
	- Kopi	Puslit Koka, Jember			
	- Aren	Kandolo, Kutai Timur			
	- Pala	BBP2TP Ambon			
50	Pengembangan dengan Sumber Benih Kab/Kota		1 Paket	identifikasi potensi produksi dan pengembangan benih tanaman perkebunan	
	- Kelapa Sawit	Paser, Kutai Kartanegara			
	- Karet	Kutai Barat, Kutai Timur, Paser, Balikpapan, Mahulu			
	- Lada	Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara			
	- Kelapa	Kutai Kartanegara, PPU			
	- Kakao	Berau, Kutai Timur, Mahulu			
	- Kopi	Kutai Kartanegara, Mahulu			
	- Pala	Berau			
	- Aren	Samarinda, Kutai Timur, Kutai Kartanegara			
51	Koordinasi Identifikasi dan Mediasi Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Kukar, Kutim, Berau, Paser, PPU	6 kegiatan	<p>1. Sampai Tahun 2023 jumlah konflik perkebunan tercatat sebanyak 42 kasus yang harus segera ditangani dan dicarikan solusi penyelesaiannya yang salah satunya melalui mediasi</p> <p>2. Konflik sektor perkebunan menjadi persoalan yang mendesak untuk segera dicarikan solusi, sebab penundaan penyelesaian akan berakibat pada lemahnya proses penegakan hukum, investasi ekonomi, dan kondisi sosial yang semakin tidak menentu</p>	
52	Pertemuan Koordinasi Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Balikpapan	1 kegiatan	<p>1. Untuk menyamakan persepsi gerak dan langkah serta kebijakan dalam penanganan konflik perkebunan se kaltim</p> <p>2. Untuk menghimpun data jumlah konflik di masing masing kabupaten se kaltim dan proses penangananannya</p>	
53	Pertemuan Koordinasi Usaha Perkebunan	Balikpapan	1 kegiatan	<p>1. Dalam rangka menentukan arah dan kebijakan serta rencana kerja terhadap pembangunan usaha perkebunan antara dinas yang membidangi perkebunan kab se kaltim dengan Disbun prov kaltim</p> <p>2. Mencarikan solusi atas permasalahan-permasaahan usaha perkebunan di kalimantan Timur</p>	
54	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Lanjutan	Balikpapan	1 kegiatan	1. Untuk memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha dalam penyampaian pelaporan perkembangan usaha perkebunan melalui SIP Kebun	
55	Pertemuan Rekonsiliasi Data PBS	Balikpapan	1 kegiatan	1. Dalam rangka menyamakan data pembangunan usaha perkebunan oleh perusahaan perkebunan se kalimantan Timur antara dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dengan Disbun provinsi	

56	Pertemuan Evaluasi Hasil Pembangunan Usaha Perkebunan	Balikpapan	1 kegiatan	1. Di Kalimantan Timur terdapat 303 perusahaan perkebunan yang perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerjanya melalui Penilaian PUP 2. Pelaksanaan PUP dilaksanakan oleh Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dan hasilnya dilaporkan kepada Disbun Provinsi melalui Pertemuan Evaluasi Hasil PUP	
57	Pertemuan Pembinaan Kemitraan	Kukar, Kutim, Berau, Paser, PPU dan Kubar	6 kegiatan	1. Masih banyaknya Kelompok Tani/Koperasi yang belum bermitra sesuai Permentan No 1 Tahun 2018 2. Dalam rangka untuk mendorong para pekebun untuk segera melakukan kemitraan dengan perusahaan perkebunan	
	USULAN KABUPATEN/ KOTA				
	Kabupaten Paser				
	Intensifikasi Tanaman Sawit	Desa Kerayan Makmur	202 Ha		
	Ektensifikasi Tanaman Kelapa Sawit	Desa Tebru Paser Damai	39 Ha		
	Intensifikasi Karet	Desa Tampakan	28 Ha		
		Busui	30 Ha		
		Mendik Karya	31 Ha		
	Kelapa Dalam	Desa Laburan	20 Ha		
	Kabupaten Berau				
	Intensifikasi Kelapa Sawit	Harapan Tani (25 Ha), Dasar Maju Jaya (25 Ha), Sanggam Berkah (25 Ha), dan Naik Bersama (25 Ha) Kampung Teluk Semanting	100 Ha		
	Intensifikasi Karet	Gapoktan Usaha Bersama (75 Ha) Kampung Sido Bangen	50 Ha		
	Intensifikasi Kakao	Maju Bersama 24 Ha, Rantau Jaya 16 Ha (Kampung Melati Jaya)	50 Ha		
	Peremajaan Kakao	Poktan Padai Mudong, Poktan Musang Bawan (Kampung Merasa)	25 Ha		
	Ektensifikasi/Perluasan Kakao	Poktan Bukit Harapan (15 Ha) Kp. Sukan Tengah, Poktan Tunas Mekar 2 (15 Ha) Kampung Pesayan	30 Ha		
	Intensifikasi Lada	Bukit Harapan Sukan Tengah (12 Ha), Jaya Kasih (13 Ha) Kel Sambaliung	25 Ha		
	Intensifikasi Kelapa	Sabar Subur (14 Ha), Maju Jaya (27 Ha), Makmur Lestari 9 (Kampung Melati Jaya)	50 Ha		
	Peremajaan Kelapa	Poktan Bina Bahari (Kampung Biduk-biduk)	25 Ha		
	Intensifikasi Pala	Mitra Tani Teluk Sumbang	50 Ha		

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi serta alih fungsi lahan pertanian yang semakin bertambah. Permasalahan di sektor pertanian dan pangan bisa di kategorikan sebagai berikut:

1. Pemenuhan pangan dan kecukupan gizi;
2. Defisit perdagangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan;
3. Status dan luas kepemilikan lahan;
4. Pendidikan dan usia petani;
5. Kemiskinan pedesaan;
6. Dampak disrupsi revolusi industri 4.0;
7. Dampak perubahan iklim (DPI); dan
8. Keterbatasan akses pembiayaan bagi petani.

Sedangkan dalam pembangunan perkebunan tantangan yang harus dihadapi antara lain:

1. Liberalisasi perdagangan global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/multilateral/regional lainnya);
2. Kondisi perekonomian global yang menimbulkan gejolak harga dunia (implikasi negatif era pasar bebas ASEAN/AEC 2015);
3. Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan daya saing komoditas);
4. Perubahan iklim akibat pemanasan global (implikasi terhadap munculnya bencana alam dan peningkatan serangan OPT);
5. Dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (implikasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan);

6. Tingginya tingkat permintaan akibat ledakan jumlah penduduk dan urbanisasi (implikasi terhadap ketersediaan bahan baku); dan
7. Aspek distribusi/pengangkutan dan pemasaran (implikasi dari globalisasi produksi dan pasar).

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **"Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan pertanian tahun 2020-2024, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah **"Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia"**.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan 7 misi pembangunan nasional di antaranya adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat 5 (lima) arah kebijakan yang menjadi koridor perumusan strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut:

a) Arah kebijakan 1: Terjaganya ketahanan pangan nasional Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Upaya menjaga ketahanan pangan nasional dilaksanakan melalui strategi:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas pangan strategis;
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional;
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
4. Pengembangan dan Penguatan Sistem Perbenihan;
5. Perlindungan Tanaman dari OPT dan DPI;

6. Memperpendek rantai pasok;
7. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
8. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian; dan
9. Inovasi pertanian bioindustry.

b) Arah kebijakan 2: Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian
Nilai tambah pertanian menggambarkan kemampuan industri pertanian untuk menciptakan pendapatan baik bagi pelaku usaha pertanian, pendapatan wilayah maupun pendapatan nasional. Peningkatan nilai tambah pertanian diharapkan juga dapat mendongkrak daya saing pertanian Indonesia. Peningkatan daya saing pertanian menunjukkan peningkatan inovasi pertanian guna menciptakan keunggulan komoditas pertanian Indonesia terhadap komoditas pertanian negara lain. Upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing dilaksanakan melalui strategi:

1. Peningkatan pemasaran dan investasi;
2. Penerapan standarisasi dan mutu hasil;
3. Penerapan teknologi pascapanen dan pengolahan;
4. Peningkatan Nilai Tambah produk pertanian;
5. Penguatan sistem perkarantina;
6. Digitalisasi dan percepatan perikanan; dan
7. Pengembangan industri pertanian berbasis kawasan.

c) Arah kebijakan 3: Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian dan tersedianya prasarana dan sarana pertanian
Keberlanjutan merupakan isu internasional yang secara serentak di implementasikan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Keberlanjutan sumber daya pertanian yaitu menjamin ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan pertanian hingga masa mendatang dan memastikan generasi selanjutnya masih dapat menyelenggarakan pertanian. Kebutuhan penyelenggaraan pertanian didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sebagai kebutuhan dasar infrastruktur pertanian, meliputi air, lahan, pupuk dan pestisida, pembiayaan, serta alat dan mesin pertanian. Kebutuhan dasar tersebut menjadi enabler dalam mencapai target produksi komoditas strategis nasional. Upaya menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian, serta menjaga ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dilaksanakan melalui strategi :

1. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
2. Pengelolaan air untuk pertanian secara berkesinambungan;
3. Pengembangan Mekanisasi Pertanian;
4. Meningkatkan akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian;
5. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan produktivitas pertanian; dan
6. Penerapan teknologi untuk pengembangan sumber daya lahan.

d) Arah kebijakan 4: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian
Sumber daya manusia pertanian adalah salah satu modal utama penyelenggaraan pertanian. Peningkatan kualitas bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM pertanian. Peningkatan kompetensi SDM pertanian diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja sektor pertanian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian dilaksanakan melalui strategi:

1. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian;
2. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian;
3. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
4. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional;
5. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi; dan
6. Penguatan kelembagaan petani.

e) Arah kebijakan 5: Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima Implementasi Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 bertema “Pemerintahan Berkelas Dunia” dimana diharapkan penyelenggaraan birokrasi di Indonesia akan lebih akuntabel, profesional dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap individu yang menjadi bagian dari Kementerian Pertanian. Upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima, dilaksanakan melalui strategi:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas birokrasi.

Sedangkan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar III.1 Kerangka Strategi Pembangunan Perkebunan Nasional



Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024:

- Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman;
- Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan;
- Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI;

- e) Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan; dan
- f) Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

RENJA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. RENJA Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022.

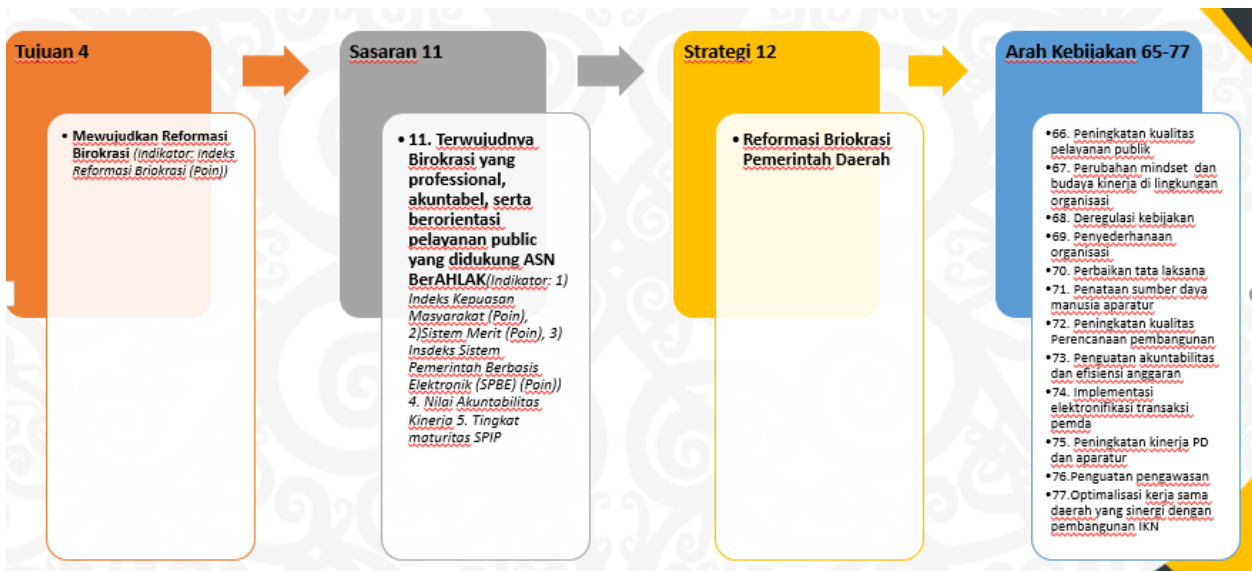
III.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PD

III.2.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu tiga tahun ke depan berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi dan isu yang berkembang yang harus di respon serta mempertimbangkan peran langsung sektor perkebunan dalam kerangka pelaksanaan RKPD 2024 -2026 khususnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :



Secara tidak langsung Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga berperan dalam pencapaian Tujuan 4 RPD sebagai berikut :



Berdasarkan analisis diatas maka ditetapkan visi Dinas Perkebunan tahun 2024 - 2026 adalah **“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera”** dengan 3 misi, yaitu:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan dalam mewujudkan transformasi ekonomi;
2. Meningkatkan Peran Sub sektor perkebunan dalam menjaga kualitas lingkungan; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan birokrasi yang akuntabel.

Visi dan misi tersebut ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur periode 2024 - 2026, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

III.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran

bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai tiga tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam tiga tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2024 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi komoditi perkebunan dengan indikator produksi komoditi perkebunan (ton)
2. Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan indikator Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat (%)
3. Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (sustainable palm oil) (pelaku usaha)
4. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator :
 - Nilai SAKIP perangkat daerah (nilai/predikat)
 - Indeks kepuasan pengguna layanan perangkat daerah (indeks)

III.3. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

A. Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 3 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

B. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada RKPD 2024, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan;
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dan;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai dan;
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 6) Administasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - d) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

- b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan;
- c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan;
 - b) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian dan;
 - b) Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani.

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:

- a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian.
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pendampingan dan pengawalan korporasi petani;
 - b) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani.

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2024 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 78.729.186.000,- (Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)**. Total anggaran dinas sebesar Rp. 65.483.601.900,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.786.334.000,- UPTD P2TP sebesar Rp. 3.337.721.100 dan UPTD PBTP sebesar Rp. 7.121.529.000,-.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2024 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2024, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2024, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2024. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja RENJA Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2023, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2024.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1 Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode	Organisasi	RKPD 2024 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	78.729.186.000,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	65.483.601.900,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2.786.334.000,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3.337.721.100,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	7.121.529.000,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN						65.483.601.900,00							64.367.232.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						65.483.601.900,00							64.367.232.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						65.483.601.900,00							64.367.232.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan</i>	90,83 Indeks 100 % 85,50 Indeks 87,20 Indeks 100 % 100 % 100 % 88,38 Indeks			100 % 78,93 Skor	30.442.505.100,00						84,88 Indeks 100 % 82,75 Indeks 86,20 Indeks 100 % 100 % 100 % 83,75 Indeks	32.331.132.980,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu</i>	100 %			100 %	3.228.702.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 %	2.239.416.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	11 Dokumen			4 Dokumen	2.025.718.400,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Dokumen	774.491.100,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	474.804.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	522.284.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	45 Dokumen			15 Dokumen	10.550.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	15 Dokumen	19.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	9 Dokumen			3 Dokumen	1.225.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Dokumen	11.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen			6 Dokumen	27.100.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	6 Dokumen	18.300.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen			6 Dokumen	29.500.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	6 Dokumen	30.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			4 Laporan	9.150.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Laporan	12.400.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	8.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 100 %	8.900.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	8.900.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	8.900.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 % 70,50 Unit 66 % 83,33 %			35,71 %	654.050.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	50 % 53 Unit 62 % 59,52 %	655.255.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			15 Orang	464.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	6 Orang	452.200.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit			4 Unit	2.123.282.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	2.224.067.790,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Paket	55.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	245.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Paket	350.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	465.693.200,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Paket	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	54.123.300,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	4 Paket	59.535.630,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	34.331.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	37.764.100,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	571.703.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	628.873.300,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	629.160.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	960.865.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	600.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			20 Unit	170.720.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	190.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	98,00 % 25,46 % 18000000 B enih			25,36 %	20.852.056.400,00						96,50 % 25,41 % 6000000 B enih	20.287.620.260,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis			10 Jenis	20.852.056.400,00			-	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	10 Jenis	20.287.620.260,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	1.330.733.700,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan	-	1 Dokumen	1.228.300.440,00	DINAS PERKEBUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit			1 Unit	1.120.166.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	1 Unit	1.052.182.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	3 Unit			1 Unit	670.921.000,00	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	1 Unit	670.921.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN							2.786.334.000,00						2.786.334.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.786.334.000,00							2.786.334.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.786.334.000,00							2.786.334.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	90,83Indek s 100% 85,50Indek s 87,20Indek s 100% 100% 100% 88,38Indek s			85,87 Skor 100 %	1.731.871.000,00						84,88Indek s 100% 82,75Indek s 86,20Indek s 100% 100% 100% 83,75Indek s	1.710.474.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	84.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 100 %	84.960.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	84.960.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukankam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Dokumen	84.960.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	5.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 100 %	5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	7.744.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Paket	7.744.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	7.756.800,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	7.756.800,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	342.000.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	308.400.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			4 Unit	149.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	149.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			13 Unit	39.910.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	39.910.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya	98,00% 25,46% 18000000 Benih			6000000 Benih	1.054.463.000,00						96,50% 25,41% 6000000 Benih	1.075.860.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	150000 Benih 15000000 Benih			5000000 Benih	1.054.463.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	50000 Benih 5000000 Benih	1.075.860.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih	450 Sertifikat			150 Sertifikat	559.543.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	150 Sertifikat	589.191.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	84.960.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Dokumen	84.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	2.000.000,00			-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	100 % 100 % 100 % 100 %	2.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	2.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 % 70,50 Unit 66 % 83,33 %			35 %	93.960.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	50 % 53 Unit 62 % 59,52 %	93.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	274.800.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	274.800.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i>	6Jenis 15Jenis 39Jenis 26Jenis			14 Jenis	593.188.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2Jenis 5Jenis 13Jenis 7Jenis	593.188.320,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit			1 Unit	383.097.600,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2 Unit	448.425.600,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	178.912.800,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	178.912.800,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	129.360.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	129.360.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	207.740.480,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	207.740.480,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	3360 Ha			1040 Ha	1.514.783.300,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan	-	1120 Ha	1.483.793.200,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						7.121.529.000,00							6.561.436.500,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.121.529.000,00							6.561.436.500,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						7.121.529.000,00							6.561.436.500,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	90,83Indeks 100 % 85,50Indeks 87,20Indeks 100 % 100 % 100 % 88,38Indeks			80 Skor 100 %	2.621.529.000,00						84,88Indeks 100 % 82,75Indeks 86,20Indeks 100 % 100 % 100 % 83,75Indeks	2.061.436.500,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Laporan	50.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60 % 70,50 Unit 66 % 83,33 %			40 %	77.067.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	50 % 53 Unit 62 % 59,52 %	89.911.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			6 Orang	77.067.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	-	6 Orang	89.911.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit			1 Unit	388.734.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Unit	379.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	25.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	4 Paket	25.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			12 Dokumen	3.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	12 Dokumen	3.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	244.234.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	-	1 Laporan	235.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6Jenis 15Jenis 39Jenis 26Jenis			4 Jenis	1.149.465.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	2Jenis 5Jenis 13Jenis 7Jenis	302.965.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	1.036.500.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	0 Unit	0,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit			2 Unit	112.965.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	302.965.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Penzinannya	3 Unit			1 Unit	12.203.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	1 Unit	35.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			3 Unit	80.000.000,00	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	340.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			3 Unit	25.000.000,00	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	-	3 Unit	25.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	98,00 % 25,46 % 18000000 Benih			95 %	4.500.000.000,00						96,50 % 25,41 % 6000000 Benih	4.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	150000.Beni h 15000000.B enih			50000 Benih	4.500.000.000,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	50000 Benih 5000000.Be nih	4.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	6 laporan			2 laporan	4.500.000.000,00	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	-	2 laporan	4.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	J U M L A H							78.729.186.000,00							77.021.733.500,00	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) memuat evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta mengakomodir hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RENJA Tahun 2024.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan RENJA diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan guna **Mewujudkan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Transformasi Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR





DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

EMAIL : disbun_kaltim@yahoo.com & disbunkaltim@gmail.com